



HIMPUNAN
PSIKOLOGI
INDONESIA

PSIKOLOGI INDONESIA

■ volume 2 no. 2, April 2021

Liputan Khusus

***Hidup Sehari-hari
adalah
Laboratorium
yang Nyata***

(HALAMAN 164)

***Isu dan Tantangan Etis
dalam Implementasi
Merdeka Belajar,
Kampus Merdeka***

(HALAMAN 144)

***Menciptakan Magang
yang Bermakna***

(HALAMAN 138)

***Bahasa
Indonesia
Sebagai
Bahasa Ilmiah
Internasional***

(HALAMAN 154)

***"PENJARA
PSIKOLOGIS"
di Perguruan Tinggi***

(HALAMAN 132)



ISSN 977 268 577 500 9



9 772685 775009

Kampus Werdeke INDONESIA JAWA

PSIKOLOGI INDONESIA

REDAKSI

PEMIMPIN UMUM

Seger Handoyo

PEMIMPIN REDAKSI

Augustinus Supratiknya

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Juneman Abraham

REDAKTUR PELAKSANA

Tjipto Susana, Rahkman Ardi

REPORTER

Juneman Abraham

DESAIN DAN LAYOUT

Bivita Brata Prabawa Riko

ALAMAT REDAKSI



HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA

Jl. Kebayoran Baru No. 85B

Kebayoran Lama, Velbak

Jakarta Selatan DKI Jakarta 12240

Indonesia, 021 7280-1625, +62 821-1435-0101

Alamat surel: psikologiindonesia@himpsi.or.id

daftar isi

- 120 Editorial
124 Kata Pengantar

ISU PSIKOLOGI TERKINI

- 126 MBKM dan Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia
138 “Menciptakan Magang yang Bermakna untuk Mahasiswa S1 Psikologi Indonesia: Pekerjaan Rumah bagi Perguruan Tinggi dan Pendidik”.
154 Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Ilmiah Internasional: Upaya Intervensi untuk Sebuah Pengakuan Karya Ilmiah Internasional
183 Menuju Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Kampus Psikologi Aspirasi Kolokium Khusus AP2TPI 2020

ARTIKEL ILMIAH POPULER

- 132 “Penjara Psikologis” di Perguruan Tinggi dan Peran Penjaminan Mutu di Era Kampus Merdeka
144 Isu dan Tantangan Etis dalam Implementasi Merdeka Belajar, Kampus Merdeka
149 Pendidikan Literasi Media Dalam Kampus Psikologi Merdeka

LIPUTAN KHUSUS

- 164 Hidup Sehari-hari adalah Laboratorium yang Nyata, Menghasilkan Pengetahuan untuk Menjawab Kebutuhan Masyarakat

ETIKA

- 173 Manajemen Penyelesaian Masalah Etika dalam Psikologi

OBITUARI

- 196 Prof. Dr. Tb. Zulrizka Iskandar, M.Sc., Psikolog
201 Jo Rumeser: Sang Pengarah yang Menginspirasi

RESENSI

- 209 Mengajar Difabel di Kampus Inklusif: Pengalaman UIN Sunan Kalijaga

ADVERTORIAL

- 189 Berkolaborasi Menjadi Sarana Menuju Kampus Psikologi Merdeka: Pengalaman Program Studi Psikologi, Universitas Binawan
-

Editorial

Agenda liberasi pendidikan “Merdeka Belajar” Mendikbudristekdikti Nadiem Makarim di jenjang pendidikan tinggi dituangkan dalam kebijakan “Kampus Merdeka”. Sesuai dokumen resmi aslinya yang dimaklumkan pada 24 Januari 2020, kebijakan itu memuat empat pokok kebijakan, yaitu terkait: (1) pembukaan program studi (prodi) baru; (2) sistem akreditasi perguruan tinggi; (3) perguruan tinggi negeri badan hukum; dan (4) hak belajar tiga semester di luar program studi.

Pokok kebijakan pertama mengatur tiga hal bagi perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) dengan akreditasi A dan B, sebagai berikut. Pertama, PTN dan PTS diberi otonomi untuk membuka prodi baru jika: (a) prodi baru tersebut memiliki kerja sama dengan mitra perusahaan, organisasi nirlaba, institusi multilateral atau universitas *Top 100 ranking QS* dan bukan di bidang Kesehatan dan Pendidikan. Kerjasama dengan organisasi mitra mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja, dan penempatan kerja. Kementerian akan bekerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi mitra prodi untuk melakukan pengawasan. Kedua, prodi baru tersebut otomatis akan mendapatkan akreditasi C dari BAN-PT. Ketiga, *tracer study* wajib dilakukan setiap tahun. Jenis organisasi mitra kerja sama prodi baru yang direkomendasikan oleh Kemendikbudristekdikti beserta contoh-contohnya meliputi: (a) perusahaan multinasional, yaitu perusahaan besar dunia yang masuk dalam daftar *Fortune 500*, seperti *Royal Dutch Shell*, *Nestle*, *Toyota*, dan lain-lain; (b) perusahaan teknologi global, yaitu perusahaan teknologi yang memiliki reputasi sangat baik, seperti *Google*, *Apple*, *Amazon*,

Intel, *Cisco Systems*, dan lain-lain; (3) *Startup* teknologi, yaitu perusahaan *startup* yang telah mengumpulkan dana sebesar minimum USD \$50 juta, seperti *Tokopedia*, *Traveloka*, *Gojek*, dan lain-lain; (4) organisasi multilateral, yaitu semua organisasi multilateral dan nirlba kelas dunia, seperti *PBB*, *Bank Dunia*, *ADB*, *USAID*, *Gates Foundation*, dan lain-lain; dan (5) BUMN dan BUMD, yaitu BUMN berskala besar di tingkat nasional, seperti *PLN*, *BRI*, *Pertamina*, dan lain-lain; BUMD berskala besar di setiap provinsi, seperti *MRT*, *Bank BJB*, *Trans Jakarta*, dan lain-lain.

Pokok kebijakan kedua menyatakan bahwa re-akreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat, dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat akreditasi. Pokok kebijakan ini meliputi empat ketentuan sebagai berikut. Pertama, akreditasi yang sudah ditetapkan oleh BAN-PT tetap berlaku selama 5 tahun dan akan diperbarui secara otomatis. Perguruan tinggi yang terakreditasi B atau C dapat mengajukan kenaikan akreditasi kapan pun secara sukarela. Kedua, peninjauan kembali akreditasi akan dilakukan BAN-PT jika ada indikasi penurunan mutu, misalnya: (1) adanya pengaduan masyarakat (disertai dengan bukti yang konkret); (2) jumlah pendaftar dan lulusan dari perguruan tinggi/prodi yang bersangkutan menurun secara drastis dalam lima tahun berturut-turut. Ketentuan lebih lanjut tentang penurunan kualitas akan diatur melalui peraturan Dirjen terkait. Ketiga, akreditasi A akan diberikan bagi prodi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Akreditasi internasional yang diakui akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri. Keempat, pengajuan re-akreditasi

EDITORIAL

perguruan tinggi dan prodi dibatasi paling cepat dua tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali. Kelima, *tracer study* wajib dilakukan setiap tahun.

Pokok kebijakan ketiga mengatur kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (BH). Pokok kebijakan ini meliputi tiga ketentuan sebagai berikut. Pertama, persyaratan untuk menjadi badan hukum (BH) dipermudah bagi PTN BLU dan Satker. Kedua, PTN BLU dan Satker dapat mengajukan perguruan tingginya untuk menjadi Badan Hukum tanpa akreditasi minimum. Ketiga, PTN dapat mengajukan permohonan menjadi Badan Hukum kapan pun.

Pokok kebijakan keempat mengatur hak mengambil mata kuliah di luar prodi dan perubahan definisi satuan kredit semester. Pokok kebijakan ini memuat dua ketentuan sebagai berikut. Pertama, perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara suka rela (dapat diambil atau tidak diambil): (a) untuk mengambil sks di luar perguruan tinggi sebanyak dua semester (setara dengan 40 sks); ditambah lagi dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak satu semester (setara dengan 20 sks). Maka, jumlah sks yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak lima semester dari total semester yang harus ditempuh. Namun ketentuan ini tidak berlaku untuk prodi Kesehatan. Kedua, tentang perubahan definisi sks, dinyatakan: (a) setiap sks diartikan sebagai “jam kegiatan”, bukan “jam belajar”; (b) definisi “kegiatan” meliputi belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing oleh seorang dosen yang ditentukan oleh perguruan tinggi; (c) daftar “kegiatan” yang dapat diambil oleh mahasiswa dalam tiga semester di atas dapat diperoleh dari: (1) program yang ditentukan oleh pemerintah; dan/atau (2) program yang disetujui

oleh rektor.

Terkait tiga pokok kebijakan yang berlaku umum bagi seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, tertangkap kesan bahwa kebijakan “Kampus Merdeka” memberikan tekanan cukup kuat pada fungsi pendidikan tinggi dalam menyiapkan calon tenaga yang siap memasuki pasar kerja. Jika kesan ini benar dan kebijakan itu diimplementasikan secara konsekuen diduga bisa menimbulkan sejumlah implikasi yang serius terkait corak Psikologi sebagai disiplin ilmu, corak penyelenggaraan pengajaran pada pendidikan tinggi Psikologi dan corak lulusan yang dihasilkan, serta corak penyelenggaraan Psikologi sebagai layanan profesi. Sejumlah pertanyaan yang spontan muncul misalnya: (1) apakah Psikologi sebagai disiplin ilmu akan dikembangkan terutama sebagai disiplin ilmu terapan atau disiplin ilmu murni; (2) baik sebagai ilmu terapan maupun ilmu murni apakah Psikologi akan dikembangkan sebagai mono-disiplin atau multi-disiplin; (3) apakah penyelenggaraan pendidikan tinggi psikologi baik pada jenjang sarjana, magister maupun doktor akan bercorak akademik, terapan atau profesional; (4) apakah lulusan program pendidikan tinggi Psikologi pada jenjang sarjana, magister dan doktor akan bercorak keilmuan atau keprofesian; (5) apakah Psikologi sebagai layanan profesional akan bercorak berbasis ilmu-teori atau sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan pemangku kepentingan yang dilayani; dan (6) terkait penjaminan mutu baik dalam bidang pengembangan ilmu Psikologi, penyelenggaraan pendidikan tinggi Psikologi pada jenjang sarjana, magister dan doktor maupun dalam bidang penyelenggaraan layanan profesional Psikologi apakah akan tetap sepenuhnya dipercayakan pada institusi dan mekanisme yang ada seperti Majelis Psikologi, BAN-PT dan LSP atau perlu dibentuk insitusi baru untuk mendukung pelaksanaan tugas penjaminan mutu penyelenggaraan pengembangan ilmu Psikologi, pendidikan tinggi Psikologi dan layanan profesional Psikologi?

EDITORIAL

Tentu, pertanyaan-pertanyaan tersebut terlampaui hitam-putih dan kurang bernuansa, tetapi yang hendak digarisbawahi oleh artikel-artikel dalam rubrik *Psikologi Indonesia* kali ini adalah pentingnya kita merespon isu-isu yang mungkin muncul di sekitar pertanyaan-pertanyaan tersebut, manakala kita mencoba mengimplementasikan kebijakan “Merdeka Belajar: Kampus Merdeka” secara konsekuen!

Tentang Edisi Ini

Psikologi Indonesia kali ini menyajikan 13 (tiga belas) artikel, yakni 4 artikel rubrik *Isu Psikologi Terkini*, 3 artikel rubrik *Artikel Ilmiah Populer*, 1 artikel rubrik *Etika*, 1 artikel rubrik *Resensi Buku*, 2 artikel rubrik *Obituari*, 1 artikel *advertorial*, serta 1 artikel rubrik *Liputan Khusus*.

Pada Rubrik *Isu Psikologi Terkini*, penekanan pada kebermaknaan bagi partisipan Kampus Merdeka, orientasi kebermanfaatan pendidikan dan riset psikologi bagi masyarakat luas, aktualisasi diri melalui bahasa (yang mampu memfasilitasi pemahaman dan pemecahan masalah bersama), serta penghargaan atas keragaman sebagai basis koordinasi Kampus Merdeka, menjadi tema-tema kunci.

Terdapat 4 (empat) buah artikel dalam rubrik tersebut, yakni (1) "Menciptakan Magang yang Bermakna untuk Mahasiswa S1 Psikologi Indonesia: Pekerjaan Rumah bagi Perguruan Tinggi dan Pendidik" (Jenny Lukito Setiawan & Jessie Janny Thenariato), (2) "MBKM dan Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia" (Juliana Murniati), (3) "Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Ilmiah Internasional: Upaya Intervensi untuk Sebuah Pengakuan Karya Ilmiah Internasional" (Koentjoro), dan (4) "Menuju Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Kampus Psikologi: Aspirasi Kolokium Khusus AP2TPI 2020" (Nurul Hartini).

Pada Rubrik *Artikel Ilmiah Populer, Etika, dan Resensi Buku*, keadilan dan etika mengemuka sebagai tema-tema kunci, baik dalam hal penjaminan mutu pendidikan tinggi, pendidikan literasi media, maupun dalam magang, praktik kerja, proyek kemanusiaan, pengajaran di kampus inklusif, serta dalam penanganan masalah etis dalam komunitas psikologi.

Terdapat 3 (tiga) buah artikel dalam rubrik *Artikel Ilmiah Populer*, yakni (1) "Penjara Psikologis di Perguruan Tinggi dan Peran Penjaminan Mutu di Era Kampus Merdeka" (Afred Suci), (2) "Pendidikan Literasi Media Dalam Kampus Psikologi Merdeka" (Laras Sekarasih), dan (3) "Isu dan Tantangan Etis dalam Implementasi Merdeka Belajar, Kampus Merdeka" (Monica E. Madyaningrum). Pada Rubrik *Etika*, terdapat sebuah artikel, yakni "Manajemen Penyelesaian Masalah Etika dalam Psikologi" (Augustinus Supratiknya). Pada Rubrik *Resensi Buku*, terdapat sebuah ulasan atas buku "Mengajar Difabel di Kampus Inklusif: Pengalaman UIN Sunan Kalijaga" (Frieda Maryam Mangunsong Siahaan).

Pada Rubrik *Obituari*, dihadirkan obituarium dari Prof. Dr. Tb. Zulrizka Iskandar, M.Sc., Psikolog, yang berperan dalam pengembangan Pendidikan Psikologi Profesi, Psikologi Lingkungan dan Psikologi Sosial Terapan, dan Dr. Johannes Adriaan Arnoldus Rumeser, M.Psi., Psikolog, yang berperan dalam pengembangan Psikologi Industri dan Organisasi serta Psikologi Olah Raga. Sedangkan, pada Rubrik *Advertorial*, terdapat sebuah artikel yakni "Berkolaborasi Menjadi Sarana Menuju Kampus Psikologi Merdeka: Pengalaman Program Studi Psikologi, Universitas Binawan" (Ayu Dwi Nindyati).

Pada akhirnya, pada Rubrik *Liputan Khusus*, terdapat sebuah artikel, yakni "Hidup Sehari-hari adalah Laboratorium yang Nyata: Menghasilkan Pengetahuan untuk Menjawab Kebutuhan Masyarakat (Risa Permanadeli)". Artikel ini menjadi "juru kunci" dari seluruh artikel yang

EDITORIAL

mengangkat tema Kampus Psikologi Merdeka dalam edisi kali ini. Psikologi yang telah memperoleh kedudukan sebagai sains tentu memerlukan pengembangan pengetahuan yang berkualitas secara berkelanjutan. Artikel ini mengulas bagaimana seharusnya pengembangan pengetahuan psikologis berlangsung, serta dimensi-dimensi sosial, ekonomi, teknologi, dan budaya apa sajakah yang layak dipertimbangkan untuk mengembangkan sebuah "laboratorium psikologi" - sebuah laboratorium yang diharapkan mampu mendinamiskan segenap proses dan isi kegiatan Kampus Psikologi Merdeka.

Akhirul kalam, selamat membaca dan sekaligus kami undang sidang pembaca menyumbangkan tulisan pada edisi-edisi berikut.

Salam Psikologi Indonesia

-Tim Redaksi

Surat Pembaca

Anda dipersilakan mengirim surat pembaca atau komentar kepada redaksi.

Surat pembaca atau komentar dikirim kepada alamat redaksi, dengan menuliskan nama lengkap, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi, disertai dengan fotokopi atau *scan* identitas diri.

Undangan Menulis Artikel

Redaksi mengundang pembaca untuk menjadi kontributor artikel **Psikologi Indonesia vol.3 no.1, Juli 2021** dengan tema Layanan dan Praktik Psikologi lewat Internet. Artikel menggunakan bahasa ilmiah populer, menggunakan acuan yang dapat dipertanggungjawabkan, merupakan tulisan asli penulis yang tidak pernah dipublikasikan, serta disampaikan minimal dalam 1500 kata dan maksimal 2500 kata. Artikel dikirimkan pada alamat redaksi dengan judul "artikel ilmiah populer PI [judul artikel]" dengan menuliskan nama lengkap, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi, disertai dengan fotokopi atau *scan* identitas diri. Artikel diterima paling lambat oleh redaksi pada tanggal **1 Juni 2021**. Artikel akan diseleksi dan hanya artikel terpilih yang akan diterbitkan.

Kata Pengantar

Seger Handoyo
KETUA UMUM PP HIMPSI

Back-to-back dalam dua edisi, *Psikologi Indonesia* menyuguhkan tulisan-tulisan bermakna tentang Merdeka Belajar. *Psikologi Indonesia* Volume 2 Nomor 1 menampilkan Merdeka Belajar, yang mengangkat berbagai hal terkait dengan kebijakan Mendikbudristekdikti tentang Merdeka Belajar, pada Volume 2 Nomor 2 menyajikan Merdeka Belajar di Pendidikan tinggi, yang kebijakannya biasa disebut Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Hal itu menunjukkan dukungan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) terhadap kebijakan tersebut dan berharap besar agar kebijakan tersebut dapat memberikan dampak pada lulusan pendidikan yang berkualitas. Mengapa HIMPSI memberikan dukungan terhadap kebijakan MBKM? Setidaknya terdapat tiga alasan utama, yaitu (1) setiap peserta didik (siswa atau mahasiswa) merupakan pribadi yang unik yang mempunyai kecerdasan, bakat, minat, dan tujuan karier yang berbeda satu dengan lainnya (sebagai cerminan konsep dasar Psikologi, yaitu perbedaan individual), (2) MBKM dapat mendorong motivasi internal pada peserta didik untuk belajar sesuai dengan tujuan hidup dan kariernya, dan (3) perkembangan teknologi informasi telah memberikan bahan belajar yang berlimpah untuk berbagai bidang keilmuan dan keterampilan kerja.

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, khususnya yang memberikan hak belajar tiga semester di luar program studi, akan memberikan ruang mahasiswa untuk belajar sesuai dengan kecerdasan, bakat, minat, dan tujuan kariernya.

Mahasiswa program studi S1 Psikologi, misalnya yang mempunyai kecerdasan biasa saja, yang berminat berkarier sebagai wirausaha, akan dapat menggunakan kesempatan belajar tiga semester di luar program studi. Misalnya dengan memilih belajar tentang perencanaan dan pengelolaan bisnis pada Program Studi Manajemen dan mengambil magang atau praktik kerja di usaha rintisan yang sesuai dengan tujuan kariernya tersebut. Sementara itu, mahasiswa lain yang mempunyai kecerdasan yang tinggi, berminat bekerja sebagai dosen Psikologi, akan dapat mendalami ilmu Psikologi di universitas lain dan mengambil kegiatan riset untuk memperkuat kemampuan metodologi, penulisan publikasi ilmiah dan lainnya. Belajar tiga semester di luar program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan kariernya akan memberikan motivasi belajar yang lebih besar dibandingkan belajar materi yang sudah ditetapkan, apalagi yang tidak sesuai dengan minatnya.

Tentu saja, kebijakan yang baik tidak dapat secara otomatis akan menghasilkan luaran dan dampak yang baik. Perencanaan terkait implementasi kebijakan tersebut oleh perguruan tinggi menjadi faktor penting keberhasilan program tersebut. Setidaknya dua hal dari banyak hal lainnya, yang dapat disampaikan disini agar implementasinya berhasil adalah menjaga semangat kemerdekaan pada mahasiswa dalam memilih kegiatan dalam tiga semester belajar di luar program studi, dan mempersiapkan mahasiswa untuk mempunyai kemampuan memilih kegiatan tersebut sesuai dengan kecerdasan, bakat, minat, dan tujuan

KATA PENGANTAR

kariernya. Apabila kedua hal tersebut tidak dipenuhi dalam implementasinya, maka MBKM akan hanya menjadi tidak lebih slogan indah tanpa makna. Mahasiswa harus diberi kemampuan untuk mempunyai kesadaran terhadap dirinya dan kemampuan untuk membuat keputusan karier. Perguruan tinggi yang mempunyai program studi Psikologi seharusnya meminta bantuan dosen-dosen Psikologi untuk membantu menyiapkan mahasiswa memiliki kemampuan memilih kegiatan tiga semester belajar di program studi lain sesuai dengan kecerdasan, bakat, minat, dan tujuan kariernya. Perguruan tinggi lain yang tidak mempunyai program studi Psikologi dapat meminta bantuan Tenaga Psikologi (Sarjana Psikologi dan Psikolog) untuk membantu hal itu.

Terimakasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras tim editor untuk penerbitan Psikologi Indonesia Volume 2 Nomor 2 ini, yaitu Prof. Dr. Augustinus Soepratiknya, Psikolog, Dr. Rahkman Ardi, M.Psych., Dr. Juneman Abraham, M.Si., dan Dr. Tjipto Susana, Psikolog. Apresiasi dan terimakasih juga saya sampaikan kepada Prof. Dra. Jenny Lukito Setiawan, M.A., Ph.D., Psikolog, Jessie Janny Thenarianto, S.Psi., Dr.phil. Juliana Murniati, M.Si., Prof. Drs. Koentjoro, M.B.Sc., Ph.D., Psikolog, Prof. Dr. Nurul Hartini, M.Kes., Psikolog, Afred Suci, S.E., M.Si., Laras Sekarasih, S.Psi., M.S., Ph.D., Monica E. Madyaningrum, Ph.D., Prof. Dr. Augustinus Supratiknya, Psikolog, Prof. Dr. Frieda Maryam Mangunsong Siahaan, M.Ed., Psikolog, Dr. Risa Permanadeli, Dr. Retno Hanggarani Ninin, M.Psi., Psikolog, Dr. Esther Widhi Andangsari, M.Si., Psikolog, dan Dr. Ayu Dwi Nindyati, M.Si., Psikolog. Terimakasih juga kami sampaikan untuk Program Studi Psikologi Universitas Binawan yang telah memberikan dukungan penerbitan Psikologi Indonesia edisi ini.

Selamat menikmati artikel-artikel dalam rubrik Isu Psikologi Terkini, rubrik Artikel Ilmiah Populer, rubrik Etika, rubrik Resensi Buku, rubrik Obituari, Advertorial, serta rubrik Liputan Khusus dalam Psikologi Indonesia kali ini.

Artikel-artikel dalam berbagai rubrik tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman dan inspirasi, serta motivasi untuk kita semua dapat mengimplementasikan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sebaik-baiknya.

Terbitan Psikologi Indonesia selalu mengajak kita untuk mengenang dan belajar dari *legacy* para tokoh Psikologi. Kita berterima kasih atas sumbangan besar Prof. Dr. Tb. Zulrizka Iskandar, M.Sc., Psikolog dan Dr. Johannes Adriaan Arnoldus Rumeser, M.Psi., Psikolog. Beliau berdua telah meninggalkan warisan penting untuk perkembangan Pendidikan Psikologi dan juga praktik Psikologi di bidangnya masing-masing di lingkup nasional dan internasional, antara lain dalam pengembangan Pendidikan Psikologi Profesi, Psikologi Lingkungan dan Psikologi Sosial Terapan, Psikologi Industri dan Organisasi serta Psikologi Olah Raga. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk meneruskan cita-cita, harapan, dan impian majunya Psikologi Indonesia. Saya dekat dan mengenal baik *Bang Zul* dan *Bang Jo*. Setiap bertemu dengan mereka, selalu bertumbuh semangat dalam diri saya untuk berbuat lebih, karena dalam kondisi sakitnya pun, Bang Zul dan Bang Jo selalu memikirkan perkembangan Psikologi Indonesia. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya dan kita semua dapat melanjutkan perjuangannya.

Mari kita terus belajar dan merenungkan apa hal terbaik yang dapat kita berikan untuk *Psikologi Indonesia*, dan terus berkarya untuk bangsa.

ISU PSIKOLOGI TERKINI

MBKM dan Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia

Juliana Murniati

Fakultas Psikologi, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta

Knowledge is not power until it is turned into action
(Aristotle)

Satu dari empat kebijakan kampus merdeka Mendikbudristekdikti RI 2019-2024 yang bersinggungan langsung dengan penyelenggaraan Pendidikan Psikologi adalah kebebasan belajar di luar program studi (prodi)-nya. Bentuknya berupa kuliah, magang di industri, pengabdian kepada masyarakat, pertukaran mahasiswa, dan lainnya (Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, 2020). Ada dua hal dari kebijakan ini: (1) seawal mungkin mempertemukan mahasiswa dengan realitas lapangan, dan (2) melatih mahasiswa mampu berdialog dengan disiplin ilmu lain, menjelaskan, dan memecahkan permasalahan yang ditemui. Intinya, kurikulum merdeka belajar dan kampus merdeka (MBKM) memberi ruang besar untuk terapan Psikologi. Tulisan ini berfokus pada dua pertanyaan: (1) apakah pengembangan Psikologi ke depan akan diarahkan kepada terapan, bukan ilmu murni, dan (2) bagaimana dengan pengelolaan program Pendidikan Psikologi Indonesia?

Psikologi sebagai Ilmu Murni yang Bisa Diterapkan

Secara umum riset dasar/murni bertujuan untuk mengungkap, menjelaskan fenomena dan mengembangkan hukum/teori, sementara kajian praktis/terapan berfokus pada aplikasi fakta dan teori ke dalam situasi nyata (Avital, 2019). Sebagai

contoh kajian mengenai perilaku kekerasan: riset fundamental berfokus pada berbagai faktor pengaruh, sementara kajian terapan berfokus pada program paling efektif untuk mereduksi perilaku kekerasan tersebut.



Juliana Murniati

ISU PSIKOLOGI TERKINI

Dengan konsentrasinya hanya untuk menemukan kebenaran (*truthfulness*), kritik yang sering ditujukan kepada ilmu dasar seperti Psikologi adalah kebermanfaatannya, seolah tidak menyentuh isu keseharian, hanya berkutat di laboratorium dan bersifat fragmental (Drenth, 2008). Sebaliknya ilmuwan dasar memiliki posisi “*concessions to practical applicability lead to corruption, and, eventually, the destruction of science*” (Drenth, 2008, p. 525). Dalam praktiknya, peneliti riset murni sering memposisikan dirinya di atas praktisi, memandang periset terapan seolah ‘penerjemah’ dari ilmuwan Psikologi, karena hanya pengguna hasil temuan riset fundamental (Helton & Kemp, 2010).

Penelitian dasar masih merupakan fokus utama universitas modern, tetapi bervariasi antar negara dan disiplin ilmu (Bentley, Gulbrandsen, & Kyvik 2015). Pada tataran individu, sebagian besar dosen justru terlibat dalam riset terapan, dan mereka yang fokus pada riset murni umumnya tidak dituntut untuk penerapan dari kajiannya, di samping dana riset juga terbatas (Bentley, Gulbrandsen, & Kyvik 2015). Lalu bagaimana sebaiknya sikap Psikologi Indonesia: berorientasi pada pengembangan akademik daripada terapan? Kita cermati dulu sistem Jerman, yang program vokasinya sering dijadikan sebagai rujukan, sekaligus tempat lahirnya Psikologi.

Program Pendidikan Psikologi di Jerman sangat tertata; program akademik S-1 hingga S-3 diselenggarakan oleh universitas, sedangkan program terapan oleh universitas terapan/*Fachhochschule* (FH), hanya menawarkan program sarjana dan magister terapan (misalnya Psikologi Bisnis, *Human Factor*, Kesehatan, Diagnostik & Evaluasi, dan sebagainya; <https://www.psychologie-studieren.de/infos/uni-fh-oder-akademie/>). Program terapan di universitas sangat terbatas, misalnya semester di luar negeri. FH sebaliknya menuntut relevansi praktis yang sangat tinggi, yang terlihat dari banyaknya magang, proyek dan menuntut dosen untuk senantiasa mencari pengalaman/kontak intensif dengan industri.

MBKM DAN PENDIDIKAN TINGGI PSIKOLOGI

Meskipun konsentrasi dosen universitas dan FH berbeda, mereka dipertemukan dalam satu asosiasi, bersama juga dengan industri. Karena itu, dosen program akademik juga termutakhirkan pengetahuan aplikatifnya. Pengurus asosiasi berasal dari universitas dan FH, anggota asosiasi adalah akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan. Satu contoh adalah PASIG (<http://www.fv-pasig.de/>), asosiasi Psikologi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) Jerman, yang merupakan kerjasama antara akademisi, praktisi, lembaga riset dan pengambil kebijakan terkait K3 (pemerintah) dengan ketuanya adalah promotor penulis, dan wakilnya rekan penulis, professor di FH Niederrhein. Pertemuan akademisi dan praktisi ini menjadi ajang pertukaran informasi atas perkembangan mutakhir, penemuan solusi atau ide inovatif di area K3.

Sementara program pendidikan profesi Psikologi berada di bawah tanggung jawab Kementerian Kesehatan, dengan pembelajaran berlangsung di klinik rumah sakit. Program ini berdurasi minimal

“Kita cermati dulu sistem Jerman, yang program vokasinya sering dijadikan sebagai rujukan, sekaligus tempat lahirnya Psikologi. Meskipun konsentrasi dosen universitas dan FH berbeda, mereka dipertemukan dalam satu asosiasi, bersama juga dengan industri. Karena itu, dosen program akademik juga termutakhirkan pengetahuan aplikatifnya. Pengurus asosiasi berasal dari universitas dan FH, anggota asosiasi adalah akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan”.

ISU PSIKOLOGI TERKINI**MBKM DAN PENDIDIKAN TINGGI PSIKOLOGI**

tiga tahun, hanya bisa ditempuh oleh mereka yang menyandang gelar magister klinis (<https://www.psychologie-studieren.de/infos/uni-fh-oder-akademie/>).

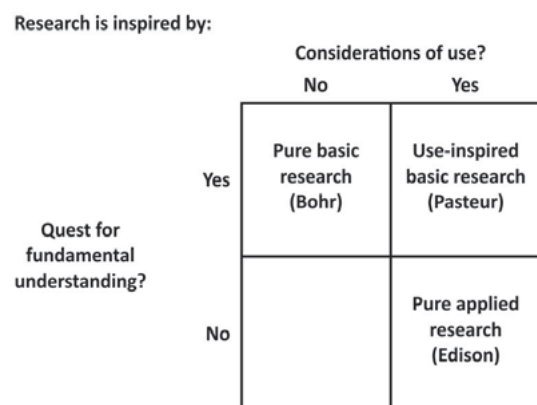
Sistem Pendidikan Psikologi Jerman yang sudah tertata rapi dengan asosiasi yang berfungsi baik merupakan contoh ideal pengelolaan pendidikan terpisah antara akademik dan terapan serta interkoneksi antara mereka dengan industri dan pemangku kepentingan. Perjalanan sejarah Psikologi Jerman cukup panjang (141 tahun), sementara usia Psikologi Indonesia relatif muda (68 tahun), dan masih berproses menemukan jati dirinya. Pemisahan institusi Pendidikan setegas Jerman tampaknya masih jauh dari perjalanan Indonesia menuju ke sana, atau bahkan tidak juga harus mengambil bentuk seperti itu. Lebih dari itu, Indonesia membutuhkan kontribusi konkret dari ilmu perilaku manusia untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial di masyarakatnya. Tuntutan berbeda ini, membutuhkan model lain yang lebih responsif, dan juga lebih cair dalam memandang hubungan ilmu murni dan terapan.

Menurut Model Kuadrannya Stokes (1997) baik riset murni maupun terapan bukanlah sebuah kontinum dengan ujung yang saling bertentangan, melainkan sebuah ortogonal yang didasarkan atas jawaban terhadap kebutuhan: apakah riset untuk mendapatkan pemahaman/ penjelasan atau untuk kebermanfaatan. Seperti terlihat pada Gambar 1, klasifikasi berdasarkan kedua tujuan tersebut menghasilkan tiga kuadran, yakni kuadran ilmu murni, ilmu terapan, dan kebermanfaatan yang didorong oleh riset murni (p 73). Dalam pandangan Stokes, dikotomi yang mempertentangkan riset murni dan terapan tidak tepat, bahkan mengacaukan. Penelitian bisa didasari oleh dorongan manapun; sejumlah riset dilakukan untuk menghasilkan dalil untuk memahami fenomena tanpa ada kebutuhan untuk terapannya, misalnya struktur atom dalam riset Bohr (Stokes, 1997). Penelitian lainnya dilaksanakan hanya untuk dimanfaatkan, seperti kajian lampu pijar oleh

Edison; atau riset lain dengan sasaran gabungan, yakni untuk menghasilkan pengetahuan, sekaligus untuk digunakan, sebagaimana pada riset Pasteur (Stokes, 1997). Karena ini juga, model kuadran Stokes (1997) ini dikenal sebagai *Pasteur's quadrant*.

Gambar 1

Model Kuadran dari Riset Ilmiah (Stokes, 1997, h. 73)



“Indonesia membutuhkan kontribusi konkret dari ilmu perilaku manusia untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial di masyarakatnya. Tuntutan berbeda ini, membutuhkan model lain yang lebih responsif, dan juga lebih cair dalam memandang hubungan ilmu murni dan terapan”.

Penyelenggaraan Pendidikan Psikologi Indonesia

Indonesia dengan berbagai permasalahan sosial di masyarakat, jelas membutuhkan Psikologi yang berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan bangsa. Merujuk Pasteur's Quadrant Stokes (1997), maka fokusnya pertama-tama pada sumbu horizontal, yakni kebermanfaatan, baru kemudian ke sumbu vertikal untuk mendapatkan pemahaman atas fenomena. Jadi keduanya bisa dilaksanakan secara berurutan, yang satu mendahului lainnya. Dalam MBKM bisa diartikan juga meletakkan dasar teoretis yang kuat pada keilmuannya, diikuti dengan terapannya di luar prodi. Penting diperhatikan di sini adalah basis pengetahuan/ model/dalil yang mumpuni dan kontekstual; bukan sekadar mengambil alih dari *setting* budaya lain. Jadi, pengetahuan yang dihasilkan dari riset dalam masyarakat Indonesia sangat dibutuhkan, agar memberikan dasar kuat untuk terapannya. Ghoshal mengingatkan bahwa "*nothing is as dangerous as a bad theory*" (2005, seperti dikutip dalam Tushman & O'reilly III, 2007, h. 770), tidak sekadar isu metodologi, tetapi teori yang hanya mengawang di menara gading, dan tidak menyentuh kebutuhan lapangan. Hasil kajian yang kemudian dikembalikan ke lapangan untuk dicermati efektivitasnya, pada gilirannya akan menjadi asupan untuk riset dasar berikut. Ini menunjukkan sasaran riset/aktivitas dengan sasaran pemahaman dan terapan saling terkait dan bergulir bak sebuah siklus: kajian berbasis kebutuhan lapangan, mengonfirmasi/tidak teori yang selama ini diyakini, didiseminasi lewat kelas perkuliahan, memunculkan ide penelitian berikut, juga bagi mahasiswa, dan seterusnya. Ia juga memunculkan pengajaran yang lebih kontekstual.

Mencermati hal di atas, berikut beberapa catatan untuk Pendidikan Psikologi Indonesia:

1. Pengembangan Psikologi bercorak akademik dan terapan dilakukan dalam sebuah siklus, bukan dikotomi yang dipertentangkan. Pengelolaan model Pendidikan di Jerman ideal, terpisah, namun sangat jelas jembatan penghubungnya.

Indonesia belum mencapai tataran ini; kebutuhannya lebih untuk penyelesaian masalah, cenderung pada riset terapan. Siklus sebagaimana dipaparkan di atas (Pasteur's quadrant), tampaknya lebih tepat diimplementasikan pada program doktor, dengan pemahaman teoretis/ konsep yang sudah lebih memadai. Di sini isu lintas budaya '*etic-emic*' untuk teori yang digunakan sangat kritis, untuk menghasilkan riset yang keterpakaianya tinggi untuk konteks Indonesia. Dengan penguasaan konsep teoretis yang lebih mumpuni pada mahasiswa S-3, seyogyanya mereka mampu menyoroti permasalahan dengan jelas/tajam, dan kemudian menentukan kerangka teori dan metode penelitian yang paling tepat untuk merespons permasalahan tersebut;

2. Mengemuka di atas 'riset murni' untuk mengenali *etic-emic* dari konsep/teori Psikologi *mainstream*. Fokus ini akan menjadi kajian dasar, namun bersifat sementara saja, pada saatnya akan digunakan oleh peneliti lain untuk kebermanfaatan lebih jauh. Kembali hal ini menegaskan bahwa riset murni dan terapan merupakan sebuah siklus, dan tidak harus juga terjadi pada satu pihak. Konsentrasi pada kajian demikian bisa menjadi fokus jenjang magister, terutama program sains, yang hasilnya bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa program sarjana, program doktor atau bahkan dosen peneliti;
3. Program magister profesi bersifat terapan, namun jalur profesi. Penyelenggaraannya berjalan bersama program akademik di jenjang magister, dan dengan kurikulum 5 semester

"Nothing is as dangerous as a bad theory. Tidak sekadar isu metodologi, tetapi teori yang hanya mengawang di menara gading, dan tidak menyentuh kebutuhan lapangan".

“Riset murni dan terapan merupakan sebuah siklus, dan tidak harus juga terjadi pada satu pihak. Konsentrasi pada kajian demikian bisa menjadi fokus jenjang magister, terutama program sains, yang hasilnya bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa program sarjana, program doktor atau bahkan dosen peneliti”.

untuk penyelesaiannya, catatan khusus untuk kedalaman pengetahuan bidang Klinis, karena menyangkut terapi. Program Profesi Klinis/ Psikoterapis di Jerman membutuhkan durasi minimal 5 tahun.

4. Program sarjana cenderung menjadi terapan di tiga semester terakhir. Fondasi menyangkut Ontologi (objek disiplin ilmu) dan Epistemologi (bagaimana kajian dilakukan) pada lima semester awal perlu dibangun dengan sangat kuat, agar mahasiswa memahami lingkup/batas disiplin ilmunya, dan mampu mengomunikasikannya dengan baik kepada disiplin ilmu lain;
5. MBKM menghasilkan pertemuan dan dialog mahasiswa Psikologi dengan disiplin ilmu lain (*interdisciplinary*). Karena itu, akan sangat membantu mahasiswa ketika bertemu lintas ilmu, apabila sejak awal ‘manusia’ sebagai makhluk bio-psi-sosio-kultural diperkenalkan secara utuh kepada mahasiswa. Dengan pendekatan ini, maka mahasiswa, juga para dosen tentunya, akan terbiasa berpikir multiperspektif, bahkan juga mudah bertransformasi ke interdisiplin. Pada tataran ini, kita boleh berharap munculnya hasil sinergi berupa inovasi untuk Indonesia;
6. Kecenderungan pada terapan pada program

akademik level sarjana berimplikasi pada bobot teoretis sebagaimana capaian pembelajaran keterampilan umum KKN level 6 (menjadi dasar penyetaraan jika akan studi ke luar negeri). Sekadar ilustrasi: “Kemampuan mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan menyusun hasil kajian tersebut dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni,” adalah keterampilan umum yang akan dihasilkan dari lulusan program diploma 4/sarjana terapan. Sementara keterampilan umum pada program sarjana akademik berbunyi “mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir” (Permendikbud no 3 tahun 2020). Karena itu, perlu dipertimbangkan juga bagaimana lulusan dari program yang cenderung terapan ini tetap bisa melanjutkan ke program magister sains, baik ketika mereka studi di dalam maupun di luar negeri. Jembatannya perlu dipikirkan, karena sejumlah bidang di tanah air seperti institusi pendidikan dan lembaga penelitian menuntut Magister Sains (bukan terapan) dengan basis teoretis yang kuat, yang juga dibutuhkan ketika mereka melanjutkan ke program akademik doktor. Kampus yang memiliki program Psikologi utuh dari S-1 hingga S-3 akan lebih diuntungkan, karena bisa merancang program dengan penguasaan, keluasan dan kedalaman pengetahuan antar jenjang yang koheren;

7. Perubahan kurikulum MBKM yang dominan dalam pengajaran perlu juga disertai dengan perubahan kebijakan di bidang lain, seperti penelitian dan publikasi, agar hasil riset teoretis dan aplikatif mendapatkan penghargaan yang sama dalam publikasi. Ini penting, mempertimbangkan tuntutan jurnal bereputasi dan juga *homebase* dosen S-1, S-2, dan S-3 sebagai konsekuensi MBKM.

Penutup

Untuk kebutuhan Indonesia saat ini, keputusan Mendikbudristekdikti dengan orientasi

ISU PSIKOLOGI TERKINI

pembelajaran yang pada terapan sama sekali tidak keliru. Dikotomi ilmu praktis dan ilmu dasar juga bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan sebagaimana Pasteur's Quadrantnya Stokes (1997). Relasi keduanya bisa fleksibel sesuai kebutuhan konteks masing-masing. MBKM memberikan kesempatan kepada dunia Psikologi Indonesia untuk lebih merefleksikan posisi dan memikirkan arah pengembangan dirinya; tidak selalu didorong dengan standar negara mapan dengan dana riset besar. Selain konteks situasinya yang tidak selalu sama dengan Indonesia, orientasi keluar tidak jarang juga menutup mata Psikologi Indonesia akan berbagai peluang di sekeliling yang bisa dimanfaatkan untuk menguatkan jati dirinya.

Daftar Acuan

- Avital, G. (2019). Basic vs. applied psychology perspectives lead to different implications from the same data. Reevaluating the impact of prior expectations on polygraph outcomes. *Social Sciences and Humanities, Open 1*. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2019.100005>
- Bentley, P. J., Gulbrandsen, M., & Kyvik, S. (2015). The relationship between basic and applied research in universities. *High Educ* DOI 10.1007/s10734-015-9861-2
- Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. (2020). Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diakses pada 1 Desember 2020 dari <http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Buku-Panduan-Merdeka-Belajar-Kampus-Merdeka-2020>
- Drenth, P. J. D. (2008) Psychology: Is it applied enough? *Applied Psychology: An International Review*, 57(3), 524–540 doi: 10.1111/j.1464-0597.2008.00337.x
- Fachverband Psychologie für Arbeitssicherheit und Gesundheit e.V. (FV PASiG). Diunduh dari <http://www.fv-pasig.de/>
- Helton, W. S. & Kemp, S. (2010). What basic-applied issue is there? *Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society 54th Annual Meeting*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Diakses pada 1 Desember 2020 dari <https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Salinan%20PERMENDIKBUD%203%20TAHUN%202020%20FIX%20GAB.pdf>
- Stokes, D. E. (1997). *Pasteur's quadrant: Basic science and technological innovation*. Brookings Institution Press
- Tushman, M., & O'reilly III, C. (2007). Research and relevance: Implications of Pasteur's quadrant for doctoral programs and faculty development. *Academy of Management Journal*, 50(4), 769–774.
- Uni, FH oder Akademie? Diakses pada 1 Desember 2020 dari: <https://www.psychologie-studieren.de/infos/uni-fh-oder-akademie/>

“Program sarjana cenderung menjadi terapan di tiga semester terakhir. Fondasi menyangkut Ontologi (objek disiplin ilmu) dan Epistemologi (bagaimana kajian dilakukan) pada lima semester awal perlu dibangun dengan sangat kuat, agar mahasiswa memahami lingkup/ batas disiplin ilmunya, dan mampu mengomunikasikannya dengan baik kepada disiplin ilmu lain”.

ARTIKEL ILMIAH POPULER

“Penjara Psikologis” di Perguruan Tinggi dan Peran Penjaminan Mutu di Era Kampus Merdeka

Afred Suci

Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Riau

Fenomena “industrialisasi” pendidikan tinggi mengharuskan warga kampus terbiasa dengan rezim audit dan standarisasi mutu (Mulya, 2019), terlepas dari polemik rasa keadilan akibat penerapan “*one size for all*” yang menyamaratakan kemampuan kampus-kampus raksasa dengan “para kurcaci” di daerah-daerah terpencil. Tujuannya tentu baik – meskipun titik *start* antar perguruan tinggi berbeda-beda. Utamanya, jelas standarisasi mutu bermaksud untuk menjamin proses pembelajaran yang berkualitas sehingga lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi yang sejalan dengan kebutuhan industri. Pro dan kontra lumrah terjadi. Standarisasi mutu pendidikan tinggi – yang notabene dipikirkan dan dirumuskan oleh para pakar dari institusi raksasa dan sedikit banyak merujuk kepada standar mutu pendidikan tinggi internasional – menghadirkan kegamangan bagi perguruan tinggi kecil yang menjadi mayoritas di negeri ini. Kemampuan finansial, sarana prasarana, keterbatasan jumlah mahasiswa, serapan tenaga kerja, dan sebagainya, seringkali dituding sebagai hambatan perguruan tinggi dalam proses akreditasi. Mayoritas kampus kekurangan guru besar dan lektor kepala. Walaupun ada dosen yang bergelar S3, ironisnya tidak sedikit yang berkategori “*banana doctor*,” karena layaknya pohon pisang, publikasi bermutu yang dihasilkannya hanya sekali ketika dalam proses mendapatkan gelar doktornya tersebut. Kegiatan riset dan PKM dilakukan semata-mata untuk keperluan laporan BKD, sehingga luarannya kurang layak untuk dapat dipublikasikan di jurnal-jurnal bermutu atau layak paten, yang menjadi bagian dari penilaian *output* dan *outcome* penilaian mutu perguruan tinggi.

Akibatnya, manipulasi data untuk keperluan akreditasi menjadi jalan pintas. Saya tidak mengatakan mudah untuk menemukan formulasi mutu yang akurat dan adil. Bahkan sangat sulit, mengingat perbedaan geografis, sumber daya manusia, kemampuan finansial, disparitas kebijakan pusat dan daerah, dan banyak lagi faktor yang dapat memengaruhinya. Tak heran, ratusan perguruan tinggi ditutup oleh pemerintah dalam lima tahun terakhir ini karena alasan mutu. Beberapa kalangan menyambut baik penutupan ini, karena dari sisi kuantitas sebenarnya Indonesia dianggap “kelebihan” jumlah perguruan tinggi. Dengan penduduk 267 juta, Indonesia memiliki 4.670 perguruan tinggi – artinya, 1 kampus untuk sekitar 57 ribuan penduduk. Bandingkan dengan China, yang di tahun 2015 memiliki 2.845 kampus dan populasi hampir 1,4 miliar jiwa, memiliki rasio 1:482 ribu. Bahkan dengan Amerika Serikat, yang tahun 2017 berpopulasi 325 juta jiwa “hanya” memiliki 2.828 perguruan tinggi, dimana rasionya adalah 1:115 ribu jiwa. Ironisnya, proporsi penduduk bergelar sarjana kita jauh lebih rendah daripada China dan AS. Dominasi perguruan tinggi China dan AS menguasai 100 besar kampus bergengsi dunia. Maka, mungkin wajar jika kampus dilikuidasi jika tidak mampu bermain di frekuensi mutu yang sudah ditetapkan pemerintah. Tapi bagaimana jika yang ditutup itu adalah kampus-kampus kecil di daerah yang mungkin menjadi satu-satunya pilihan rasional dan ekonomis bagi penduduk lokal yang ingin mengenyam pendidikan tinggi? Apalagi distribusi lokasi perguruan tinggi di Indonesia sangat tidak seimbang. Enam provinsi di pulau Jawa (17,7% dari 34 provinsi) menguasai

ARTIKEL ILMIAH POPULER**"PENJARA PSIKOLOGIS" DI PERGURUAN TINGGI**

47,8% jumlah perguruan tinggi di Indonesia. Sungguh kondisi yang sangat dilematis – tidak saja terjadi di institusi pendidikan tinggi ilmu psikologi tapi juga relatif merata di bidang ilmu lainnya.

Kondisi densitas jumlah perguruan tinggi di Indonesia mungkin memiliki kesamaan dengan yang terjadi di Bangladesh, dimana dengan penduduk sekitar 160 juta pada tahun 2018, negara di Asia Selatan ini memiliki 3187 perguruan tinggi (Rahnuma, 2020), yang artinya terdapat 1 perguruan tinggi untuk setiap 50 ribuan penduduk. Sama seperti di Indonesia, bahwa lebih dari 90% perguruan tinggi di Bangladesh dikelola oleh swasta, namun harus mengikuti dan memenuhi prosedur dan indikator mutu akreditasi yang disusun oleh pemerintah. Dengan padatnya jumlah perguruan tinggi ini, maka problem penjaminan mutu dan implementasi budaya mutu di lingkup perguruan tinggi kedua negara ini relatif sama, khususnya dari aspek kerumitan birokrasi, lemahnya insentif mutu, dan kurangnya komitmen serta keterlibatan aktif dari sebagian besar staf (pendidik dan kependidikan) terhadap urgensi mutu di kampus.

Hambatan Psikologis Kampus Merdeka

Tantangan mutu pendidikan tinggi semakin berat sejak Presiden Joko Widodo mempercayakan seorang praktisi digital untuk mengurus sektor pendidikan negeri ini, yang diasumsikan terlalu berkutut dengan atmosfer teoretis dan miskin praktik. Maka menggemalah gagasan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, yang dilegitimasi melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Apa lagi ini? Belum selesai satu siklus kurikulum berbasis KKNI yang menggantikan sistem KBK, sekarang perguruan tinggi sudah harus disibukkan dengan perubahan ke kurikulum Kampus Merdeka. Jangan heran ketika cukup banyak guru besar dan dosen enggan mengikuti program ambisius Mendikbudristekdikti ini dan meyakini bahwa program ini akan berhenti seiring dengan berakhirnya kabinet di tahun 2024. Secara psikologis, *mindset* ini berkembang di kalangan perguruan tinggi. Terkait hal ini, menarik apa yang dikaji oleh Zulfikar (2020), yang menemukan fakta empiris bahwa dari 610 dosen partisipan survei, mayoritas meragukan kemampuan kampusnya

masing-masing untuk mengimplementasikan program Kampus Merdeka, terlepas dari sikap mereka yang cukup positif pada program tersebut.

Gagasan Kampus Merdeka sebenarnya sudah cukup lama dipraktikkan di negara-negara maju yang relatif mapan pendidikan tingginya. Saya pribadi juga mengalami program belajar lintas program studi dan universitas di salah satu kampus negeri terbaik di Taiwan. Dampaknya cukup positif untuk memperkaya wawasan keilmuan mahasiswa, terlebih lagi di era saat ini yang mengarah kepada implementasi multidisiplin ilmu. Kurikulum Kampus Merdeka jelas memperkuat implementasi KKNI, dimana *link and match* antara perguruan tinggi dengan kebutuhan industri dan masyarakat akan semakin kokoh. Permasalahannya, siapkah kita dari sisi kompetensi dan psikologis dengan perubahan yang sedemikian cepat ini? Banyak yang siap, tetapi jangan pula kita menutup mata terhadap sebagian lain yang tidak – bahkan banyak yang menganggapnya sebagai ancaman, khususnya terhadap zona nyaman yang selama ini dirasakan. Dalam ilmu psikologi perubahan, secara sederhana digambarkan bahwa ketika individu merasakan ancaman yang tidak dapat dikendalikannya, maka dia berpotensi bertindak defensif yang berujung kepada resistensi terhadap perubahan tersebut (Cohen & Sherman, 2014).

“Dengan padatnya jumlah perguruan tinggi ini, maka problem penjaminan mutu dan implementasi budaya mutu di lingkup perguruan tinggi kedua negara ini relatif sama, khususnya dari aspek kerumitan birokrasi, lemahnya insentif mutu, dan kurangnya komitmen serta keterlibatan aktif dari sebagian besar staf (pendidik dan kependidikan)”.

ARTIKEL ILMIAH POPULER**"PENJARA PSIKOLOGIS" DI PERGURUAN TINGGI**

Cukup banyak dosen yang khawatir kehilangan mata kuliah akibat adanya hak mahasiswa untuk berkegiatan di luar prodi (20 sks) dan kampus (40 sks), atau sekitar 40% dari rata-rata 145 sks. Padahal potensi kehilangan ini sesungguhnya relatif kecil, karena dua sebab. Pertama, karena sifatnya hak, maka dapat dipastikan akan ada – entah sebagian kecil atau besar – yang tetap akan mengambil mata kuliah tersebut. Kedua, pembelajaran lintas prodi memungkinkan mahasiswa dari prodi lain untuk mengambil mata kuliah tersebut. Namun begitu, saya pribadi memaklumi kekhawatiran ini karena cukup banyak dosen dan pimpinan kampus yang belum memahami substansi dari kurikulum Kampus Merdeka ini. Saya pribadi melihat kecemasan psikologis yang sama pada saat konversi kurikulum KBK ke KKNI, di mana beberapa kampus melakukan rasionalisasi jumlah mata kuliah agar lebih relevan dengan profil lulusan dan akselerasi masa studi. Zona nyaman di mata kuliah tertentu yang selama ini melekat – terutama jika berurusan dengan senioritas – memang cukup sensitif jika diusik.

Hambatan lain terkait dengan kompetensi dosen dan kemampuan kampus itu sendiri. Kampus Merdeka mewajibkan perguruan tinggi membuka komunikasi eksternal, bernegosiasi dan bekerjasama dengan dunia luar – tidak sebatas penandatanganan MoU yang berakhir dalam kebiasuannya di lemari arsip tanpa realisasi, meskipun ajaibnya, bisa muncul sebagai bukti prestasi pada saat akreditasi. Minimal ada 8 jenis kegiatan luar kampus yang dapat dipilih oleh mahasiswa di kurikulum Kampus Merdeka, yaitu (1) magang/praktik kerja; (2) proyek di desa; (3) mengajar di sekolah; (4) pertukaran pelajar; (5) penelitian/riset; (6) kegiatan wirausaha; (7) studi/proyek independent; dan (8) proyek kemanusiaan. Sayangnya, banyak pimpinan struktural perguruan tinggi tidak memiliki kemampuan ini. Tak jarang muncul sinisme di kalangan akademisi, di daerah khususnya, bahwa banyak pimpinan kampus, baik di level fakultas hingga universitas, hanya “jago kandang”. Tentunya, jika para pimpinannya dipandang seperti itu, pasti akan sulit memotivasi dan memberi keyakinan kepada para dosen bahwa mereka mampu melaksanakan perannya di program Kampus Merdeka. Sangat perlu menumbuhkan kepercayaan

terhadap kapasitas pimpinan di lingkup perguruan tinggi, agar para dosen berkomitmen untuk aktif membantu dan mencegah munculnya *silence behavior* (Abdillah et al. 2020), khususnya terkait partisipasi seluruh dosen dalam program Kampus Merdeka.

Belum lagi bicara tentang keterbatasan industri dan organisasi di masyarakat yang dapat menjadi mitra bagi perguruan tinggi, khususnya yang ada di daerah. Tidak saja untuk menyerap para mahasiswa untuk belajar di sana, tetapi juga memikirkan bagaimana memenuhi hak para mahasiswa tersebut di tempat mereka, seperti transportasi, konsumsi dan honor mereka selama berkegiatan. Maka wajar jika banyak dosen dan pimpinan perguruan tinggi yang mengalami tekanan psikologis cukup berat berupa perasaan inferior, ketidakmampuan, bahkan apatis, dengan adanya perubahan ini.

Peran Penjaminan Mutu

Sebagaimana fungsinya, unit penjaminan mutu adalah pihak yang pertama kali harus berhadapan dengan seluruh usulan program, baik yang telah ada maupun yang baru, seperti program Kampus Merdeka. Alasannya jelas karena unit ini merupakan organ elit perguruan tinggi yang bertugas menyusun panduan mutu setiap program, mengawasi jalannya program mutu, dan sekaligus mengevaluasinya.

“Tak jarang muncul sinisme di kalangan akademisi, di daerah khususnya, bahwa banyak pimpinan kampus, baik di level fakultas hingga universitas, hanya “jago kandang”. Jika para pimpinannya dipandang seperti itu, pasti akan sulit memotivasi dan memberi keyakinan kepada para dosen bahwa mereka mampu melaksanakan perannya di program Kampus Merdeka”.

ARTIKEL ILMIAH POPULER

"PENJARA PSIKOLOGIS" DI PERGURUAN TINGGI

Tidak seperti unit-unit kerja lain yang hanya bertanggung jawab di bidangnya masing-masing, unit penjaminan mutu, sebaliknya, bekerja lintas sektoral. Artinya dimensi tugas penjaminan mutu melekat di setiap unit kerja di perguruan tinggi. Boleh dikatakan bahwa unit penjaminan mutu adalah polisi mutu di seluruh unit perguruan tinggi.

Masalah utama terletak pada pelaksanaannya. Layaknya praktik kolegialisme di perguruan tinggi, maka hampir seluruh jabatan struktural diserahkan kepada dosen, termasuk pejabat penjaminan mutu. Setidaknya ada dua alasan yang melandasinya. Pertama, alasan keuangan yang tidak memungkinkan membayar profesional non-dosen. Kedua, *mindset* bahwa hanya dosen yang memahami proses kerja di lingkup perguruan tinggi. Mungkin ada benarnya, meskipun dari aspek manajerial, profesionalitas, dan independensi, sesungguhnya pemberdayaan dosen menjadi polisi mutu sangat rentan menjadi formalitas organisasi belaka. Spektrum tugas penjaminan mutu mencakup dua dimensi, yakni pendekatan objek (perencanaan, proses dan luaran mutu) dan subjek (pelaku mutu).



Spektrum pertama menuntut kompetensi manajerial, mencakup sedikitnya kemampuan perencanaan, pengorganisasian, penerapan dan pengawasan. Mungkin saja bagi program studi manajemen atau administrasi, kompetensi ini sudah dimiliki karena memang merupakan fondasi dari bidang ilmu mereka (meskipun tidak sedikit dosen yang hanya paham konsep namun tak mampu mengaktualisasikannya karena tidak berpengalaman dalam organisasi praktis). Tetapi bagaimana dengan fakultas atau prodi lain? Tuntutan kedua adalah penguasaan mutu itu sendiri. *Quality assurance* adalah cabang ilmu tersendiri yang membutuhkan waktu, biaya dan upaya untuk menguasainya. Spektrum kedua adalah kemampuan mengelola manusia sebagai pelaku mutu. Dalam spektrum ini, minimal dua *skill* yang harus dikuasai polisi mutu perguruan tinggi: komunikasi dan psikologi organisasi. Lagi-lagi, kedua *skill* ini adalah cabang ilmu tersendiri yang tidak mudah untuk dikuasai. Bahkan saya pribadi akan menomorsatukan dimensi subjek ini mengingat *output* mutu tidak akan efektif jika *input* para pelaku mutunya rendah.

Meskipun kampus-kampus di Eropa sudah memulai sistem *hybrid* antara kolegialisme dan manajerial (Sahlin & Eriksson-Zetterquist, 2016), namun di Indonesia, hampir 100% masih didominasi oleh kolegialisme. Praktik ini "mengharuskan" unsur pimpinan kampus dirangkap oleh para dosen yang notabene sudah disibukkan dengan tridharma, administrasi, banyak yang tidak memiliki kecakapan manajerial dan komunikasi, serta mungkin saja memiliki pekerjaan sampingan untuk membayar aneka cicilan yang tidak dapat ditanggulangi oleh pendapatannya sebagai dosen. Beberapa posisi struktural, mulai dari rektor hingga ketua jurusan/prodi, memang mendapatkan keringanan tridharma dalam BKD. Faktanya, dengan alasan ekonomi, masih ada pejabat yang tetap ingin banyak kelas mengajar, bimbingan, dan aneka kepanitiaan. Demi tambahan honor, karena tunjangan jabatan struktural yang (dianggap) memprihatinkan. Konsekuensinya, luaran tugas yang bermutu menjadi sesuatu yang sangat sulit diraih. Tidak salah jika muncul stigma dari sebagian dosen bahwa alih-alih menjadi manajer yang seharusnya visioner, inovatif dan cakap mengembangkan kampus, banyak pimpinan struktural kampus justru terjebak

ARTIKEL ILMIAH POPULER

"PENJARA PSIKOLOGIS" DI PERGURUAN TINGGI

menjadi sekadar petugas administrasi – jauh dari siap menyongsong Kampus Merdeka.

Pemberdayaan dosen sebagai polisi mutu juga dilatarbelakangi oleh alasan keamanan psikologis bagi pimpinan struktural. Apalagi dengan sistem politik dan rezim *ex-officio* di pemerintahan kampus yang kental dengan aroma transaksional kekuasaan, rekrutmen pejabat yang didominasi kedekatan kepentingan daripada pertimbangan kompetensi, serta kaburnya sistem *check and balances* akibat pimpinan struktural sekaligus menjadi unsur pengawas dalam organ senat (Suci et al., 2020). Saya menganalogikan layaknya presiden dan para menteri merangkap sebagai ketua dan anggota DPR. Dengan kondisi demikian, maka potensi pelanggaran mutu – sengaja atau tidak – tentu sangat besar. Adanya polisi mutu yang merupakan dosen di prodi atau fakultas yang sama, setidaknya bisa memberikan rasa aman. Meskipun secara struktural unit penjaminan mutu seharusnya independen karena cakupan pengawasannya sangat luas hingga ke dekan atau rektor, namun karena dia juga merupakan dosen prodi/fakultas, maka tentu sangat sulit melepaskan diri (meskipun ada yang bisa) dari konflik kepentingan hubungan “atasan-bawahan.” Alhasil, banyak auditor mutu yang tidak berani membuka secara jujur hasil audit mutunya karena sejumlah kecemasan psikologis yang dialami akibat dilema kepentingan ini (Suci, 2017). Maka untuk menghindari stigma formalitas pada unit penjaminan mutu, perlu dipertimbangkan opsi yang *out of the box* dari yang selama ini dipraktikkan.

Dari uraian di atas telah tergambar jelas bahwa pejabat penjaminan mutu membutuhkan kemampuan super karena dimensi tugasnya yang lintas sektoral. *Skill* manajerial, psikologi organisasi, dan *quality assurance*, yang didukung dengan independensi, akan sangat sulit dirangkap oleh seorang dosen, khususnya di era Kampus Merdeka ini. Beban pekerjaan dosen yang sudah terlalu berat akan sulit untuk menguasai *skill* penjaminan mutu sehingga bisa mengganggu kinerjanya (LePine et al., 2005). Mengingat pentingnya aspek mutu, wacana penggunaan profesional eksternal non-dosen yang langsung dikomandoi oleh rektor/direktur/penjaminan mutu di tingkat universitas, atau (jika memungkinkan) oleh yayasan dan

“Praktik ini “mengharuskan” unsur pimpinan kampus dirangkap oleh para dosen yang notabene sudah disibukkan dengan tridharma, administrasi, banyak yang tidak memiliki kecakapan manajerial dan komunikasi, serta mungkin saja memiliki pekerjaan sampingan untuk membayar aneka cicilan yang tidak dapat ditanggulangi oleh pendapatannya sebagai dosen”.

unsur masyarakat, perlu dipertimbangkan demi terciptanya *good university governance*. Idealnya, profesional eksternal akan lebih mudah beradaptasi dan mengenali elemen dan proses kerja di kampus daripada “memaksakan” dosen untuk menjadi ahli dalam bidang mutu, psikologi organisasi dan manajerial. Pemosisiannya yang dilepaskan dari struktur fakultas/prodi, akan lebih menjamin independensi dan profesionalitas penjaminan mutu, mengingat bahwa sejatinya fakultas/prodi adalah motor penggerak perguruan tinggi.

Pejabat penjaminan mutu, baik dengan kapasitasnya sendiri maupun dengan bantuan pihak *intermediary* (seperti lembaga bimbingan dan konseling) yang menguasai konsep psikologi sumber daya manusia dan organisasi, perlu memberikan penekanan pada aspek subjek mutu, yakni para pimpinan dan dosen dalam menghadapi era baru Kampus Merdeka. Implementasi budaya mutu sangat membutuhkan motivasi dan keterlibatan dari para pelaku di perguruan tinggi, dimana menurut Rahnema (2020), hal ini hanya dapat dicapai dengan adanya akuntabilitas tata kelola, rasa memiliki, dan komunikasi yang efektif – tidak cukup hanya sekadar menjalankan apa yang diperintahkan dan terbatas pada tugas-tugas administrasi belaka. Perubahan ekstrim yang mungkin terjadi dari penerapan kurikulum Kampus Merdeka, jangan sampai mengakibatkan penurunan moral, meningkatkan perasaan inferioritas, dan *powerlessness* (Troudi & Alwan, 2010) pada warga kampus akibat merasa termarjinalkan secara

ARTIKEL ILMIAH POPULER

"PENJARA PSIKOLOGIS" DI PERGURUAN TINGGI

kompetensi dan sumber daya. Tak cukup sekadar kompetensi, perlu penilaian dan pemetaan kesiapan psikologis warga kampus untuk menghadapi perubahan di era Kampus Merdeka. Maka peran penjaminan mutu adalah memotivasi keterlibatan seluruh dosen dan pimpinan, menumbuhkan efikasi diri dan *mindset* baru bahwa mereka mampu dan memiliki kendali atas perubahan ini, sehingga dampak psikologis negatif akibat perubahan kurikulum Kampus Merdeka dapat diantisipasi.

Daftar Acuan

- Abdillah, M. R., Anita, R., Hadiyati, & Zakaria, N. B. (2020). Trust in leaders and employee silence behavior: Evidence from higher education institutions in Indonesia. *Human System Management*, 1-14. DOI:10.3233/HSM-190797
- Cohen, G. L., & Sherman, D. K. (2014). The psychology of change: Self-affirmation and social psychological intervention. *Annual Review of Psychology*, 65, 333-371.
- LePine, J. A., Podsakoff, N. P., & LePine, M. A. (2005). A meta-analytic test of the challenge stressor-hindrance stressor framework: An explanation for inconsistent relationship among stressor and performance. *Academy of Management Journal*, 48, 764-777.
- Mulya, T. W. (2019). Pendidikan psikologi nan neoliberal. *Psikologi Indonesia*, 1(1), 33-38.
- Rahnuma, N. (2020). Evolution of culture in an HEI: Critical insights from university staff in Bangladesh. *Educational Assessment, Evaluation and Accountability*, 32, 53-81.
- Sahlin, K., & Eriksson-Zetterquist, U. (2016). Collegiality in modern universities – the composition of governance ideals and practices. *Nordic Journal of Studies in Educational Policy*, 2, 1-10.
- Suci, A. (2017). Penjaminan mutu perguruan tinggi: Dilema politik organisasi dan urgensi penggunaan professional eksternal. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 3(2), 215-222.
- Suci, A., Maryanti, S., Van FC., L. L., & Yandra, A. (2020). Dilemma ex-officio terkait pencegahan korupsi dan penjaminan mutu di perguruan tinggi swasta. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 6(1), 1-14.
- Troudi, S., & Alwan, F. (2010). Teacher's feelings during curriculum change in the United Arab Emirates: Opening Pandora's box. *Teacher Development: An International Journal of Teachers' Professional Development*, 14(1), 107-121.
- Zulfikar, R. (2020). Perception, level of trust and behaviors of Indonesian lectures in responding "Kampus Merdeka" policy. Diakses dari <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/863/>

"Apalagi dengan sistem politik dan rezim *ex-officio* di pemerintahan kampus yang kental dengan aroma transaksional kekuasaan, rekrutmen pejabat yang didominasi kedekatan kepentingan daripada pertimbangan kompetensi, serta kaburnya sistem *check and balances* akibat pimpinan struktural sekaligus menjadi unsur pengawas dalam organ senat".

Menciptakan Magang yang Bermakna untuk Mahasiswa S1 Psikologi Indonesia: Pekerjaan Rumah bagi Perguruan Tinggi dan Pendidik

Jenny Lukito Setiawan & Jessie Janny Thenarianto
Fakultas Psikologi Universitas Ciputra Surabaya

Pendahuluan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 (pasal 18) mencantumkan bahwa perguruan tinggi harus memfasilitasi hak mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran di perguruan tinggi yang berbeda dan/atau pembelajaran di luar perguruan tinggi, paling lama 2 semester atau setara dengan 40 satuan kredit semester (sks). Permendikbud juga mencantumkan bahwa salah satu bentuk pembelajaran adalah magang. Dengan demikian magang adalah salah satu bentuk pembelajaran yang dapat diikuti mahasiswa untuk mengisi 40 sks kesempatan belajar di luar perguruan tinggi (PT).

Pentingnya magang sudah tidak diragukan lagi. Magang dapat menolong mahasiswa menemukan pilihan kariernya, sehingga akan memperpendek masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama, meningkatkan kepuasan kerja, dan meningkatkan gaji pertama (Jung & Lee, 2017). Magang juga memberikan efek positif terhadap performa kerja lulusan (Yaakob et al., 2018), serta mengembangkan kualitas pribadi maupun profesionalisme mahasiswa (Rosyidah et al., 2020). Simons et al. (2012) dalam penelitiannya pada

mahasiswa psikologi mendapati bahwa magang meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengaitkan praktik lapangan dengan teori-teori psikologi.

Magang tidak hanya memberi manfaat bagi mahasiswa, namun juga bagi institusi tempat magang (selanjutnya disebut institusi magang) dan PT (Yaakob et al., 2018). Magang menolong institusi magang dalam menemukan calon-calon karyawan unggul, mendapatkan solusi tenaga kerja yang diperlukan untuk proyek-proyek insidental (Mihail, 2006), meningkatkan *branding* perusahaan, dan mendapatkan ide-ide segar. Magang juga memberi kesempatan bagi PT untuk memenuhi kebutuhan *experiential learning* mahasiswa; meningkatkan reputasi PT dengan penyerapan lulusan di dunia kerja; serta meningkatkan ketertarikan calon mahasiswa bergabung pada PT yang bersangkutan (Maertz et al., 2014). Dikatakan oleh Maertz et al. bahwa magang relevan untuk berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam mayoritas disiplin ilmu.

Sekalipun demikian bukan berarti magang yang selama ini dijalani mahasiswa S1 di Indonesia,

ISU PSIKOLOGI TERKINI**MENCIPTAKAN MAGANG YANG BERMAKNA**

khususnya mahasiswa program studi (prodi) S1 Psikologi, telah berjalan optimal dan memberikan manfaat positif bagi mahasiswa. Masih ada persoalan-persoalan di lapangan yang menghambat mahasiswa dalam memperoleh manfaat maksimal dari kegiatan magang. Tulisan ini memuat hasil eksplorasi penulis kepada berbagai pemangku kepentingan magang, guna menemukan persoalan yang ada di lapangan dan identifikasi hal-hal yang perlu dilakukan untuk memberikan manfaat yang lebih optimal. Penulis melakukan survei *online* terhadap 100 orang mahasiswa/alumni S1 Psikologi angkatan 2013-2017. Penulis juga melakukan wawancara terhadap 8 alumni S1 Psikologi dari angkatan 2013-2017, 5 orang perwakilan institusi magang, 1 orang dosen pembimbing magang, serta eksplorasi kurikulum melalui *website* prodi-prodi S1 Psikologi yang berstatus akreditasi A. Dalam tulisan ini magang didefinisikan sebagai pengalaman kerja terstruktur dan relevan dengan aspirasi karier mahasiswa yang dijalani sebelum kelulusan studi.

Apa saja yang menjadi persoalan di lapangan?

1. Durasi magang yang belum memberi kesempatan belajar yang signifikan Berdasarkan informasi yang berhasil ditemukan penulis dari situs prodi S1 Psikologi terakreditasi A, mayoritas bobot magang berkisar 2-3 sks. Apabila dikonversi¹ menjadi durasi bulan, maka magang hanya dilakukan kurang dari satu bulan. Hasil survei menunjukkan bahwa 64,8% dari mereka yang pernah magang menjalaninya selama kurang dari 1 bulan sampai dengan dua bulan. Hanya 23,9% yang berdurasi tiga bulan. Sangat sedikit yang melakukannya di atas tiga bulan. Dalam wawancara, mahasiswa dan alumni merasa bahwa durasi magang mereka terlalu pendek dan mengharapkan durasi 3-6 bulan

1. Satu sks setara dengan 170 menit kegiatan per minggu, dan 1 semester terdiri atas 16 minggu, sehingga total durasi untuk 1 sks adalah sekitar 45 jam. Dengan asumsi mahasiswa melakukan magang penuh waktu (1 bulan sama dengan 21 hari kerja dengan 8 jam/hari), maka 1 sks setara dengan magang penuh waktu selama 0,27 bulan.

untuk pembelajaran yang lebih baik.

Mahasiswa tidak akan memperoleh pengalaman belajar yang kaya dan mendalam apabila durasi magang terlalu pendek. Perwakilan institusi magang menyatakan bahwa durasi magang yang pendek tidak memungkinkan mahasiswa mengerjakan suatu proyek. Pekerjaan yang masih memungkinkan adalah tugas-tugas administratif, pendek, dan tidak esensial. Mayoritas berpendapat bahwa durasi magang yang ideal adalah tiga hingga enam bulan. Hal ini konsisten dengan temuan Rosyidah et al. (2020) bahwa institusi magang mengharapkan durasi magang setidaknya tiga bulan.

2. Kesulitan mendapatkan tempat magang Hasil survei menunjukkan bahwa tiga persoalan utama dalam upaya memperoleh tempat magang adalah kurangnya informasi mengenai institusi magang (47,9%), menghadapi wawancara seleksi (19,7%), dan menghadapi tes seleksi (15,5%). Di sisi lain, perwakilan institusi magang mengungkapkan bahwa kegagalan mahasiswa dalam seleksi magang sering disebabkan oleh kurangnya ketertarikan dan minat belajar yang tulus, kurangnya pengenalan kemampuan dan minat diri, kurangnya keluwesan berkomunikasi/berelasi, terlalu berorientasi pada uang dan lokasi magang, serta padatnya jadwal kuliah. Temuan ini menunjukkan pentingnya dukungan bagi mahasiswa untuk menemukan potensi dan minat diri, serta penjelasan mengenai manfaat magang guna menumbuhkan motivasi intrinsik mahasiswa. Penyediaan informasi tempat magang yang relevan dengan minat karier mahasiswa, peningkatan keterampilan komunikasi, serta pembekalan cara menghadapi seleksi magang sangat diperlukan.
3. Penugasan magang yang kurang menantang Kurangnya pekerjaan untuk dilakukan serta

ISU PSIKOLOGI TERKINI

tugas yang kurang menantang menjadi dua keluhan terbesar mahasiswa dalam survei. Sejumlah 46,5% mahasiswa menyebutkan bahwa mereka sering menganggur dan sejumlah 31% mahasiswa mengeluh mendapat pekerjaan yang sangat sederhana, misalnya fotokopi dan tugas administratif. Studi terdahulu juga menyatakan bahwa isu ini juga merupakan salah satu masalah yang kerap dialami mahasiswa magang (Maertz et al., 2014). Kondisi ini cukup memprihatinkan mengingat kegiatan magang diadakan dengan harapan mahasiswa dapat memperoleh pengalaman kerja dan melatih keterampilan-keterampilan yang berguna di dunia kerja.

Terkait hal itu, wawancara kepada sejumlah perwakilan institusi magang menemukan adanya keragaman institusi dalam mempersiapkan proyek magang. Ada institusi yang secara khusus mempersiapkan proyek magang. Ada juga institusi yang tidak melakukan upaya khusus untuk itu, sehingga magang berlalu tanpa penugasan yang berarti.



Jenny Lukito Setiawan

MENCIPTAKAN MAGANG YANG BERMAKNA

Selain karena durasi magang yang pendek, kurangnya pemahaman mengenai esensi keilmuan psikologi serta kompetensi terkait diduga juga membuat institusi magang kesulitan dalam memberikan tugas yang relevan dan menantang. Oleh karena itu, koordinasi intensif antara prodi dan institusi magang dalam perancangan proses magang sangat penting.

4. Proses pendampingan/bimbingan terhadap mahasiswa magang yang kurang optimal
Hasil survei menemukan bahwa 28,2% responden yang pernah magang merasa kurang mendapatkan bimbingan dari personel di tempat magang. Keluhan sejenis juga muncul dalam wawancara terhadap alumni yang menyatakan bahwa ada supervisor yang hanya melakukan peran administratif seperti pelaporan kehadiran mahasiswa. Padahal supervisor yang dapat membimbing mahasiswa dan mendorong pemikiran yang inovatif sangat diperlukan untuk meningkatkan performa mahasiswa dan kepuasan terhadap program magang (Bhattacharya & Neelam, 2018; Lam & Ching, 2007). Di sisi lain, hasil wawancara dengan pihak institusi magang juga menunjukkan perlunya keterlibatan dosen dalam memberikan bimbingan. Dosen

“Mahasiswa tidak akan memperoleh pengalaman belajar yang kaya dan mendalam apabila durasi magang terlalu pendek. Perwakilan institusi magang menyatakan bahwa durasi magang yang pendek tidak memungkinkan mahasiswa mengerjakan suatu proyek. Pekerjaan yang masih memungkinkan adalah tugas-tugas administratif, pendek, dan tidak esensial”.

ISU PSIKOLOGI TERKINI**MENCIPTAKAN MAGANG YANG BERMAKNA**

dapat memberikan perspektif lain berdasarkan *expertise* keilmuan maupun pengalaman yang dimiliki, untuk melengkapi bimbingan dari supervisor/mentor di lapangan.

5. Kompetensi teknis, sikap profesional, dan kesiapan mental mahasiswa yang kurang. Pihak institusi magang juga mengeluhkan kurangnya kompetensi teknis, sikap profesional, dan kesiapan mental mahasiswa dalam mengikuti magang. Beberapa contoh masalah terkait profesionalisme dan kesiapan mental adalah ketidakdisiplinan dalam kehadiran dan *deadline*, kurangnya keseriusan dalam bekerja, serta kurangnya fleksibilitas menghadapi tantangan baru. Kondisi di atas menunjukkan masih banyaknya hal yang perlu dilakukan PT agar mahasiswa lebih siap bekerja, baik secara sikap maupun keterampilan teknis.

Apa PR yang masih perlu dikerjakan?

1. Penataan ulang kurikulum dan sks magang. Untuk memberikan pengalaman magang yang berarti, PT perlu merancang kurikulum yang memberi ruang bagi mahasiswa untuk mengikuti magang dengan durasi yang memadai. Durasi magang minimal selama satu semester penuh (*full-time*) akan memberikan kesempatan dan keleluasaan bagi PT dan institusi magang untuk merancang proyek yang bermakna.
2. Kolaborasi perancangan magang antara PT dan institusi magang. Hal yang sangat penting dilakukan pihak PT adalah perancangan magang yang dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa dan institusi magang, sekaligus memastikan tercapainya tujuan pembelajaran (Maertz et al., 2014). PT perlu bersinergi dengan institusi magang dalam merancang proyek magang yang bermakna dan bermanfaat bagi karier dan pengembangan diri

mahasiswa (Yaakob et al., 2018), yang sekaligus juga memenuhi kebutuhan institusi magang. Perancangan ini akan memberikan tujuan dan target yang jelas bagi mahasiswa dalam pelaksanaan magang.

Untuk proses belajar yang optimal, dosen pembimbing, mentor, dan mahasiswa perlu melakukan negosiasi untuk membuat kontrak belajar (*learning contract*). *Learning contract* memuat empat komponen penting, yaitu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai selama magang (*learning goals*), aktivitas magang yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut (*activities to reach the goals*), asesmen hasil belajar mahasiswa (*assessment measures*), dan rancangan bimbingan (*supervision plan*; Sweitzer & King, 2014).

3. Panduan perancangan magang bagi institusi magang. Adakalanya institusi penyedia tempat magang tidak memahami hal-hal yang harus dipersiapkan untuk menciptakan pengalaman magang yang signifikan bagi mahasiswa serta mendatangkan manfaat bagi institusi magang. Karena itu PT perlu membekali institusi magang dengan informasi yang jelas mengenai (1) cara institusi mendapatkan manfaat dari magang mahasiswa, (2) cara menawarkan

“Kegagalan mahasiswa dalam seleksi magang sering disebabkan oleh kurangnya ketertarikan dan minat belajar yang tulus, kurangnya pengenalan kemampuan dan minat diri, kurangnya kelincahan berkomunikasi/berelasi, terlalu berorientasi pada uang dan lokasi magang, serta padatnyajadwal kuliah”.

ISU PSIKOLOGI TERKINI**MENCIPTAKAN MAGANG YANG BERMAKNA**

kesempatan magang dan hal-hal yang perlu dipersiapkan, (3) cara pelibatan mahasiswa dalam keseharian institusi untuk proses belajar mahasiswa, (4) proses bimbingan/supervisi yang diberikan, (5) perancangan program magang, (6) cara pembuatan tujuan pembelajaran (*learning goals*) bagi mahasiswa.

4. Penyediaan dan kolaborasi pembimbing magang dari PT dan mentor dari institusi magang
Pihak PT perlu menyediakan pembimbing magang, idealnya yang memiliki kompetensi yang relevan dengan bidang magang mahasiswa. Selain itu, institusi magang perlu menyediakan mentor untuk membimbing mahasiswa dalam praktik nyata di lapangan. Koordinasi dan kolaborasi antara dosen pembimbing magang dan mentor dari institusi magang sangat diperlukan, sehingga mahasiswa mampu memadukan kemampuan akademik dan teoretis dengan pengalaman praktik di lapangan. Hal ini akan memberi pengalaman belajar yang sangat kaya, bukan hanya bagi mahasiswa, tetapi juga bagi dosen dan mentor.

Untuk proses bimbingan yang optimal, maka PT perlu membantu mahasiswa membuat rencana bimbingan. Rencana tersebut memberi gambaran jelas bagi setiap pihak yang terlibat mengenai proses bimbingan yang akan dilakukan, orang-orang yang terlibat dalam proses bimbingan dan peran masing-masing,

“Sejumlah 46,5% mahasiswa menyebutkan bahwa mereka sering menganggur dan sejumlah 31% mahasiswa mengeluh mendapat pekerjaan yang sangat sederhana, misalnya fotokopi dan tugas administratif”.

cakupan bimbingan, tempat, dan jadwal bimbingan secara rutin (Sweitzer & King, 2014). Hal ini akan memperjelas ekspektasi dari tiap pihak yang terlibat dalam proses magang sebelum magang dimulai, untuk menghindari kekecewaan pihak-pihak yang terlibat.

5. Program pengenalan potensi dan minat karier PT perlu menyiapkan program-program pengenalan potensi dan minat karier mahasiswa. Program ini perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, misalnya dalam bentuk program *mentoring* dengan dosen pembimbing akademik bekerja sama dengan pusat karier. Penemuan potensi dan minat karier ini akan menolong mahasiswa dalam memilih tempat magang sebagai batu uji pemilihan minat karier sekaligus ajang berlatih kerja sebelum lulus.
6. Pengondisian sikap dan gaya kerja profesional dan persiapan teknis aplikasi magang
Keluhan institusi magang banyak menyangkut



Jessie Janny Thenarianto

ISU PSIKOLOGI TERKINI

MENCIPTAKAN MAGANG YANG BERMAKNA

sikap dan profesionalisme mahasiswa. Karena itu PT perlu menemukan cara mengondisikan sikap dan gaya kerja profesional, termasuk di dalamnya tata cara berpakaian, cara berkomunikasi secara lisan dan tertulis, dan cara membangun relasi profesional. Selain itu, PT perlu memfasilitasi mahasiswa dalam melakukan persiapan teknis aplikasi magang seperti cara membuat lamaran dan *curriculum vitae* yang sesuai dengan institusi yang dituju, cara mengikuti wawancara seleksi, serta persiapan-persiapan terkait seleksi magang lainnya.

Simpulan

Ada banyak peluang manfaat yang dapat diperoleh mahasiswa, institusi magang, dan PT dari kegiatan magang, namun masih terdapat persoalan-persoalan di lapangan yang memerlukan tindak lanjut. Tindak lanjut terkait kurikulum, kolaborasi dengan pihak institusi magang mengenai perancangan program magang, *learning goals*, dan proses bimbingan, sangat diperlukan untuk membuat proses magang menjadi bermakna dan bermanfaat bagi mahasiswa.

Acknowledgements

Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan mahasiswa, alumni, dosen pembimbing magang, dan wakil institusi magang yang telah memberikan pendapat dan masukan lewat survei atau wawancara. Secara khusus terima kasih untuk Amanda Teonata, S.Psi. yang telah mendukung dalam proses pengumpulan dan tabulasi data.

Daftar Acuan

- Bhattacharya, S., & Neelam, N. (2018). Perceived value of internship experience: a try before you leap. *Higher Education, Skills and Work-Based Learning*, 8(4), 376-394. <https://doi.org/10.1108/HESWBL-07-2017-0044>
- Jung, J., & Lee, S. J. (2017). Impact of Internship on Job Performance among University Graduates in South Korea. *International Journal of Chinese Education*, 5(2), 250-284. <https://doi.org/10.1163/22125868-12340070>
- Lam, T., & Ching, L. (2007). An exploratory study of an internship program: The case of Hong Kong students. *International Journal of Hospitality Management*, 26(2), 336-351. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2006.01.001>
- Mihail, D. M. (2006). Internships at Greek universities: An exploratory study. *Journal of Workplace Learning*, 18(1), 28-41. <https://doi.org/10.1108/13665620610641292>
- Maertz, C. P., Stoeberl, P. A., & Marks, J. (2014). Building successful internships: Lessons from the research for interns, schools, and employers. *Career Development International*, 19(1), 123-142. <https://doi.org/10.1108/CDI-03-2013-0025>
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Rosyidah, R., Widiati, U., Sutrisno, A. A., Fauzi, A., Subagyo, K. P., & Nurhidayati, N. (2020). Job satisfaction and performance: A survey study on internship students of Universitas Negeri Malang. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 10(1), 93-102. <https://doi.org/10.21831/jpv.v10i1.29874>
- Simons, L., Fehr, L., Blank, N., Connell, H., Georganas, D., Fernandez, D., & Peterson, V. (2012). Lessons learned from experiential learning: What do students learn from a practicum/internship? *International Journal of Teaching and Learning in Higher Education*, 24(3), 325-334.
- Sweitzer, H. F., & King, M. A. (2014). *The successful internship: Personal, professional, and civic development in experiential learning* (4th ed.). Brooks/Cole.
- Yaakob, H., Ail, K. M., & Radzi, N. F. (2018). The effect of internship on job performance: an assessment of students' perception. *International Journal of Scientific & Engineering Research*, 9(7), 378-382.

ARTIKEL ILMIAH POPULER

Isu dan Tantangan Etis dalam Implementasi Merdeka Belajar, Kampus Merdeka

Monica E. Madyaningrum

Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Kebijakan merdeka belajar, kampus merdeka (selanjutnya disebut MBKM) mengidealkan model pembelajaran yang kontekstual dengan dunia profesional dan dinamika masyarakat. Sebagai konsekuensinya, magang dan praktik kerja menjadi salah satu model pembelajaran yang diprioritaskan dalam implementasi MBKM. Tulisan ini hendak mendiskusikan isu dan tantangan etis yang mungkin muncul, serta langkah antisipasi yang diperlukan, ketika mahasiswa psikologi di jenjang strata 1 terlibat dalam model pembelajaran semacam ini. Menimbang latar belakang studi dan praksis penulis di area psikologi komunitas, maka tulisan ini akan memanfaatkan contoh kasus dari area intervensi sosial.

Magang atau Praktik Kerja dan Isu Etis yang Menyertai

Memastikan proses dan cara kerja yang etis merupakan keharusan dalam layanan dan praktik psikologi. Secara umum, prinsip dan aturan etis ditujukan untuk memastikan bahwa layanan dan praktik psikologi yang dilakukan tidak membawa dampak yang merugikan (*do no harm*) bagi pihak-pihak yang terlibat (HIMPSSI, 2010; Knapp & VandeCreek, 2006; Nagy, 2011). Mengacu pada pengertian ini, penting bagi mahasiswa untuk memiliki pemahaman

yang memadai tentang isu, tantangan dan pertimbangan etis yang relevan ketika berpartisipasi dalam model-model pembelajaran yang melibatkan praktik langsung di *setting* profesional.

Kebijakan MBKM sangat mendukung model pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa terlibat secara langsung di *setting* profesional. Hal ini tercermin dari bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran yang diatur dalam buku panduan MBKM, seperti magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, menjadi bagian dari tim penelitian dan terlibat dalam proyek kemanusiaan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Dalam ulasan-ulasan akademis, model-model pembelajaran semacam ini memang dipandang lebih efektif untuk mengembangkan pengetahuan dan pengalaman yang kontekstual

dengan situasi, kebutuhan, dan tuntutan di dunia profesional dan masyarakat, dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional (perkuliahan di kampus) (lihat misalnya, Binder, Baguley, Crook, & Miller, 2015; Sides & Mrvica, 2017).

Di sisi lain, karena sifatnya yang melibatkan pihak lain di luar institusi pendidikan tempat mahasiswa bernaung, magang dan praktik kerja seringkali menuntut proses persiapan, pengelolaan



ARTIKEL ILMIAH POPULER**ISU DAN TANTANGAN ETIS DALAM IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR**

serta *monitoring* dan evaluasi yang lebih kompleks, termasuk pengelolaan terkait isu dan tantangan etik yang mungkin muncul. Persoalan yang harus dikelola bisa lebih rumit lagi ketika mahasiswa yang terlibat dalam magang atau praktik kerja masih berada di jenjang strata 1. Dalam peta pendidikan psikologi, magang atau praktik kerja merupakan komponen pokok dari proses pendidikan di jenjang magister, khususnya magister terapan. Akibatnya, pengelola program magister maupun para mahasiswanya cenderung sudah memiliki kesiapan sistem, infrastruktur dan protokol yang mapan untuk mengelola isu dan tantangan etik terkait proses magang dan praktik kerja. Sementara, karena keterbatasan hak dan kewenangannya, cakupan dan proses pembelajaran di jenjang S1 cenderung difokuskan pada aspek pengetahuan dan sangat terbatas memasuki ranah terapan. Sebagai konsekuensinya, program studi S1 cenderung tidak memiliki kesiapan sistem dan protokol terkait pengelolaan isu etis ketika mahasiswa terlibat dalam magang atau praktik kerja. Situasi ini menunjukkan krusialnya isu etis terkait regulasi dan batasan kewenangan mahasiswa S1 ketika mereka berpartisipasi dalam program magang atau praktik kerja dalam *setting-setting* profesional.

Dalam beragam rumusan kode etik (misalnya, *American Psychological Association Ethics Code*, 2017; *Australian Psychological Society Ethics Code*, 2007; Kode Etik Himpunan Psikologi Indonesia, 2010), disebutkan bahwa '*do no harm*' merupakan prinsip etik umum dari proses pengajaran dan pelatihan (*teaching and training*). Pada intinya, prinsip ini menegaskan tanggungjawab para pengajar untuk memastikan bahwa setiap prosedur pembelajaran dan hasil pembelajaran yang diperoleh, tidak akan membawa dampak yang merugikan bagi para peserta didik, baik secara langsung maupun tidak. Mengacu pada pengertian ini, maka tidak mengherankan bahwa diskusi etis terkait magang dan praktik kerja, banyak mengulas bentuk-bentuk perlakuan tidak etis yang mungkin dialami para mahasiswa ketika mengikuti program magang atau praktik kerja (misalnya, Burke & Carton, 2013; Durack, 2013). Isu-isu tersebut misalnya adalah

eksploitasi mahasiswa peserta magang sebagai tenaga kerja tidak berbayar dan perundungan di tempat kerja karena posisi tawar mahasiswa yang lemah (O'Connor & Bodicoat, 2017; Whiteside, Stubbs, & Soundy, 2014). Mengacu pada persoalan semacam ini, maka memastikan prosedur dan mekanisme perlindungan mahasiswa dari perlakuan-perlakuan tidak etis menjadi salah satu bahasan utama dalam kajian tentang program magang atau praktik kerja (Sides, & Mrvica, 2017).

Namun demikian, isu dan persoalan etis dalam konteks magang atau praktik kerja bisa terjadi bukan hanya menyangkut mahasiswa sebagai pelaku dari kegiatan tersebut. Isu dan persoalan etis bisa juga terjadi berkenaan dengan mitra atau penerima manfaat dari program atau lembaga dimana mahasiswa tersebut melakukan proses magang atau praktik kerja. Mengacu pada hal ini, maka di bagian berikutnya penulis akan menggunakan contoh fiktif yang diinspirasi oleh pengalaman praksis penulis, untuk menggambarkan isu dan persoalan etis yang mungkin muncul dan perlu diantisipasi dalam kaitannya dengan mitra atau penerima manfaat dari program tempat mahasiswa melaksanakan magang atau praktik kerja.

Keterlibatan dalam Proyek Kemanusiaan sebagai Salah Satu Bentuk Implementasi MBKM dan Implikasi Etis yang Mungkin Terjadi

Dalam buku panduan MBKM (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020), keterlibatan mahasiswa dalam proyek kemanusiaan dibahas

“Persoalan yang harus dikelola bisa lebih rumit lagi ketika mahasiswa yang terlibat dalam magang atau praktik kerja masih berada di jenjang strata 1. Dalam peta pendidikan psikologi, magang atau praktik kerja merupakan komponen pokok dari proses pendidikan di jenjang magister, khususnya magister terapan”.

ARTIKEL ILMIAH POPULER**ISU DAN TANTANGAN ETIS DALAM IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR**

secara khusus sebagai salah satu model pembelajaran yang dipandang kontekstual dengan dinamika sosial masyarakat. Di bagian ini penulis akan menggunakan pengalaman keterlibatan di program serupa, untuk mendiskusikan isu dan tantangan etis yang mungkin terjadi ketika mahasiswa terlibat dalam program kemandirian. Tentu saja, isu dan tantangan etis terkait pengelolaan program magang dan praktik kerja mahasiswa di proyek kemandirian bisa lebih kompleks dan beragam dibanding apa yang penulis sampaikan. Maka, ilustrasi kasus yang disampaikan di bagian ini, lebih dimaksudkan sebagai sebuah lontaran awal untuk mulai mendiskusikan isu dan tantangan etis terkait implementasi MBKM.

Dalam buku panduan MBKM disebutkan bahwa kejelasan dan kepastian terkait proses supervisi dan *monitoring* merupakan hal pokok yang harus disiapkan sebelum melibatkan mahasiswa dalam program magang atau praktik kerja (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Selain untuk memastikan pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa, tampaknya hal semacam ini perlu dilihat juga dalam kaitannya dengan menjamin tidak dirugikannya mitra dan pihak terkait. Berikut ini adalah ilustrasi kasus yang menggambarkan krusialnya kejelasan dan kepastian aturan terkait proses supervisi dan *monitoring* dalam program magang atau praktik kerja, serta risiko etis yang mungkin terjadi ketika hal tersebut tidak disiapkan dengan memadai.

Dalam kapasitasnya sebagai akademisi di bidang psikologi sosial, A terlibat dalam suatu program pendampingan komunitas untuk kelompok marjinal yang dikelola oleh sebuah lembaga keagamaan. A berpartisipasi secara rutin dalam berbagai kegiatan bersama komunitas yang didampingi, sejak program tersebut mulai dirintis, hingga program tersebut berjalan di tahun-tahun selanjutnya. Melalui keterlibatannya ini, A yang sebenarnya merupakan pihak eksternal, lambat laun menjadi bagian organik dari program tersebut.

Suatu saat, lembaga keagamaan yang mengelola

program tersebut mengadakan kegiatan pelatihan rutin bagi komunitas yang didampingi. Pelatihan ini diselenggarakan dengan bekerja sama dengan sebuah program studi (prodi) ilmu kesehatan. Dalam pelaksanaannya, prodi ini melibatkan sejumlah mahasiswa strata 1 sebagai asisten program. Bagi prodi tersebut, keterlibatan mahasiswa dalam program pelatihan ini diposisikan sebagai salah satu bentuk praktik kerja mahasiswa. Dosen yang menjadi koordinator kegiatan pelatihan tidak pernah mengkomunikasikan secara detail dan formal kepada lembaga keagamaan yang menjadi pengelola program pendampingan tentang peran, batasan kewenangan dan jalur supervisi bagi para mahasiswa yang terlibat di kegiatan tersebut. Dalam pelaksanaannya, A menjumpai bentuk-bentuk keterlibatan yang dalam pandangan A dinilai melampaui batas kewenangan mahasiswa jenjang S1. A mengkomunikasikan hal ini kepada pihak lembaga keagamaan yang menjadi pengelola program. Ketika persoalan tersebut dikomunikasikan kepada dosen yang menjadi koordinator kegiatan pelatihan, yang bersangkutan tampak berkeberatan untuk menanggapi pengaduan yang disampaikan.

Ada tiga alasan yang mendasari keberatan tersebut. Pertama, para warga di komunitas tersebut (yang merupakan pemangku kepentingan utama dari program tersebut) tidak memiliki keberatan atas aktivitas yang dilakukan oleh para mahasiswa.

“Tidak mengherankan bahwa diskusi etis terkait magang dan praktik kerja, banyak mengulas bentuk-bentuk perlakuan tidak etis yang mungkin dialami para mahasiswa ketika mengikuti program magang atau praktik kerja. Isu-isu tersebut misalnya adalah eksploitasi mahasiswa peserta magang sebagai tenaga kerja tidak berbayar dan perundungan di tempat kerja karena posisi tawar mahasiswa yang lemah”.

ARTIKEL ILMIAH POPULER

ISU DAN TANTANGAN ETIS DALAM IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR

Kedua, prodi yang menugaskan para mahasiswa tersebut berpandangan bahwa penentuan batasan kewenangan mahasiswa merupakan wilayah keputusan prodi dengan mengacu pada standar yang ada dalam disiplin keilmuannya. Ketiga, pengaduan tersebut dipandang berasal dari pihak eksternal (A), yang bukan merupakan pemangku kepentingan utama dalam program tersebut.

Ilustrasi kasus di atas menggambarkan salah satu karakteristik dari program-program humanitarian yang biasanya melibatkan pemangku kepentingan yang jamak, mulai dari komunitas tertuju, lembaga pengelola program, pihak pemberi dana, konsultan eksternal dan juga tim ahli yang terlibat secara *ad hoc* untuk menangani aktivitas atau kegiatan tertentu. Sangat mungkin, masing-masing pihak ini memiliki orientasi nilai yang berbeda yang kemudian diterjemahkan menjadi *code of conducts* yang berbeda-beda pula (Heller, 1989; O'Neill, 1989). Akibatnya, masing-masing pihak bisa memiliki ekspektasi yang berbeda terkait bagaimana seseorang diharapkan bersikap dan berperilaku berkenaan dengan keterlibatannya dalam program kemanusiaan yang dijalankan, termasuk ketika ada mahasiswa yang magang atau praktik kerja di program tersebut.

Konteks semacam ini memberi tantangan yang khas berkenaan dengan proses supervisi dan *monitoring* ketika mahasiswa melakukan magang atau praktik kerja dalam program-program kemanusiaan. Ada kemungkinan bahwa penentuan jalur supervisi menjadi tidak bisa *se-straight forward*, proses yang ada di institusi 'konvensional' semacam perusahaan atau lembaga pendidikan. Ketika hal semacam ini tidak diantisipasi dengan memadai sebelum mahasiswa diterjunkan, sangat mungkin terjadi resiko persoalan seperti yang diilustrasikan dalam kasus di atas. Ilustrasi kasus tersebut menggambarkan dampak dari tidak adanya nota kesepahaman yang memadai antara prodi dan para pemangku kepentingan dari program tersebut. Akibatnya, jalur supervisi bagi mahasiswa yang terlibat menjadi tidak jelas, juga mekanisme pelaporan ketika ditengarai ada *misconducts* dalam proses magang atau praktik kerja.

“Dosen yang menjadi koordinator kegiatan pelatihan tidak pernah mengkomunikasikan secara detail dan formal kepada lembaga keagamaan yang menjadi pengelola program pendampingan tentang peran, batasan kewenangan dan jalur supervisi bagi para mahasiswa yang terlibat di kegiatan tersebut”.

Penutup: Pentingnya Pertimbangan Etik yang Kontekstual

Berpijak pada ilustrasi persoalan di atas, maka penulis berpandangan bahwa pelaksanaan program magang dan praktik kerja sebagai salah satu bentuk implementasi MBKM, menuntut kesediaan dan kesungguhan setiap pihak terkait untuk mengidentifikasi dan menyiapkan langkah mitigasi atas risiko dan tantangan etis yang mungkin terjadi. Dalam konteks ini maka penting untuk menekankan pemahaman atas etik sebagai sesuatu yang lebih luas daripada sebatas mematuhi pasal-pasal yang ada dalam kode etik. Sebagaimana diilustrasikan dalam kasus di atas, setiap *setting* magang atau praktik kerja bisa memiliki isu dan tantangan etis yang spesifik, karenanya sangat diperlukan pemahaman dan pertimbangan etik yang kontekstual dengan *setting* tersebut. Pemahaman dan pertimbangan etis yang kontekstual diperlukan bukan hanya untuk melindungi hak dan keselamatan mahasiswa, namun terlebih juga untuk memastikan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam program magang atau praktik kerja tidak akan membawa dampak-dampak yang merugikan bagi mitra dan pihak-pihak yang terlibat dalam program tersebut. Meminjam argumen Guillemin dan Gillam (2004), implementasi MBKM dalam bentuk magang dan praktik kerja tampaknya memerlukan bukan hanya pemahaman etik yang bersifat *procedural* (sebatas mengikuti aturan yang ada dalam pedoman kode etik), namun juga apa yang disebut sebagai *ethics in practice*; yaitu pertimbangan-pertimbangan etis yang responsif dengan konteks spesifik dimana sebuah studi, intervensi atau program dijalankan.

“Konteks semacam ini memberi tantangan yang khas berkenaan dengan proses supervisi dan monitoring ketika mahasiswa melakukan magang atau praktik kerja dalam program-program kemanusiaan. Ada kemungkinan bahwa penentuan jalur supervisi menjadi tidak bisa *se-straight forward* proses yang ada di institusi ‘konvensional’ semacam perusahaan atau lembaga pendidikan”.

Daftar Acuan

- American Psychological Association. (2017). *Ethical principles of psychologists and code of conduct*. Washington, DC: Author. Diakses dari <https://www.apa.org/ethics/code/>
- Australian Psychological Society. (2007). *APS code of ethics*. Melbourne, Vic: Author. Diakses dari <https://www.psychology.org.au/getmedia/d873e0db-7490-46de-bb57-c31bb1553025/APS-Code-of-Ethics.pdf>
- Binder, J. F., Baguley, T., Crook, C., & Miller, F. (2015). The academic value of internships: Benefits across disciplines and student backgrounds. *Contemporary Educational Psychology*, 41, 73-82.
- Burke, D. D., & Carton, R. (2013). The pedagogical, legal, and ethical implications of unpaid internships. *Journal of Legal Studies. Education.*, 30 (1) 99 – 130
- Durack, K. T. (2013). Sweating employment: Ethical and legal issues with unpaid student internships. *College Composition and Communication*, 65(2), 245-272.
- Guillemin, M., & Gillam, L. (2004). Ethics, reflexivity, and “ethically important moments” in research. *Qualitative Inquiry*, 10(2), 261-280.
- Heller, K. (1989). Ethical dilemmas in community intervention. *American Journal of Community Psychology*, 17(3), 367–378
- Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI). (2010). *Kode Etik Psikologi Indonesia*. Diakses dari <https://himpsi.or.id/organisasi/kode-etik-psikologi-indonesia>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020). *Buku panduan merdeka belajar – kampus merdeka*. Diakses dari <http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Buku-Panduan-Merdeka-Belajar-Kampus-Merdeka-2020>
- Knapp, S. J., & VandeCreek, L. D. (2006). *Practical ethics for psychologists: A positive approach*. Washington DC: American Psychological Association.
- Nagy, T. F. (2011). *Essential ethics for psychologists: A primer for understanding and mastering core issues*. Washington, DC: American Psychological Association.
- O'Connor, H., & Bodicoat, M. (2017). Exploitation or opportunity? Student perceptions of internships in enhancing employability skills. *British Journal of Sociology of Education*, 38(4), 435-449.
- O'Neill, P. (1989). Responsible to whom? Responsible for what? Some ethical issues in community intervention. *American Journal of Community Psychology*, 17(3), 323-341.
- Sides, C., & Mrvica, A. (2017). *Internships: Theory and practice*. New York: Routledge.
- Whiteside, D., Stubbs, B., & Soundy, A. (2014). Physiotherapy students' experiences of bullying on clinical internships: a qualitative study. *Physiotherapy*, 100(1), 41-46.

Pendidikan Literasi Media dalam Kampus Psikologi Merdeka

Tahun 2020 menandai pergeseran signifikan dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Pada Januari 2020, Kemendikbudristekdikti meluncurkan program Kampus Merdeka yang merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar (Kemendikbudristekdikti, 2020). Adanya program ini memberikan kebebasan lebih bagi berbagai perguruan tinggi untuk menyelenggarakan program-program studi baru. Selain itu, mahasiswa juga mendapatkan kelenturan opsi untuk memenuhi dua semester masa kuliah atau setara 40 sks dalam bentuk kredit selain mengambil mata kuliah di dalam ruang kelas, maupun mengambil kredit perkuliahan di kampus lain. Kebijakan ini membuat para penyelenggara pendidikan tinggi harus dengan cepat menyusun dan mengimplementasikan kebijakan bahkan kurikulum baru di tingkat perguruan tinggi, fakultas, departemen, maupun program studi sehingga sejalan dengan program pemerintah.

Tak lama setelah Kampus Merdeka diluncurkan, pada pertengahan Maret 2020—hingga artikel ini ditulis—, moda pembelajaran tatap muka dihentikan dan digantikan menjadi moda daring sebagai ikhtiar menahan laju penyebaran infeksi Covid-19. Pandemi Covid-19 dan Program Merdeka Belajar menghadirkan tantangan bagi penyelenggara dan peserta pendidikan tinggi dalam mengelola perkuliahan. Para pendidik dan mahasiswa secara mendadak dipaksa beralih

wahana belajar dari ruang kelas luring menjadi daring, padahal sebagian pendidik dan mahasiswa masih memiliki akses terbatas terhadap piranti keras, piranti lunak, atau koneksi internet. Hal ini kerap kali menghambat proses pembelajaran daring serempak (*synchronous*) yang di awal pandemi sering dilakukan dengan mengganti perkuliahan tatap muka ke dalam bentuk telekonferensi. Proses pembelajaran serempak mengharuskan pengajar dan mahasiswa berada pada ruang kelas virtual pada waktu yang bersamaan. Konsekuensi dari hal ini adalah beratnya beban perkuliahan, baik dari segi jaringan internet, maupun biaya yang dikeluarkan untuk setiap sesi kuliah. Problem akan semakin kompleks jika mahasiswa tidak memiliki kondisi ruang belajar privat yang kondusif untuk melakukan sesi tatap muka virtual. Tak sedikit mahasiswa yang harus berbagi ruang dengan anggota keluarga lain atau harus mengerjakan kewajiban lain, seperti tugas-tugas rumah tangga selama jam kuliah berlangsung.

Tantangan substansial lain muncul dari kondisi ini sehubungan dengan literasi mahasiswa dan pendidik dalam menciptakan konten atau materi pembelajaran yang bukan sekadar melakukan telekonferensi. Sebagian besar tenaga pendidik tidak pernah mendapatkan pendidikan atau pelatihan formal mengenai pelaksanaan pembelajaran daring sehingga tak sedikit yang mengalami kebingungan dalam memilih dan menggunakan teknologi dan

ARTIKEL ILMIAH POPULER

PENDIDIKAN LITERASI MEDIA DALAM KAMPUS

aplikasi daring yang tepat. Tidak semua perguruan tinggi juga sudah mampu menyediakan sumber daya teknologi maupun pelatihan yang dapat membantu para pendidik untuk menciptakan konten dan format yang sesuai untuk moda pembelajaran daring.

Kemampuan untuk menciptakan konten berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan kemahiran menggunakan platform dan teknologi yang tepat untuk menyampaikan pesan merupakan bagian dari literasi media. Literasi media didefinisikan sebagai “kemampuan untuk melakukan interpretasi, analisis, evaluasi, dan produksi media” (Aufderheide, 1993, hlm. 1). Dalam perkembangannya sebagai topik riset maupun fokus intervensi sosial, literasi media memiliki dua tujuan: melindungi pengguna media dari konten yang bermasalah atau negatif (misalnya: konten kekerasan, pornografi, iklan, atau hoaks); dan memaksimalkan manfaat penggunaan media (misalnya: meningkatkan perilaku hidup sehat) (Scharrer dkk., 2016). Dalam mengonsumsi maupun memproduksi media, terdapat setidaknya lima aspek yang akan diperhatikan oleh individu yang memiliki literasi media yang tinggi, yaitu: siapa yang menciptakan konten atau pesan; format pesan; audiens atau pengguna yang dituju; isi pesan; dan tujuan atau misi yang hendak dicapai dalam konten (Jolls & Wilson, 2014). Literasi media juga merupakan salah satu rute yang dapat ditempuh untuk meningkatkan *civic engagement* dengan membuat pengguna media tidak hanya mengetahui pada hal yang berkenaan dengan konten, namun juga memahami bagaimana media diproduksi sehingga pada akhirnya dapat menjadi jembatan konsumen media untuk menciptakan media yang berkualitas (Martens, 2010).

Dari kaca mata yang lebih positif, Kampus Merdeka dan pandemi Covid-19 sebenarnya dapat dilihat sebagai kesempatan untuk meningkatkan literasi media, tidak hanya bagi mahasiswa, namun juga bagi akademisi dan administrator perguruan tinggi. Pengelolaan mata kuliah tidak dapat lagi dilakukan

dengan mengandalkan tatap muka atau bentuk tercetak (*hard copy*) dari tugas-tugas mahasiswa melainkan menuntut rekonseptualisasi mata kuliah dan infrastruktur yang lebih memadai.

Sebenarnya moda pembelajaran daring bukanlah barang baru di dunia pendidikan. Perguruan-perguruan tinggi terkemuka di luar negeri telah cukup lama membuka *Massive Open Online Courses* (MOOC) yang mengundang ribuan peserta dari berbagai penjuru dunia. Di Indonesia sendiri, sejak pendiriannya, Universitas Terbuka telah menjalankan moda pembelajaran jarak jauh sebagai moda utama perkuliahan. Dalam jangka panjang, pembelajaran daring yang saat ini didorong oleh program Kampus Merdeka dan “diakselerasi” dengan munculnya pandemi dapat membuka kesempatan yang membuat pendidikan tinggi di Indonesia lebih inklusif. Sebagai contoh, seseorang yang tinggal jauh dari Jakarta tidak harus terintimidasi dengan jarak geografis atau berhadapan dengan tingginya biaya hidup di Ibukota dan sekitarnya untuk dapat mengakses materi atau mengikuti mata kuliah yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia. Dari perspektif perguruan tinggi penyelenggara, mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk MOOC dapat menjadi potensi sumber pemasukan. Tentunya penyelenggaraan MOOC memerlukan persiapan yang matang, baik dari segi teknologi seperti konstruksi situs atau aplikasi pengelolaan mata kuliah (*course management*

“Sebagian besar tenaga pendidik tidak pernah mendapatkan pendidikan atau pelatihan formal mengenai pelaksanaan pembelajaran daring sehingga tak sedikit yang mengalami kebingungan dalam memilih dan menggunakan teknologi dan aplikasi daring yang tepat”.

ARTIKEL ILMIAH POPULER

PENDIDIKAN LITERASI MEDIA DALAM KAMPUS

system), administrasi pendaftaran dan keuangan, serta persiapan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang akan diterjunkan untuk mengampu dan mengelola MOOC.

Adanya kebijakan Kampus Merdeka yang mentransformasi tata pembelajaran ke platform daring membuat administrator, mahasiswa, dan akademisi untuk tidak hanya tinggal di garis tepi sebagai konsumen konten media semata, namun juga menjadi produsen media. Produksi media sendiri sebenarnya bukan merupakan hal yang sama sekali asing. Dalam proses pembelajaran luring maupun daring yang lebih “tradisional”, pembuatan dan penggunaan media visual sederhana, seperti *salindia (slide)* presentasi atau alat peraga, telah lazim digunakan. Di masa pandemi ini, perpindahan moda pembelajaran dari luring menjadi daring menuntut para pendidik untuk melakukan peremajaan atau *upgrade* kemampuan bermedianya dengan belajar memproduksi konten media audiovisual dalam berbagai bentuk. Contohnya, pendidik dapat membuat rekaman video atau *sinar (podcast)* perkuliahan yang dapat diakses mahasiswa secara tidak serempak (*asynchronous*), dan menyusun aktivitas pembelajaran yang berbasis digital seperti kuis digital (misalnya melalui aplikasi *Kahoot* atau *Quizziz*) atau papan kolaborasi (misalnya melalui *Google Jamboard*).

Pembelajaran moda daring berlangsung

“Perguruan-perguruan tinggi terkemuka di luar negeri telah cukup lama membuka *Massive Open Online Courses (MOOC)* yang mengundang ribuan peserta dari berbagai penjuru dunia. Di Indonesia sendiri, sejak pendiriannya, Universitas Terbuka telah menjalankan moda pembelajaran jarak jauh sebagai moda utama perkuliahan”.

lebih lancar jika pendidik dan mahasiswa fasih menavigasi situs pengelolaan mata kuliah. Saat ini cukup banyak aplikasi pengelolaan kelas yang dapat digunakan, baik yang gratis maupun berbayar, seperti *Google Classroom*, *Moodle*, *Blackboard*, dan sebagainya. Penggunaan situs atau aplikasi yang memang diciptakan untuk pengelolaan mata kuliah pada akhirnya lebih memudahkan proses pembelajaran ketimbang menggunakan aplikasi yang tidak disiapkan untuk pengelolaan kelas (misalnya *WhatsApp* atau *Google Drive*). Pengelolaan perkuliahan yang sistematis dan terdokumentasi akan berdampak pada bahan pembelajaran yang terdistribusi dan tersimpan dengan baik, serta mempermudah proses monitoring dan evaluasi. Komponen pendidikan literasi media dapat pula



ARTIKEL ILMIAH POPULER

PENDIDIKAN LITERASI MEDIA DALAM KAMPUS

diintegrasikan ke dalam materi perkuliahan yang telah ada, apalagi untuk materi pembelajaran psikologi yang memang berbicara mengenai tingkah laku manusia. Pada kuliah psikologi sosial, semisal pada topik yang berkaitan dengan stereotip, prasangka, dan diskriminasi, mahasiswa dapat diminta mencari gambaran kelompok sosial atau demografi tertentu yang beredar di media berita maupun populer lalu menganalisis potensi akibat penggambaran tersebut pada dinamika kehidupan bermasyarakat. Pada kuliah psikologi perkembangan atau pendidikan, pola penggunaan dan literasi media pada berbagai kelompok usia atau generasi dapat menjadi bahan observasi dan diskusi. Pada kuliah psikologi industri atau psikologi konsumen, mahasiswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis pesan komersial yang melekat ataupun terselubung pada platform tradisional maupun digital, seperti *product placement*, *endorsement* dari selebritas atau *influencer*, berbagai kontes pembuatan konten yang terkait produk tertentu, dan *pre-roll ads* yang mendahului atau diselipkan di klip yang ada di *You Tube*.

Selain memasukkannya ke dalam konten materi kuliah, peningkatan literasi media juga dapat dilakukan dengan memperluas bentuk tugas atau bahan evaluasi ke dalam bentuk yang lebih kreatif. Jika dahulu tugas mahasiswa didominasi makalah yang disertai presentasi kelompok berbantu salindia, kini mahasiswa dapat ditugaskan membuat poster atau infografis terkait topik atau isu yang relevan dengan mata kuliah yang bersangkutan. Mahasiswa juga dapat diminta membuat siniar atau vlog sederhana, atau prototipe pesan layanan masyarakat sebagai tugas akhir setara ujian akhir semester. Bentuk tugas yang beragam mendorong mahasiswa untuk tidak hanya dapat mensintesis materi dan bahan kuliah menjadi produk yang konkret dan berbeda dari yang tercetak di buku teks atau artikel jurnal, namun juga dapat menjadi sarana bagi mereka untuk menyusun pesan, menyalurkan kreativitas serta unjuk kebolehan, sekaligus belajar memproduksi media. Selain itu, jika direncanakan dan dikonsepskan dengan matang, tugas dengan format yang lebih “baru”

ini juga dapat menjadi opsi wahana intervensi sosial bagi masyarakat. Misalnya, mahasiswa dapat ditugaskan untuk membuat infografis dan akun media sosial yang dapat diakses publik lalu mengunggah berbagai infografis yang dibuatnya dalam akun tersebut. Dengan demikian, proyek atau tugas kuliah yang direncanakan oleh dosen dan disusun mahasiswa dengan susah payah dapat memberikan dampak positif yang lebih luas dan langsung bagi masyarakat. Tugas mahasiswa menjadi lebih bermanfaat setelah kuliah berakhir ketimbang “hanya” disimpan di repositori daring dan dilupakan setelah semester atau tahun ajaran selesai.

Di luar arena perkuliahan, integrasi literasi media ke dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi dan materi perkuliahan boleh jadi memfasilitasi pendidik dan mahasiswa untuk tidak saja dapat memilah dan melakukan asesmen, bahkan melakukan koreksi terhadap berbagai informasi yang beredar. Ya Semisal dalam kasus Covid-19, tantangan pengendalian pandemi tidak hanya berhubungan dengan pengendalian penyebaran penyakit, namun juga berkaitan dengan persebaran informasi yang salah. Badan kesehatan dunia WHO menyatakan bahwa dunia menghadapi bukan hanya “pandemi”, namun juga “infodemi” (World Health Organization, 2020). Begitu banyak hoaks

“Bentuk tugas yang beragam mendorong mahasiswa untuk tidak hanya dapat mensintesis materi dan bahan kuliah menjadi produk yang konkret dan berbeda dari yang tercetak di buku teks atau artikel jurnal, namun juga dapat menjadi sarana bagi mereka untuk menyusun pesan, menyalurkan kreativitas serta unjuk kebolehan, sekaligus belajar memproduksi media”.

ARTIKEL ILMIAH POPULER

PENDIDIKAN LITERASI MEDIA DALAM KAMPUS

maupun misinformasi terkait pandemi beredar di berbagai kanal. Kementerian Informasi dan Komunikasi Indonesia mencatat 1028 hoaks terkait Covid-19 beredar sejak Januari sampai Agustus 2020 (Mufarida, 2020). Hal tersebut memberikan indikasi kuat bahwa literasi media telah menjadi kebutuhan yang melampaui tujuan praktis pembelajaran jarak jauh. Ia juga sangat diperlukan untuk membangun masyarakat Indonesia yang lebih kuat dan cerdas dalam memproses, menyebarkan, dan memproduksi informasi.

Daftar Acuan

- Aufderheide, P. (1993). Media Literacy: A Report of the National Leadership Conference on Media Literacy. *Aspen Institute, Communications and Society Program*, 2. Transaction New Brunswick, NJ.
- Jolls, T., & Wilson, & C. (2014). Voices from the Field The Core Concepts: Fundamental to Media Literacy Yesterday, Today and Tomorrow. *Journal of Media Literacy Education*, 6(2). www.jmle.org
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Mendikbud Luncurkan Empat Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka*. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/01/mendikbud-luncurkan-empat-kebijakan-merdeka-belajar-kampus-merdeka>
- Martens, H. (2010). Evaluating Media Literacy Education: Concepts, Theories and Future Directions. *Journal of Media Literacy Education*, 2. www.jmle.org
- Mufarida, B. (2020, August 12). Kominfo Mencatat Sebanyak 1.028 Hoaks Tersebar terkait Covid-19. *Sindonews*.
- World Health Organization. (2020). *Managing the Covid-19 infodemic: Promoting healthy behaviours and mitigating the harm from misinformation and disinformation*.
- Scharrer, E., Sekarasih, L., & Olson, C. (2016). Media, youth, and well-being: What are the outcomes of media literacy education? In *The Routledge Handbook of Media Use and Well-Being: International Perspectives on Theory and Research on Positive Media Effects*. <https://doi.org/10.4324/9781315714752>

BAHASA INDONESIA

Sebagai Bahasa Ilmiah Internasional:

Upaya Intervensi untuk Sebuah Pengakuan Karya Ilmiah Internasional

Koentjoro

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Tulisan ini hendak mengulas sebuah upaya untuk mewujudkan *Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Ilmiah Internasional*: *Upaya Intervensi untuk Sebuah Pengakuan Karya Ilmiah Internasional*, dalam pendekatan psikologi pemberdayaan masyarakat. Seperti diketahui bahwa Indonesia adalah negara terbesar dan terbanyak ke-4 di dunia dalam luas wilayah dan jumlah penduduk. Pada tingkat ASEAN, Indonesia adalah negara terluas dan jumlah penduduk terbesar di ASEAN. Ironisnya, apabila menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa persatuan, dalam hal berbahasa Inggris, Indonesia menduduki peringkat ke-61 dunia dalam kemampuan berbahasa Inggris (Setiawan, 2019). Tidaklah aneh; meskipun Indonesia banyak mengirim sarjana belajar ke luar negeri dan banyak penulis jurnal berbahasa Inggris yang bereputasi internasional, masih banyak juga sarjana, doktor hingga guru besar yang memiliki kemampuan bahasa Inggris minimal. Akibatnya, banyak karya ilmiah dan prestasi akademik yang lain yang seharusnya mendapat pengakuan internasional, namun karena memiliki kemampuan bahasa Inggris yang kurang memadai menjadikan tidak mendapatkan pengakuan. Pertanyaannya adalah apakah hanya karena persoalan kemampuan bahasa, kemudian menjadikan sarjana Indonesia tidak mendapatkan pengakuan dalam hal karya

ilmiah dan prestasi akademik? Apalagi apabila persoalan ini dikaitkan dengan sejarah panjang budaya tulis di Barat dan budaya tutur di Indonesia.

Dilaporkan oleh Yulianingsih (2020) bahwa jumlah penutur bahasa Indonesia yang tersebar di seluruh dunia adalah 199 juta pembicara dan menduduki peringkat ke-10 dunia. Hal ini menunjukkan telah dipenuhinya syarat untuk pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Namun demikian ternyata bukan persoalan mudah untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi PBB.

Fakta menunjukkan bahwa di Indonesia telah banyak berkembang sekolah internasional (*international school*) yang justru menggunakan bahasa non-Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Indonesia telah menjadi destinasi utama untuk sekolah-sekolah internasional di Asia Tenggara. Berdasarkan data yang dilaporkan Nugraheni (2018) yang dirilis DARI ISC Research, Indonesia masih memimpin dengan jumlah 198 sekolah internasional, kemudian diikuti Thailand (192), Malaysia (187), Singapura (119), dan Vietnam (118). Kondisi ini menjadikan Bahasa Indonesia kian terpuruk dan belum menjadi bahasa yang mencerminkan identitas nasional yang diharapkan.

ISU PSIKOLOGI TERKINI

Untuk itulah perlu diperjuangkan agar Bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengidentitaskan diri dalam suatu kelompok sosial, atau tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi dan bekerja sama, tetapi juga bisa menjadi bahasa kebanggaan nasional. Sebab keberadaan bahasa dalam suatu komunitas sangatlah penting, karena dapat dijadikan sebagai salah satu unsur kebudayaan (Koentjaraningrat, 1984). Sebagai unsur budaya, bahasa mempunyai hubungan erat dengan identitas suatu budaya. Tulisan ini membahas bagaimana bahasa (*lingua franca*) digunakan untuk mengidentifikasi identitas personal, sosial, etnis, dan nasional. Dengan adanya perasaan bangga berbahasa Indonesia, para cerdik pandai diharapkan dapat lebih produktif lewat karyanya sehingga mendapatkan pengakuan juga secara internasional.

Menurut Idham, Mubarak, dan Pratiwi (2016), pengembangan masyarakat (*community development*) adalah proses yang menunjukkan bersatunya masyarakat dan instansi pemerintah untuk meningkatkan kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, serta menyatu dalam kehidupan berbangsa sehingga dapat memberikan kontribusi yang penuh untuk mengatasi suatu permasalahan. Dalam proses ini, muncul beberapa tahapan pembangunan masyarakat (Koentjoro, 2009), yaitu: (a) masyarakat disadarkan kalau mereka memiliki masalah bersama; (b) bahwa masalah itu perlu dipecahkan bersama; dan (c) masyarakat perlu diajak berpikir untuk menyusun penyelesaian masalahnya.

Ketika seseorang memimpin sebuah organisasi, seharusnya pemimpin itu sudah bertindak sebagai perencana pengembangan masyarakat (*community development planner*), yaitu seseorang yang merancang intervensi apa yang pas, yang akan dilakukan yang nantinya dapat membawa kemajuan organisasi yang dipimpinnya. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang baik harus benar-benar memahami persoalan dan permasalahan organisasi dan dapat memilah-milah antara kebutuhan dengan kepentingannya. Praktisi pengembangan masyarakat (*community development practitioner*) harus

BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA ILMIAH

memahami bagaimana bekerja dengan individu (di tingkat individual) maupun bekerja untuk mempengaruhi perubahan di tingkat institusi sosial yang lebih luas (Koentjoro, 2009).

Dalam paparan selanjutnya, penulis menggunakan metode penulisan yang didasarkan pada konsep studi naratif (*narrative study*) (Wertz, dkk, 2011), yang menekankan pada pengalaman pribadi penulis selama terlibat di dalam kegiatan ini

Sejarah/latar belakang pemikiran kesadaran masalah bersama

Pemikiran penggunaan Bahasa Indonesia-Malay sebagai bahasa ilmiah internasional sebenarnya sudah lama dipikirkan, yaitu saat kunjungan Dewan Guru Besar (DGB) UGM pada tahun 2017 ke Majelis Professor Negara (MPN) Malaysia, pada saat di bawah kepemimpinan Prof. Putu Sudiro Ph.D. Dalam pertemuan di kantor MPN muncul istilah *Bahasa Nusantara Raya* untuk menggantikan istilah *bahasa Indonesia-Malay*. Istilah ini dikemukakan Prof. Komaruddin Said dari MPN. Pemikiran beliau adalah bahwa Nusantara itu identik Indonesia, dan dalam hal ini Nusantara yang lebih besar lagi.

Pemikiran yang serius muncul pada saat diselenggarakan rapat kerja (Raker) II Forum Dewan Guru Besar Indonesia (FDGBI) di Unsyiah, Aceh, pada tanggal 25-26 Januari 2019. Awalnya, kami hanya berpikir tentang bagaimana mengoptimalkan partisipasi anggota, karena konsep dalam pengembangan masyarakat (*community development*), menurut Koentjoro (2015), adalah mengoptimalkan partisipasi masyarakat, mencerdaskan masyarakat, memandirikan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Melalui klaster keilmuan diharapkan partisipasi masyarakat akademis FDGBI akan meningkat.

Sebagai Ketua FDGBI, saya melihat bahwa persoalan penguasaan Bahasa Inggris sering menjadi kendala dalam mengoptimalkan partisipasi dan aktualisasi diri. Banyak mahasiswa S2 dan S3 yang tertunda kelulusannya hanya karena skor TOEFL-

ISU PSIKOLOGI TERKINI**BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA ILMIAH**

nya masih kurang dari yang dipersyaratkan. Banyak dosen berkualitas tidak mampu mencapai jenjang akademik tertinggi karena tidak mampu menulis karya penelitian yang terindeks yang hampir semua berbahasa non-Indonesia. Pertanyaannya, apakah hanya karena persoalan bahasa, orang tidak mampu mengoptimalkan prestasinya dan mengaktualisasikan dirinya secara optimal? Karena itulah kemudian dirancang serangkaian kegiatan untuk itu. Sebagai ketua FDGBI pada waktu rapat kerja II FDGBI di Unsyiah, Aceh, saya melontarkan ide pentingnya Bahasa Indonesia-Malay sebagai bahasa ilmiah Internasional, dan disetujui secara aklamasi oleh sidang sebagai salah satu butir keputusan musyawarah nasional (Munas).

Selanjutnya dalam Musyawarah Nasional (Munas) II dan Seminar Nasional FDGBI, yang digelar di Hotel Claro, Makassar, 5-7 Agustus 2019, dalam sidangnya yang menindaklanjuti keputusan Raker II di Aceh, memutuskan untuk menunjuk Universitas Negeri Surabaya untuk menyelenggarakan pertemuan internasional yang membahas pelaksanaan Bahasa Indonesia-Malay atau Nusantara Raya sebagai bahasa ilmiah internasional.

Lahirnya kesepakatan/deklarasi Unesa

Berkat kegigihan banyak pihak dan setelah melewati beberapa kali pertemuannya serta adanya dukungan Rektor Unesa, Rapat Kerja (Raker) IV FDGBI akhirnya dapat terselenggara di Universitas Negeri Surabaya (UNESA) pada tanggal 4-7 November 2019. Peserta yang hadir, lebih dari 92 perwakilan PTN/PTS. Meskipun demikian, yang menarik adalah justru terjadi kesepakatan bukan istilah bahasa Nusantara Raya, namun justru Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional. Prof. Komaruddin Said dari Malaysia justru yang mengusulkan agar Bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai Bahasa Internasional dan sekaligus sebagai Bahasa resmi ASEAN. Hal ini bertolak dari alasan jumlah penduduk Indonesia dan juga peran penyebaran TKI ke seluruh penjuru dunia; belum lagi para diaspora Indonesia.

Dalam pertemuan Raker IV luar biasa FDGBI

ini hadir utusan dari luar negeri sebagai narasumber, yaitu Prof. Komaruddin Said dari Majelis Profesor Negara Malaysia; Endina Asri Widartama, BBA utusan dari Singapura; Assistant Professor Siriporn Maneechukate dari Universitas Maejo, Thailand; dan Prof. Dr. Koh Young Hun dari Korea Selatan. Sebenarnya diundang juga dari Australia namun berhalangan hadir.

Diskusi berjalan lancar dan menarik, di akhir sesi penandatanganan **deklarasi Unesa** yang kalimat per kalimatnya wajib mendapat persetujuan dari para hadirin peserta sidang.

Realisasi Seminar Nasional di UIR

Sesuai kesepakatan Raker FDGBI di Unesa, kegiatan seminar internasional akan **diselenggarakan di Universitas Islam Riau (UIR), maka melalui beberapa kali pertemuan** diputuskan bahwa kegiatan Seminar Internasional Berbahasa Indonesia FDGBI 2020 di UIR, Pekanbaru, Indonesia, akan diselenggarakan pada tanggal 8-9 April 2020, dengan motto: "**Maju Bersama Kita Berjaya**". Konsep "maju bersama kita berjaya" ini merupakan *konsep lokal-genius* yang berakar dari nilai kegotongroyongan yang

"Banyak mahasiswa S2 dan S3 yang tertunda kelulusannya hanya karena skor TOEFL-nya masih kurang dari yang dipersyaratkan. Banyak dosen berkualitas tidak mampu mencapai jenjang akademik tertinggi karena tidak mampu menulis karya penelitian yang terindeks yang hampir semua berbahasa non-Indonesia. Pertanyaannya apakah hanya karena persoalan Bahasa orang tidak mampu mengoptimalkan prestasinya dan mengaktualisasikan dirinya secara optimal?"

ISU PSIKOLOGI TERKINI

BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA ILMIAH

ada dalam masyarakat, yang kalau meminjam istilah dari David C. McClelland (1987) disebut sebagai motivasi berprestasi (*achievement motivation*). Melalui konsep pengembangan masyarakat (*community development*), masyarakat akademis disadarkan bahwa “kita punya masalah”, “masalah harus kita pecahkan bersama”. Bentuk pemberdayaan (*empowerment*) bisa bermacam-macam; misalnya adalah hadirnya gerakan para pemikir bangsa, para buruh, gerakan dari Mahatma Gandhi di India, dan lain-lain (Kloss dkk., 2012). Pemberdayaan (*empowerment*) ini sangat bergantung pada adanya partisipasi anggotanya atau *citizen participation*.

Untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat akademis dan negara yang terlibat, maka beberapa persiapan yang telah dilakukan adalah membagi seminar ini menjadi beberapa klaster: 1) Klaster Sosial Humaniora dan Hukum, dengan koordinator Prof. Dr. Roselina Binti Ahmad Saufi dari Universitas Malaysia Kelantan, Malaysia; 2) Klaster Agama dan filsafat, dengan koordinator Prof. Dr. Hafid Abbas dari Universitas Negeri Jakarta, Indonesia; 3) Klaster Kesehatan dan Kedokteran, dengan koordinator Prof. Dr. Budu, Ph.D., Sp.M.(K.), M.Med.Ed. dari Universitas Hasanuddin, Indonesia; 4) Klaster Agrokompleks, dengan koordinator Prof. Ir. Tarkus Suganda, M.Sc., Ph.D. dari Universitas Padjadjaran, Indonesia; 5) Klaster Sains dan Teknologi, dengan

koordinator Dr. Ir. Apollo Safanpo, S.T., M.T., dari Universitas Cendrawasih, Indonesia; dan 6) Klaster Pendidikan, dengan koordinator Prof. Dr. Susilo, M.Pd. dari Universitas Mulawarman, Indonesia. Setelah beberapa kali pertemuan, disepakati menyiapkan beberapa pembicara tamu, yaitu Prof. Stefan Koos dari Universitaet Der Bundeswehr Munchen, Germany, Prof. Dr. Maqdi Behman dari Eastern Mennonite University Virginia, USA, Prof. Yang Seung Yoon dari Hankuk University, Korea Selatan, Prof. Dr. Kamaruddin M. Said dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia, dan Dr. Haji Norarfan Bin Haji Zainal, Rektor Universitas Islam Sultan Syarif Ali dari Brunei. *Alhamdulillah*, para pembicara tamu dapat hadir dan mempresentasikan makalah mereka pada saat pelaksanaannya.

Karena salah satu tujuan kegiatan ini adalah membantu percepatan pencapaian ke jabatan akademik guru besar maka makalah yang dikirim dalam seminar Ilmiah Internasional ini diutamakan memiliki jabatan akademik minimal Lektor. Semua naskah karya ilmiah yang lolos dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh tim peninjau

“Prof. Komaruddin Said dari Malaysia justru yang mengusulkan agar Bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai Bahasa Internasional dan sekaligus sebagai Bahasa resmi ASEAN. Hal ini bertolak dari alasan jumlah penduduk Indonesia dan juga peran penyebaran TKI ke seluruh penjuru dunia; belum lagi para diaspora Indonesia”.



ISU PSIKOLOGI TERKINI

(reviewer) di tiap klaster akan dipublikasikan dalam:

1. Jurnal Internasional terindeks SCOPUS/ Sinta 2 (Syarat Ketentuan Berlaku)
2. Bab Buku (*Book Chapter*) diterbitkan Nasional ber-ISBN yang terdaftar di IKAPI
3. Prosiding

Sementara itu bagi karya ilmiah yang terpilih untuk diterbitkan dalam Jurnal Internasional terindeks SCOPUS, biaya publikasi ditanggung oleh masing-masing peserta sesuai ketentuan jurnal tersebut.

Namun, malang tidak dapat ditolak, datangnya wabah pandemi Covid-19, yang memaksa seminar Internasional berbahasa Indonesia ini ditunda pelaksanaannya. Berkat kegigihan panitia yang dimotori oleh Prof. Dr. H. Yusri, S.H., M.Hum. dan dukungan dari Rektor UIR Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. dan Ketua FDGBI, Prof. Dr. Ir. Mursalim, M.Sc., akhirnya Seminar Internasional Berbahasa Indonesia oleh FDGBI yang diselenggarakan di Universitas Islam Riau di Pekanbaru Riau dapat diselenggarakan pada tanggal 24-25 September 2020.

Sebanyak 164 profesor dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta merekomendasikan kepada Pemerintah untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah internasional. Rekomendasi itu menjadi salah satu butir dari beberapa poin keputusan Webinar International yang ditaja (disponsori) Forum Dewan Guru Besar Indonesia (FDGBI) di Universitas Islam Riau (UIR). Temu ilmiah yang berlangsung secara daring melalui kanal *Youtube (virtual live on youtube)* itu berakhir pada Jumat sore (25/09 2020).

Webinar bertajuk, 'Maju Bersama Kita Berjaya' dibuka Kamis, 24 September 2020, pagi hari oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia yang diwakili Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Prof. Dr. R. Agus Sartono, M.B.A. itu didukung oleh 31 PTN dan PTS. Sejumlah pembicara berskala nasional dan internasional hadir menyampaikan kertas kerja

dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Tindak Lanjut: Jejaring Cendekiawan ASEAN (*ASEAN Scholar Network*)

Beberapa tokoh yang terlibat pemikiran ini (Prof. Koentjoro dari UGM, Prof. Tarkus Suganda dari Unpad, Prof. Roseline dari Universitas Malaysia Kelantan, dan Prof. Komaruddin Said dari Universitas Kebangsaan Malaysia) mulai mengembangkan jejaring Internasional yang diberi nama *ASEAN Scholar Network*. Jejaring ini meskipun bernama *ASEAN Scholar Network* namun ada beberapa orang diaspora penutur bahasa Indonesia dari USA (Murray University dan Warren Wilson College) yang bergabung dalam jejaring ini.

Selanjutnya pada pertemuan daring pertama yang dilakukan pada tanggal 23 Desember 2020, pertemuan pertama ini menyepakati hal-hal, sebagai berikut:

1. *Terms of Reference of the ASEAN Professors Network:*
 - a. *To establish linkages and promoting professors within the ASEAN and other international fraternity.*
 - b. *To conduct intellectual discourse related to any issues impacted policy development.*
 - c. *To act as resource network that can benefits any institutions and societies across within and across the region.*
 - d. *To collaborate in any intellectual activities i.e public lectures, research, conference and seminars and public advocacy.*

“Jejaring ini meskipun bernama *ASEAN Scholar Network* namun ada beberapa orang diaspora penutur bahasa Indonesia dari USA (Murray University dan Warren Wilson College) yang bergabung dalam jejaring ini”.

2. *Organization*

<i>President</i>	: Prof. Drs. Koentjoro, M.B.Sc., Ph.D. (UGM - Indonesia)
<i>Vice President</i>	: Prof. Dr. Roselina Binti Ahmad Saufi (UMK, Malaysia)
<i>Secretary</i>	: Prof. Dr. Ir. Tridjoko Murtie (UGM - Indonesia)
<i>Country Representative:</i>	
Indonesia Barat	: Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H. (UI, Indonesia) Prof. Ir. Tarkus Suganda, M.Sc., Ph.D. (Unpad, Indonesia)
Indonesia Tengah	: Prof. Dr. Farida Patitinggi, S.H., M.H. (Unhas, Indonesia) Prof. Dr. Andri Patton, M.Si. (Univ. Borneo, Indonesia)
Indonesia Timur	: Prof. Dr. Ir. Philipus Betaubun, M.T. (Unimus, Indonesia) Prof. Dr. Alo Liliweri, M.S. (Universitas Nusa Cendana, Indonesia)
Malaysia	: Prof. Dr. Kamaruddin M. Said (Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia)
Thailand	: Prof. Dr. Syukree Langputeh (Pathoni University, Thailand)
Brunei	: Prof. Nurdeng Deuraseh (Universitas Islam Sultan Sharif, Brunei, Darussalam)

3. *Aktivitas/Kegiatan*

Diusulkan untuk dilakukan kegiatan seminar bulanan dengan pembicara bergiliran tiap negara diatur oleh Presiden. Pemilihan wakil negara dilakukan oleh perwakilan negara dan aktivitas seminar dilakukan dengan tuan rumah (*host*). Tuan rumah yang mengatur jalannya seminar termasuk menyediakan fasilitasnya (*E-Certificate*). Seminar daring pertama akan dilakukan pertengahan bulan Januari 2021. Tuan rumah seminar daring pertama adalah dari Universiti Malaysia Kelantan (UMK). Adapun pembicara dan topiknya, sebagai berikut:

- a. Prof. Drs. Koentjoro, M.B.Sc., PhD (Universitas Gadjah Mada, Indonesia): Psikologi dan perubahan sosial.
- b. Prof. Dr. Kamaruddin M. Said (Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia): Peradaban Manusia Kehadapan.
- c. Prof. Dr. Syukree Langputeh (Pathoni University, Thailand): Sistem Pendidikan Global
- d. Prof. Dr. Roselina Binti Ahmad Saufi (Universiti Malaysia Kelantan, Malaysia):
- e. Pembangunan Modal Insan (Impak Ke Atas Sumber Daya Manusia).
- f. Moderator dalam seminar daring tersebut adalah

- Prof. Dr. Marwan Ramli (Unsyiah, Indonesia).
- g. Seminar kedua akan dilakukan pertengahan Februari dengan tuan rumah/asisten tuan rumah: Prof. Dr. Kamaruddin M. Said (Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia)/ Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H. (Universitas Indonesia, Indonesia) dengan topik: Persoalan Laut China Selatan.
- h. Di samping itu akan direncanakan ke depannya sinergi FDGBI dan ASEAN Scholar Network yang menyepakati untuk mengembangkan kegiatan terkait kebijakan pemerintah tentang Kampus Merdeka dan Nusantara Raya Jaya; menerbitkan buku, jurnal yang terindeks SCOPUS; dan menjalin jejaring dengan membentuk kelompok WhatsApp/WhatsApp group (WAG) berbahasa Indonesia dengan memanfaatkan penutur berbahasa Indonesia di seluruh dunia.

Penutup

Bahasa Indonesia sebagai bahasa identitas nasional bangsa Indonesia merupakan kristalisasi perjuangan bangsa Indonesia melalui Sumpah Pemuda hasil Kongres Pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober

ISU PSIKOLOGI TERKINI**BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA ILMIAH**

1928. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang berkembang menjadi bahasa perantara (*lingua franca*), terus menjadi bahasa nasional, dan bahasa resmi negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia merupakan bahasa baku, terbuka, dinamis seiring perkembangan masyarakat sebagai dampak pembangunan nasional.

Secara geografis, Indonesia adalah negara yang besar dan luas yang berdasarkan jumlah penduduknya termasuk 4 besar di dunia. Letaknya yang strategis di khatulistiwa menjadikan Indonesia menjadi negara yang subur, kaya akan aneka macam hayati. Karenanya tidak aneh jika banyak SDM Indonesia yang menonjol, lulus dari Perguruan Tinggi terkenal dunia, menjadi tokoh dan bahkan kemudian menjadi diaspora. Namun demikian, mengapa hanya beberapa Perguruan Tinggi Indonesia yang memiliki peringkat (*ranking*) dunia di atas 250, bahkan banyak yang masih di atas 1000? Bahkan hanya 1 (satu) universitas yang masuk pada *ranking* 10 besar di ASEAN? Mengapa mobilitas Dosen Indonesia tidak selincah dosen di negara maju? Banyak faktor yang diduga mempengaruhi, salah satunya adanya keterbatasan dan belum diakuinya bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional. Ironisnya, bahasa resmi ASEAN adalah Bahasa Inggris. Padahal, dengan penutur lebih dari 199 juta, bahasa Indonesia sebagai rumpun bahasa Austronesia dialek bahasa Melayu adalah satu-satunya dari yang muncul dalam daftar sepuluh bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Belum diakuinya bahasa Indonesia sebagai bahasa Internasional ini bukan saja mempengaruhi kelincahan fisik para penuturnya, tapi juga komunikasi dan interaksi baik ilmiah-non ilmiah, maupun formal-non formal. Bahkan akan berpengaruh pada rasa bangga dan nasionalisme warganya. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang hebat. Pertanyaan yang diulas solusinya dalam tulisan ini adalah apakah hanya karena persoalan bahasa penghargaan internasional yang seharusnya pantas menjadi hak kita, tidak dapat kita peroleh?

Dapat disimpulkan bahwa gerakan mengampanyekan Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah internasional sangatlah diperlukan. Dari uraian kegiatan di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Telah adanya pengakuan dari cendekiawan internasional tentang Bahasa Indonesia sebagai bahasa Ilmiah Internasional.
2. Menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa Ilmiah Internasional sebagai perantara mencapai tujuan menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa Internasional PBB.
3. Menjalin komunikasi dengan berbagai pihak dan peningkatan penggunaan Bahasa Indonesia dalam forum kegiatan Internasional.
4. Secara serius dan terencana perlu adanya kampanye yang terus menerus dan sinergi dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) RI, melalui pertemuan ilmiah, simposium, seminar Internasional berbahasa Indonesia, dan memanfaatkan diaspora sebagai corong perwakilan luar negeri berbahasa Indonesia.

“Mengapa hanya beberapa Perguruan Tinggi Indonesia yang memiliki peringkat (*ranking*) dunia di atas 250, bahkan banyak yang masih di atas 1000? Bahkan hanya 1 (satu) universitas yang masuk pada *ranking* 10 besar di ASEAN? Kenapa mobilitas Dosen Indonesia tidak selincah dosen di negara maju? Banyak faktor yang diduga mempengaruhi, salah satunya adanya keterbatasan dan belum diakuinya bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional”.

ISU PSIKOLOGI TERKINI**BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA ILMIAH****Daftar Acuan**

- Idham, A. F., Mubarak, A. S., & Pratiwi, I. (2016). Peran psikologi komunitas dalam mendukung kebijakan kesehatan mental. Fakultas Psikologi, Universitas Airlangga, Surabaya. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/312589521_Peran_Psikologi_Komunitas_dalam_Mendukung_Kebijakan_Kesehatan_Mental
- Kloos, B., Hill, J., Thomas, E., Wandersman, A., & Elias, M. J. (2012). *Community psychology: Linking individuals and communities*. Nelson Education.
- Koentjaraningrat. (1984). *Kebudayaan, mentalitas, dan pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Koentjoro, (2009). *Understanding community*. Materi Kuliah Visiting Professor School of Psychology and Human Development, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia (Unpublished).
- McClelland, D. C. (1987). *Human motivation*. New York: University of Cambridge.
- Nugraheni, M. (2018). Jumlah Sekolah Internasional di Indonesia Terus Bertambah Terutama oleh keluarga lokal dan ekspatriat Asia. Diakses dari <https://parenting.dream.co.id/diy/jumlah-sekolah-internasional-di-indonesia-terus-bertambah-1808131.html> pada 13 Agustus 2018.
- Rappaport, J. (1981). In praise of paradox: A social policy of empowerment over prevention. *American Journal of Community Psychology*, 9, 1–25.
- Rappaport, J. (1987). Terms of empowerment/exemplars of prevention: Toward a theory for community psychology. *American Journal of Community Psychology*, 15, 121–148.
- Setiawan, S. R. D. (2019). RI Peringkat 61 Dunia dalam Kemampuan Berbahasa Inggris, Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2019/12/15/085200526/ri-peringkat-61-dunia-dalam-kemampuan-berbahasa-inggris-pada-15-Desember-2019>.
- Wertz, Frederick J., Charmaz, K., McMullen, L. M., Josselson, R., Anderson, R., & McSpadden, E. (2011). *Five ways of doing qualitative analysis: Phenomenological psychology, grounded research, discourse analysis, narrative research and intuitive inquiry*. New York, NY: The Guilford Press. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/281562724_Five_Ways_of_Doing_Qualitative_Analysis_Phenomenological_Psychology_Grounded_Theory_Discourse_Analysis_Narrative_Research_and_Intuitive_Inquiry
- Yulianingsih, Y. (2020). Bahasa Indonesia masuk daftar paling banyak digunakan di dunia. *Liputan 6 Internasional*. 17 September 2020. Diakses dari <https://www.liputan6.com/global/read/4358855/bahasa-indonesia-masuk-daftar-paling-banyak-digunakan-di-dunia>

Lampiran**ORGANIZING COMMITTEE**

Seminar Internasional Berbahasa Indonesia FDGBI 2020

Steering Committee

1. Prof. Dr. H Syafrinaldi SH, MCL (Universitas Islam Riau, Indonesia)
2. Prof. Stefan Koos (Universitaet der Bundeswehr Munchen, Germany)
3. Prof. Dr. Kamaruddin Mohd Said (The National University of Malaysia)

ISU PSIKOLOGI TERKINI**BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA ILMIAH**

4. Assoc. Prof. Siriporn Maneechukate (Maejo University, Nong Han, Chiang Mai. Thailand)
5. Dr. Haji Norarfan Bin Haji Zainal (Rektor Univ.Islam Sultan Syarif Ali, Brunei)

General Chair

1. Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum (Universitas Islam Riau, Indonesia)

General Co-Chair

1. Dr. Evizal Abdul Kadir, ST., M.Eng (Universitas Islam Riau, Indonesia)

Technical Programme Chair

1. Yudhi Arta, S.T, M.Kom (Universitas Islam Riau, Indonesia)

Programme Committee

1. Prof. Drs. Koentjoro. MBSc. Ph.D (Universitas Gadjah Mada, Indonesia)
2. Prof. Dr. Ir. Mursalim (Universitas Hasanuddin Makasar, Indonesia)
3. Prof. Dr. Marwan (Universitas Syah Kuala Aceh, Indonesia)
4. Prof. Dr. Ir.Nadjadi Anwar M.Sc (Institute Teknologi 10 Nopember (ITS) Indonesia)
5. Prof. Dr. Ellydar Chaidir., M.Hum (Universitas Islam Riau, Indonesia)
6. Prof. Dr. Hasan Basri Jumin., M.Sc (Universitas Islam Riau, Indonesia)
7. Prof. Dr. Sufian Hamim., M.Si (Universitas Islam Riau, Indonesia)
8. Prof. Dr. Sri Indrastuti., M.Si (Universitas Islam Riau, Indonesia)
9. Prof. Dr. H. Detri Karya., MA (Universitas Islam Riau, Indonesia)
10. Prof. Dr. Seno Himala Putra., M.Pd (Universitas Islam Riau, Indonesia)
11. Prof. Dr. Sugeng Wiyono., MT (Universitas Islam Riau, Indonesia)
12. Prof. Dr. Rizal Rahman Razman (University Kebangsaan Malaysia, Malaysia)
13. Prof. Dr. Roselina binti Ahmad (Univ Kelantan Malaysia, Malaysia)
14. Prof. Dr. dr. Nurpudji Astuti Daud, MPH. (Universitas Hasanuddin d, Indonesia)
15. Prof. dr. Budi Sampurna, DFM., S.H., Sp.F(K), SpKP (Universitas Indonesia, Indonesia)
16. Prof. Dt. Sri Muh Nasir (Malaysia)
17. Prof. Dr. Lasiyo, M.A., M.M. (Universitas Gadjah Mada, Indonesia)
18. Prof. Dr. H. Setya Yuwana, M.A (Universitas Negeri Surabaya, Indonesia)
19. Prof. Dr. Drs. Boerhan Nurgiyantoro, M.Pd (Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia)
20. Ass. Prof. Dr. Fonny Hutagalung (University of Malaya, Malaysia)
21. Prof. Assoc Prof. Ceng Siripon (Thailand)
22. Prof.Ir. Tarkus Suganda, M.Sc.,Ph.D. (Universitas Padjadjaran)
23. Prof Hadi Susilo (Institut Pertanian Bogor)
24. Prof.Dr.Ir. Budimawan, DEA (Universitas Hasanuddin Makasar, Indonesia)
25. Dr. Zulkifli Rusbi S.Ag.,MA (Universitas Islam Riau, Indonesia)
26. Dr. Prima Wahyu Titi Sari., M.Si (Univesitas Islam Riau)

Publication and Relationship Chair

1. Panji Rachmat Setiawan, S.Kom., MMSI (Universitas Islam Riau, Indonesia)
2. Ridzqi Akbar Ramadhan, S.Kom., M.Kom., CHFI (Universitas Islam Riau, Indonesia)

Financial Chair

1. Dr. Azwirman., S,E., M.Acc, CPA (Universitas Islam Riau, Indonesia)



ISU PSIKOLOGI TERKINI

BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA ILMIAH

SEMINAR INTERNASIONAL BERBAHASA INDONESIA FDGBI 2020
Forum Dewan Guru Besar Indonesia
 7-9 April 2020, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia
"MAJU BERSAMA KITA BERJAYA"

Pembicara Utama :

Pemakalah Utama Klaster :

LATAR BELAKANG
 Seminar Internasional pertama berbahasa Indonesia ini digelar oleh Forum Dewan Guru Besar Indonesia (FDGBI) menunjuk Universitas Islam Riau sebagai tuan rumah dengan sasaran menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional berdasarkan deklarasi FDGBI Surabaya, sekaligus mengimplementasikan PP No 63/2015.

CATATAN
 - Pemakalah ilmiah ditutamakan memiliki jabatan akademik minimal Lektor
 - Semua naskah karya ilmiah yang LOGIS akan dipublikasikan dalam :
 1. Jurnal Internasional terindeks Scopus/Sinta 2 (Syarat Ketertarikan Berikat).
 2. Book Chapter diterbitkan Nasional berISBN yang terdaftar di IKAPI
 3. Prosiding
 - Bagi Karya Ilmiah yang terpilih untuk diterbitkan dalam Jurnal Internasional terindeks SCOPUS, biaya publikasi ditanggung oleh masing-masing peserta sesuai ketentuan jurnal tersebut.
 - Info lebih lanjut tentang layanan publikasi artikel pada seminar dapat menghubungi narasumber.

NARAHUBUNG
<http://seminarfdgbi.uir.ac.id>
 Dr. Banggi Ade Febrian, S.P., M.Pd (+628376500007)
 Dr. Enni Ahsanul Huda, M.Pd (+62817375729)
 Pung Rachmat Setiawan, S.Kom., MEd (+6281330108083)

KLASTER ARTIKEL ILMIAH
 - Klaster Sosial Humaniora dan Hukum
 - Klaster Agrikompleks
 - Klaster Kesehatan dan Kadokteran
 - Klaster Sains dan Teknologi
 - Klaster Agama dan Filsafat
 - Klaster Pendidikan

JADWAL PENGIRIMAN KARYA ILMIAH
 Batas Pengiriman : 2 Maret 2020, 23:59 WIB
 Pemberitahuan Penulis : 8 Maret 2020
 Batas Pendaftaran : 30 Maret 2020, 23:59 WIB
 Jadwal Seminar : 7-9 April 2020

BIAYA SEMINAR
 Pemakalah : Rp. 750.000,-
 Fasilitas : (Sertifikat, Seminar Kit, Book Chapter, FDGBI, Sinar)
 Partisipan : Rp. 500.000,-
 Fasilitas : (Sertifikat, Seminar Kit, Sinar)
 Metode Pembayaran :
 Nama Akun : Universitas Islam Riau
 No. Rekening : 011 Brg Kesugihan
 Bank Syariah Mandiri
 Nomor Rekening : 7082010000000000
 KX 001 Pekanbaru
 Cabang : BANGKALUA

Scopus Google
 Informasi lebih lanjut dapat diperoleh :
<http://seminarfdgbi.uir.ac.id>

For latest info 08/04/2020

DEKLARASI
Forum Dewan Guru Besar Indonesia
tentang
Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Ilmiah Internasional

Kami, peserta Musyawarah Internasional dan Seminar Forum Dewan Guru Besar Indonesia (FDGBI) IV yang dihadiri oleh 254 orang dari 32 delegasi Dewan Guru Besar dan para pakar/praktisi internasional penggunaan bahasa Indonesia di luar negeri, setelah mempertimbangkan paparan dan diskusi pleno bahwa;

1. Bahasa Indonesia telah memenuhi persyaratan sebagai bahasa internasional karena sampai saat ini sudah diajarkan di 45 negara;
2. Memiliki kosakata lebih dari 100.000 dan istilah keilmuan di berbagai disiplin ilmu yang mencakup;
3. Jumlah penutur di Indonesia lebih dari 267.000.000 orang dan bahasa Indonesia dipahami dengan baik oleh jutaan orang di berbagai negara, terutama negara-negara ASEAN;
4. Bahasa Indonesia diproyeksikan akan menjadi bahasa pengantar dalam kegiatan perekonomian penting sehingga dipelajari oleh berbagai negara.

bersepakat mendeklarasikan:

Kami Ilmuwan Nusantara bersepakat dan berjanji untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah internasional.

Deklarasi ini disertai pula dengan rekomendasi terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari deklarasi ini.

Kampus Universitas Negeri Surabaya,

6 November 2019

Prof. Kamaruddin M. Said (Malaysia)

Endang Asri Widartama, BBA (Singapura)

Ass. Prof. Siriporn Maneechukate (Thailand)

Prof. Mursilim (Ketua FDGBI Indonesia)

Prof. Koentjoro (Dewan Pakar FDGBI)

Prof. Setya Yuwana (Unesa)

LIPUTAN KHUSUS

Hidup Sehari-hari adalah Laboratorium yang Nyata, Menghasilkan Pengetahuan untuk Menjawab Kebutuhan Masyarakat

Risa Permanadeli
Pusat Kajian Representasi Sosial



Pada tanggal 10 November 2020, redaktur dan reporter *Psikologi Indonesia*, Juneman Abraham, melakukan wawancara dengan **Risa Permanadeli**. Risa merupakan peneliti, pendiri, dan direktur Pusat Kajian Representasi Sosial. Latar keilmuan psikologi dengan pendekatan representasi sosial, pengalaman berada di *École des Hautes Études en Sciences Sociales*, dan juga perjalanan penelitiannya dalam menggali isu-isu *indigenous* fundamental dalam masyarakat yang melampaui pengkotakan disiplin ilmu menjadikan pendapatnya akan gagasan merdeka belajar, relevansi laboratorium, dan persoalan pendidikan tinggi secara umum menarik untuk didengar. Berikut wawancara tersebut.

Ada statement bahwa dalam merdeka belajar peserta didik dapat menjadi tuan dalam pendidikannya. Adakah tanggapan terkait hal ini dan merdeka belajar secara umum?

Yang menarik buat saya adalah melihat reaksi bagaimana orang-orang universitas merespon gagasan tersebut. Benarkah peserta didik menjadi tuan? Yang menarik justru lembaga pendidikan tidak bertuan karena mereka tidak mempertanyakan soal “merdeka” itu bagaimana.

Mereka hanya menerima instruksi dari atas, kemudian mencoba menerjemahkan. Akan tetapi mereka tidak mencerna dahulu, apa saja perbedaan dengan yang kemarin, apa yang sedang dikoreksi, dalam hal apa “menjadi merdeka”, peluang apa yang dimungkinkan untuk muncul. Hal-hal tersebut tidak pernah dipersoalkan. Ibarat rumah, orang

LIPUTAN KHUSUS**HIDUP SEHARI-HARI ADALAH LABORATORIUM YANG NYATA**

hanya mengatakan, “Dahulu rumah joglo, sekarang trennya rumah minimalis. Jadi dalam rumah minimalis barangnya tidak banyak supaya semua orang bisa bergerak bebas.” Lalu, semua orang hanya menggeser atau melepas barang-barang, tetapi ia tidak tahu, “Mengapa saya harus menjadi minimalis?” Artinya, ini soal apa pertarungan yang sedang saya bayarkan dengan mengubahnya dari pendidikan sebelumnya.

Jadi yang menjadi titik tekan adalah pada reaksinya?

Menurut saya itu lebih menarik. Ini tanggapan saya sebagai peneliti ilmu sosial ya. Saya lihat universitas ternyata tidak menjadi rumusan sebagaimana dinyatakan oleh orang-orang Yunani dulu di mana universitas atau akademia sebagai tempat berpikir. Saat ini, mereka kebanyakan menjadi pelaku administrasi. Jadi mereka hanya mengubah agar bagaimana gagasan itu diterjemahkan dalam kegiatan administratif.

Jika mengacu pada perubahan, maka kita bisa lihat titik mulanya yang bergeser ke kondisi seperti apa. Jika dilihat dari lawan kata merdeka, maka sebenarnya adalah terjajah. Adakah tanggapan terkait gagasan dan pemikiran Merdeka Belajar di Indonesia sebelum hal ini digaungkan oleh Mendikbud?

Menurut saya juga yang lebih mendasar adalah apakah Menteri mengetahui pendidikan di Indonesia. Apabila beliau tahu, saya yakin beliau tidak akan dengan mudah melontarkan Merdeka Belajar. Sebab, dalam perspektif sejarah, sekolah terlebih pendidikan tinggi di Indonesia sejak awalnya tidak pernah menjadi tempat bagi orang untuk mencari kebenaran. Pada sejarah dunia, di Eropa, kehadiran lembaga pendidikan tinggi sebenarnya menggantikan kehadiran Gereja sebagai lembaga yang memonopoli kebenaran. Setelah Gereja ‘selesai ceritanya’, orang-orang mencari kebenaran di universitas. Orang-orang di universitas inilah yang mengolah pengetahuan dengan bagaimana menjawab masalah yang hadir di masyarakat. Pengetahuan adalah representasi dari

kebenaran. Jawaban dari universitas tersebut bisa menjadi alternatif kebenaran. Disebut “Alternatif” karena setiap saat masyarakat berkembang. Jawaban yang bisa diberikan oleh warga universitas itu juga bisa berganti mengikuti zamannya. Sejarah Pendidikan di Indonesia tidak mempersoalkan itu. Pendidikan tinggi di tempat kita “tidak bersoal” tentang kebenaran. Hal ini menjelaskan mengapa “tidak ada” penelitian atau hanya simplifikasi belaka. Salah satu pendekatan untuk sampai pada kebenaran adalah dengan meneliti, mengamati, memahami apa yang sedang terjadi, kemudian memikirkan banyak kemungkinan untuk memberikan *insight* tentang fenomena.

“Lembaga pendidikan tidak bertujuan karena mereka tidak mempertanyakan soal “merdeka” itu bagaimana. Mereka hanya menerima instruksi dari atas, kemudian mencoba menerjemahkan. Akan tetapi mereka tidak mencerna dahulu, apa saja perbedaan dengan yang kemarin, apa yang sedang dikoreksi, dalam hal apa “menjadi merdeka”, peluang apa yang dimungkinkan untuk muncul.

Saya lihat universitas ternyata tidak menjadi rumusan sebagaimana dinyatakan oleh orang-orang Yunani dulu di mana universitas atau akademia sebagai tempat berpikir. Saat ini, mereka kebanyakan menjadi pelaku administrasi. Jadi mereka hanya mengubah agar bagaimana gagasan itu diterjemahkan dalam kegiatan administratif”.

LIPUTAN KHUSUS**HIDUP SEHARI-HARI ADALAH LABORATORIUM YANG NYATA**

Bukankah dalam surat kabar juga banyak akademisi menulis opini yang mengutip bahwa itu juga berdasarkan hasil pengamatan mereka?

Perlu dicatat bahwa opini seperti yang marak di surat kabar bukanlah kebenaran alternatif yang dapat digugat secara akademik.

Apakah bisa dijelaskan tentang “tidak ada” penelitian dan kondisinya dalam penelitian sosial?

Mengapa “tidak ada” penelitian atau hanya simplifikasi? Mengapa penelitian tidak pernah dijadikan dasar pengambilan keputusan? Tidak perlu bicara dahulu tentang penelitian kebenaran yang sangat akademik. Kita bicara saja penelitian aplikatif yang melihat bagaimana kompleksitas yang ada di masyarakat. Bukan hanya simplifikasi (penelitian) dengan mengatakan, “Ini bisa dilakukan. Ini tidak bisa dilakukan” tanpa menjelaskan “mengapa”.

Ketika saya ke Meksiko sebelum 2010 di mana saat itu ada konferensi internasional. Saya bertanya ke teman saya di Meksiko, “Ada penelitian apa?” Dia menjawab, “Kota-kota bekas jajahan Spanyol di Meksiko selalu mencontoh Madrid dan Barcelona dan kami di universitas sedang membuat penelitian sistem transportasi publik seperti di Kolombia. Meksiko sangat macet. Kalian di Jakarta punya penelitiannya? Kami sudah penelitian selama dua tahun. Apakah kami bisa memperoleh kajian dari sistem *busway* di Jakarta?” Saya lalu menghubungi TransJakarta, Kementerian Pekerjaan Umum, bahkan secara informal (*keyperson* yang memiliki akses untuk mengeluarkan data), tidak ada jawaban. Setahun kemudian, saya baru tahu ternyata tidak pernah ada penelitian. Jadi ter jelaskan mengapa lalu lintas kita tetap macet, mengapa ibukota tetap *chaotic*. Ini contoh sederhana mengapa kita tidak pernah menganggap bahwa mengetahui masalah dengan benar berdasarkan prinsip penelitian itu penting. Ini tidak sekadar melakukan simplifikasi penelitian. Jika masalahnya kompleks, maka kita mesti menerima kompleksitas masalah penelitian tersebut.

Jadi berkaitan dengan pembicaraan sebelumnya, maka seharusnya peran Laboratorium itu seperti apa?

Saya turut mengajar di Indonesia, namun saya ingat pada pengalaman saya di lembaga pendidikan tinggi di Prancis di mana profesornya adalah pembuat teori. Jika di sosiologi ada Bourdieu, di filsafat ada Derrida, dan di psikologi ada Moscovici. Lembaga pendidikan tinggi seharusnya adalah tempat di mana orang-orangnya memang menjadi peneliti. Penelitian didukung kebijakan dari negara dengan memberi sejumlah fasilitas yang memungkinkan sehingga mereka bisa bebas berpikir. Inilah Merdeka dalam arti yang sepenuhnya. Jadi laboratorium itu untuk mengembangkan teori. Misalnya, saya belajar representasi sosial. Dahulu, di tempat saya belajar ada dua laboratorium, yaitu laboratorium psikologi sosial dan laboratorium representasi sosial (psikologi sosial Eropa). Di laboratorium yang kedua, dipelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan Eropa. Misalnya, tentang imigran. Selain itu juga soal internet. Di awal 2000-an, semakin banyak orang menggunakan internet di mana email mulai dipakai. Salah satu penelitian yang penting di sana saat itu—yang mungkin tidak dianggap penting di Indonesia—adalah melihat langgam percakapan di dalam email. Salah satu temuannya adalah oralitas, yaitu ketika orang menulis email, maka ia seperti berbahasa lisan yang seolah-olah sedang berhadapan. Yang menarik adalah representasi teknologi ternyata bukan semata-mata benda mati, melainkan sesuatu yang hidup dan menghadirkan ketiadaan kehadiran manusia yang digantikan teknologi. Jadi teknologi justru dihidupkan dengan langgam berbahasa.

Setelah itu, saya kembali ke Indonesia. Ternyata saat itu kita masih bersoal dalam kategori “besar”, misalnya apa artinya Demokrasi. Ini masih terlalu jauh dari kehidupan nyata yang dijalani banyak orang. Kalau di sana (Eropa), mereka sudah masuk pada praktik hidup sehari-hari. Laboratorium sejatinya membawa kenyataan hidup masyarakat sehari-hari dan merumuskannya ke dalam sebuah pengetahuan. Di tempat kita, laboratorium sosial

LIPUTAN KHUSUS**HIDUP SEHARI-HARI ADALAH LABORATORIUM YANG NYATA**

adalah yang secara visual harus seperti laboratorium eksakta yang seolah-olah harus mengambil sesuatu secara “serius”. Padahal semakin “serius”, dalam arti mengambil topik yang jauh dari keseharian kita, semakin ia tidak memproduksi pengetahuan dan semakin membuat universitas tidak terhubung dengan kehidupan yang nyata dari masyarakat.

Sejarah Psikologi memang menekankan laboratorium Wundt walaupun saat ini juga ada kesadaran bahwa Wundt ternyata juga menuliskan tentang antropologi. Namun, tonggak psikologi dianggap sebagai ilmu yang mandiri ketika ada eksperimen dalam laboratorium. Nah, sepertinya kita ingin mencoba meniru laboratorium yang memiliki perangkat teknis, seperti yang dapat mengukur waktu reaksi dan sebagainya. Seringkali kita berpikir jika tidak ada perangkatnya, maka bukan laboratorium. Adakah tanggapan lanjut terkait hal ini?

Sebelum berbicara soal ini, ada fenomena dari masyarakat bekas jajahan. Fakultas yang ada saat itu adalah yang paling dibutuhkan penjajah adalah Mister dan Dokter (Fakultas Hukum dan Fakultas Kedokteran). Ketika itu, untuk mendatangkan dokter dari Belanda terlalu mahal; untuk mengatur masyarakat harus ada pelaku hukum (Mister). Inilah awalnya pendidikan tinggi di Indonesia. Sejarah universitas di Indonesia memang bukan untuk menawarkan alternatif kebenaran, melainkan membuat priyayi. Perkembangannya, fakultas Hukum hingga saat ini tetap yang terlaris; Kedokteran menjadi suatu elitisme akademik. Setelah stabilisasi politik mulailah segala ilmu mulai dikenal.

Lalu, apakah psikologi dalam konteks kita adalah untuk mengetahui kebenaran tentang *psyche* kita? Tidak juga. Karena dalam satu sejarahnya, psikologi itu juga berkembang dari pedagogi pengajaran. Programnya adalah mendidik orang, tetapi bukan dalam arti menawarkan kebenaran, melainkan agar peserta program dapat mendidik orang lain (program guru).

Jadi persoalannya adalah bagaimana laboratorium sosial itu terhubung di masyarakat. Walaupun eksperimen juga tak

selalu ada di laboratorium tertutup dengan manipulasi yang ketat, tetapi juga bisa jadi lapangan, semisal eksperimen perilaku prososial di mana seseorang menjatuhkan buku di keramaian lalu dilihat bagaimanakah reaksi orang di sekitar. Adakah tanggapan soal ini?

Sebenarnya tidak ada masalah dengan eksperimen, baik eksperimen laboratorium maupun eksperimen yang lebih *loose*. Namun, kita harus memahami dahulu masalah yang sedang kita teliti. Misalnya, eksperimen perilaku prososial, eksperimenter menjatuhkan buku untuk melihat apakah orang lain akan menolong; siapa yang lebih menolong, laki-laki atau perempuan, orang tua atau anak-anak. Kalau saya akan bertanya, “Buku yang jatuh itu dapat dianggap kecerobohan ataukah kecelakaan?” Ada konteks sosial antropologisnya. Hal ini yang sering diabaikan. Karena konteksnya diabaikan, kita cenderung hanya memberikan data, tetapi tidak memberikan pemahaman tentang masalah itu bagi masyarakat. Dalam contoh tadi, semisal yang menolong ternyata lebih banyak perempuan, lalu apa yang mau disampaikan? Apakah kita ingin menyampaikan bahwa perempuan ternyata tidak hanya *nurturing*, tetapi juga membuat *order* tentang hubungan manusia? Apakah ketika ada ketidakseimbangan atau ada yang butuh pertolongan, maka mereka (perempuan) akan maju? Lalu bagaimana sosok perempuan direpresentasikan secara sosial dalam masyarakat? Apa kaitannya

“Di tempat kita, laboratorium sosial adalah yang secara visual harus seperti laboratorium eksakta yang seolah-olah harus mengambil sesuatu secara “serius”. Padahal semakin “serius”, dalam arti mengambil topik yang jauh dari keseharian kita, semakin ia tidak memproduksi pengetahuan dan semakin membuat universitas tidak terhubung dengan kehidupan yang nyata dari masyarakat”.

LIPUTAN KHUSUS**HIDUP SEHARI-HARI ADALAH LABORATORIUM YANG NYATA**

dengan pendidikan perempuan? Ini tidak dibicarakan. Jadi kita hanya berhenti pada data, tetapi tidak membaca itu sebagai sebuah fenomena antropologis yang dengan sendirinya terhubung dengan mekanisme psikologis.

Ini menunjukkan seakan memang orang psikologi seperti kurang akrab dengan bacaan antropologi dan sosiologi; dan jika dalam konteks perkuliahan seakan kita tidak akan mendapatkan bacaan tersebut jika tidak mengikut perkuliahan Ilmu Budaya Dasar. Adakah tanggapan terkait hal ini?

Ini lagi-lagi awalnya adalah satu sejarah psikologi yang muncul dari pedagogi. Jadinya akhirnya adalah mengajar “orang lain”. Mengajar “orang lain” di sini dalam konteks negara bekas jajahan. Asumsinya, yang mengajar selalu lebih pintar. Tahun 1970-an, dengan proses modernisasi yang ada, masyarakat Indonesia menjadi lebih kompleks dan kaya (misal, ada perminyakan, investasi asing), lebih berprestasi, dan lebih kompleks, lebih berdiferensiasi (misal, konon Jawa tidak lagi satu wajah begitupun Sunda). Saat itu, dibutuhkan cara untuk memahami mengapa ada diferensiasi dalam modernisasi. Mulailah psikologi melebar dari pedagogi berurusan dengan orang-orang yang tidak bisa beradaptasi dengan proses modernisasi. Kita bicara tentang orang-orang yang mengalami stres, deviasi, dll. Psikologi tiba-tiba menjadi ilmu yang sifatnya kuratif. Berkembanglah awal-awal psikologi klinis, psikoterapi, dsb. Lantas, ekonomi Indonesia berkembang lebih jauh, ada konsumsi berlebihan, muncullah psikologi konsumen, dsb. Pertanyaannya, apakah seluruh pengetahuan yang diberi label “psikologi” itu membuat kita mengerti tentang diri kita?

Bukankah itu memang klaim psikologi di mana ia membantu pemahaman tentang diri yang tidak hanya mendeskripsikan, tetapi juga memprediksikan, dan mengontrol?

Kalau psikologi memang membuat kita mengerti tentang diri kita, lalu mengapa muncul *Indigenous Psychology* yang menyatakan bahwa teori-teori psikologi itu ternyata tidak berlaku untuk

masyarakat non-Barat? Artinya, kita seolah masuk ke dalam “wagon” atau dalam sebuah kereta panjang yang mengabaikan kenyataan diri kita sendiri.

Apakah relevan membicarakan Indigenous Psychology dewasa ini ketika sudah terjadi perjumpaan budaya melalui internet?

Ada fenomena yang sifatnya universal, yaitu fenomena alam yang fisik. Semisal, api yang dipahami di mana saja—mulai dari di kutub utara, kutub selatan, Meksiko, maupun Labuhan Bajo—sifatnya bisa membakar. Namun, jika prasangka, ingatan kolektif, atau ketidaksadaran meskipun dalam kategorinya hal-hal tersebut universal, tetapi isi dari prasangka dan ingatan kolektif tidaklah universal. Saya sebagai orang Jawa tetap mewarisi prasangka. Sebagai contoh, saya pernah ke Amerika. Karena tidak mau repot dan bisa jalan tiga hari di New York, tas saya titipkan di loker di mana yang menerima adalah orang berkulit hitam. Saya tidak punya pengalaman dengan orang berkulit hitam kecuali dari film, tetapi saya saat itu berprasangka tertentu. Jadi ada masalah konten dari setiap hal yang tetap harus kita letakkan dalam konteks masalahnya.

Lantas bagaimana seharusnya mengembangkan laboratorium psikologi dalam era Merdeka Belajar?

Prodi Psikologi ada di manapun di Indonesia. Lalu, apa yang membedakan psikologi satu dengan lainnya? Ternyata hanya administrasinya, semua sama. Ada yang mengatakan, “Kami mengembangkan kajian/laboratorium Psikologi Perkotaan.” Dasarnya apa? Seharusnya penelitian. Jika kita mengatakan akan mengembangkan psikologi masyarakat perkotaan, maka seyogyanya kita menyatakan bahwa psikologi bukan hanya tentang *psyche* individual, tetapi ada *psyche* sosial. Ini berarti harus ada bobot sosiologi, urbanisme, antropologi masyarakat, kebudayaan, *urban industry*. Pernahkah ada tersimpan dalam gagasan dari orang-orang Psikologi soal itu? Kalau kita mengatakan, “Kami mengembangkan Psikologi

LIPUTAN KHUSUS**HIDUP SEHARI-HARI ADALAH LABORATORIUM YANG NYATA**

Masyarakat Perkotaan”, “Kami Psikologi Lintas Budaya”, “Kami Psikologi Kemiskinan”, maka seharusnya bukan hanya label, melainkan ada isinya yang dibentuk dengan pengetahuan bermacam-macam yang bukan hanya psikologi saja. Kalau seperti sekarang, maka semua psikologi saat ini menjadi sama.

Saya sedang bekerja dengan laboratorium di Sao Paolo (Brazil), Tunisia, Marseille (Prancis). Mereka di Sao Paolo sebetulnya memiliki masalah yang serupa dengan Indonesia, yaitu kemiskinan. Hanya saja, *template* dari masyarakat Eropa di Brazil lebih kuat daripada Indonesia. Tidak ada jejak Eropa di Indonesia meskipun dijajah Eropa 3.5 abad. Menariknya, Indonesia tiba-tiba seolah menjadi Amerika. Brazil adalah alter ego-nya Eropa, terutama setelah Perang Dunia II, karena ada masalah dengan ideologi. Perang Dingin membuat Blok Eropa dan Amerika Latin menjadi sosialis karena yang dipersoalkan adalah mengentaskan kemiskinan dan meninggalkan kebodohan dengan jalan kesehatan dan pendidikan. Memang seolah prioritasnya sama dengan Indonesia di mana kita juga punya masalah dengan kesehatan dan pendidikan. Bedanya, mereka melihat bahwa persoalan pendidikan bukan sekadar masalah belajar dan mengajar atau pedagogis, tetapi ada juga masalah subjektivitas dalam belajar. Jadi, jika kita bicara tentang Merdeka Belajar, maka lebih relevan kita belajar dari mereka. Prinsip mereka jelas, yaitu mengentaskan kemiskinan, mencerdaskan, dan meninggalkan kebodohan.

Ketika disampaikan bahwa psikologi harus juga belajar bidang-bidang lain, lantas implikasinya seperti apakah? Apakah setiap prodi psikologi harus punya laboratorium ataukah semisal dalam fakultas dalam rumpun ilmu humaniora, maka psikologi berpartisipasi dalam laboratorium yang sama atau bagaimana modelnya?

Saya ambil contoh, sebuah penelitian yang pernah kami buat beberapa tahun lalu. Penelitian ini sederhana, yaitu ingin mengetahui mengapa tiba-tiba semua orang Indonesia berbicara bahasa

Inggris. Hal ini menarik sebagaimana dikatakan di atas bahwa kita tidak punya jejak Eropa walaupun 3.5 abad dijajah Eropa, namun tiba-tiba saat ini seolah menjadi Amerika. Kalau mau gampang, maka jawaban dari penelitian kami ya hanya sekadar bahwa sekarang zaman global di mana semuanya terhubung dan bahasa yang paling mudah menghubungkannya adalah bahasa Inggris. Apalagi *device* teknologi juga berbahasa Inggris. Namun, sebenarnya penjelasan itu tidak cukup. Kita harus tahu konteks. Kita perlu merunut ke belakang. Sejak kapan pelajaran bahasa Inggris diberikan di sekolah? Dalam konteks apa pada saat itu? Siapa yang menjadi targetnya? Bagaimana hal itu menjadi sebuah tren baru dalam gaya hidup masyarakat Indonesia? Saya pergi ke negara-negara lain yang tidak berbahasa Inggris maupun tidak berbahasa Prancis. Mereka tidak pernah merasa *minder* walau tidak bisa berbahasa Inggris atau Prancis. Mengapa? Karena watak penjajahan yang terjadi di mereka tidak melibatkan bahasa. Di Indonesia, ada watak penjajahan yang melibatkan bahasa. Dulunya, sejarah pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kolonial membagi pendidikan masyarakat menjadi dua. Orang yang boleh sekolah umumnya adalah pegawai pamong praja yang disebut sebagai sekolah level satu. Lalu sekolah *ongkoloro* atau sekolah untuk masyarakat bawah. Pada sekolah level satu ini, mereka memiliki akses untuk belajar bahasa Belanda yang kemudian diangkat sebagai priyayi. Jadi secara simbolik bahasa asing atau bahasa Belanda memiliki nilai status sosial.

Lantas bagaimana dengan bahasa Inggris? Pada 1950-an, *Ford Foundation* punya studi tentang Indonesia yang dilakukan oleh akademisi Amerika, misal Geertz. Melihat studi-studi tersebut, Amerika mengatakan bahwa melihat situasi geopolitik saat itu, maka Indonesia tidak boleh jatuh ke “kiri” dan harus diamankan. Untuk mengamatkannya adalah lewat pertanian dan bahasa Inggris. Dalam pertanian ada Padi IR, revolusi hijau. Padi dalam satu tahun bisa 3-4 kali panen. Petani harapannya kaya, lalu lupa dengan kemiskinan, sehingga harapannya gerakan komunisme tidak akan pernah

LIPUTAN KHUSUS**HIDUP SEHARI-HARI ADALAH LABORATORIUM YANG NYATA**

muncul. Terkait bahasa Inggris dibuatlah program pengajaran di IKIP Padang dan Malang. Ini awalnya. Lalu ada peristiwa politik di mana kita berpindah orientasi ke Amerika. Kita mendapatkan dukungan penuh karena secara ideologi kita didukung Amerika. Kurikulum bahasa Inggris di sekolah-sekolah bergeser. Menariknya, hasil kurikulum tersebut tidak sama, semisal di Jakarta, Makassar, Padang. Ada konteks lokal yang membuat perbedaan. Di Padang, kita mau belajar bahasa apapun, kita harus bisa bahasa Minang. Di Jakarta, ada kemudahan jarak karena jadi pintu masuk bagi siapapun orang asing. Di Yogyakarta, bahasa Inggris diwakili oleh kelompok sekolah (UGM, dsb, yang senang bahasa Inggris) yang lazimnya hidup di bagian utara Yogya, tetapi jangan harap orang di selatan mau bicara bahasa Inggris karena mereka bicara bahasa Jawa. Jadi fenomena orang berbicara bahasa Inggris tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ada resistensi, ada fasilitas, ada sejarah, ada nilai simbolik tentang hierarki kekuasaan. Ini semestinya adalah bidang dari psikologi, tetapi mau tidak mau harus melihat sejarah, sosiologi, antropologi, linguistik, dsb. Hal itu sangat sosial dan menyentuh kita semua. Laboratorium itu bukan soal sesuatu yang formal, tetapi gagasan yang harus selalu dihidupkan di kepala kita setiap saat sebagai peneliti adalah bahwa hidup sehari-hari kita adalah laboratorium yang nyata.

Ini jika dikaitkan dengan pengukuran kinerja dosen, maka laboratorium dianggap sebagai instrumen untuk memproduksi pengetahuan, tetapi kemudian pengetahuan tersebut harus diregistrasikan dalam jurnal, semisal scopus, untuk mengejar pengakuan internasional. Apakah ini penting?

Saya dibentuk oleh suatu pemikiran yang tidak pernah memikirkan itu. Yang penting menurut saya, “Kalau kamu ‘makhluk universitas’, maka apakah kamu punya *engagement* terhadap masyarakat?” Kalau iya, bagaimana menjaga kepekaan supaya *engagement* itu tetap hidup? Kalau hidup seperti ini, maka dengan sendirinya kita tidak peduli pada Scopus, Akreditasi, dsb. Akan

tetapi yang utama, “Apakah yang saya pikirkan itu memberi pemahaman tentang suatu hal sehingga bila saya sampaikan kepada masyarakat, maka masyarakat mengenal dirinya sendiri?”

Jika dihubungkan dengan pemerataan kualitas, bagaimana meningkatkan kualitas penelitian di tengah-tengah tidak meratanya pendanaan?

Saya tidak pernah percaya bahwa penelitian harus didanai dengan besar selama punya *engagement* dan kepekaan. Saya pernah meneliti tentang pesan yang ada di toilet. Dahulu kami peneliti di Prancis selalu membawa catatan (notes, agenda), kalau saya selalu bawa kamera kecil. Itu menjadi sumber data saya. Apa yang saya potret biasanya sesuatu yang berarti secara intelektual untuk mempertanyakan suatu hal walaupun saya belum tahu arahnya ke mana. Jika saya melihat sesuatu yang saya pikir, “ini pasti ada maknanya”, maka saya potret. Lalu saya menemui hal yang sama, menemui lagi, baru kemudian saya cari polanya. Yang saya lihat, kalau kita di toilet umum, itu ada pesan “dilarang jongkok” padahal toiletnya adalah toilet duduk. Terlihat sederhana bukan? Namun, ada yang mengganggu secara koherensi pikiran. Ada toilet duduk, namun tertulis dilarang jongkok. Apakah orang Indonesia selalu jongkok? Memang ternyata di toilet seperti itu, kita dengan mudah seringkali menemukan jejak sepatu. Lalu kalau memang dia jongkok, mengapa diberikan toilet duduk sehingga seolah-olah kita sedang diberikan “pelajaran” cara menggunakan

“Laboratorium itu bukan soal sesuatu yang formal, tetapi gagasan yang harus selalu dihidupkan di kepala kita setiap saat sebagai peneliti adalah bahwa hidup sehari-hari kita adalah laboratorium yang nyata”.

LIPUTAN KHUSUS**HIDUP SEHARI-HARI ADALAH LABORATORIUM YANG NYATA**

toilet. Nah, ini khas “pedagogi” itu tadi. Kita lihat juga apa yang sedang direpresentasikan oleh toilet duduk. Apakah ia benar ia sekadar “bicara” tentang toilet? Ia pasti bicara tentang masyarakat kita. Saya punya data itu banyak sekali. Saya sampai bikin penelitian tentang iklan rumah. Saya menghubungi developer lalu melihat spesifikasinya di mana selalu di kamar mandi majikan ada toilet duduk, sedangkan di kamar mandi pembantu ada toilet jongkok. Ternyata di sana ada hierarki kekuasaan. Dari mana asalnya? Kita bahkan bisa bercerita banyak hal dari pesan di toilet. Penelitian itu tidak memerlukan biaya. Artikel itu saya publikasikan di Brazil dan saya mendapat apresiasi karena saya memakai teknik yang sangat sederhana. Saat pengambilan data itu, saya hanya meminta tolong, menjelaskan, dan menulis pesan di WhatsApp soal penelitian saya tentang pesan di toilet, “Mohon jika Anda masuk ke toilet ini, foto dan kirimkan ke saya.” Saya hanya memberikan waktu satu minggu dan memperoleh hampir 200 foto dari Aceh sampai Papua. Tidak ada biaya, tetapi memikirkannya itu yang lama. Bagaimanapun dalam riset itu investasinya adalah bagaimana membuat orang selalu peka pada keadaan:

Apapun, kita pun perlu melihat, semisal di Prancis, di mana mereka tahu bahwa riset akan memberikan alternatif kebenaran yang akan dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu untuk menyelesaikan suatu masalah. Di tempat kita, masalah tidak diselesaikan dengan pencarian kebenaran yang mendasar. Kebanyakan masalah diselesaikan dengan musyawarah, tenggang rasa, dsb, sehingga praktis pertanyaan tentang kebenaran itu tidak pernah ada. Penyelesaian masalah itu selalu sama. Perguruan Tinggi sebagai laboratorium kebenaran tak pernah benar tumbuh.

Jadi apa yang bisa dilihat dari kondisi seperti ini?

Menurut saya, jika melihat mereka belajar, maka yang penting adalah melihat reaksi bagaimana orang-orang yang ada di lembaga pendidikan merespon pada lembaga tersebut. Menurut saya

yang penting adalah apakah bisa orang-orang ini “dicubit” supaya mereka bukan sekadar mengajar dan memenuhi administrasi mata kuliah, melainkan membuat semua orang yang hidup dalam atmosfer pengetahuan itu memiliki kepekaan untuk bersoal tentang apa yang ada di sekitarnya. Inilah yang pragmatik, yang nyata, di mana kita tahu bahwa apa yang disampaikan di kelas memang ada dasarnya.

Jadi jika berbicara soal laboratorium adakah hal lain untuk bisa mencapai tujuan tersebut, terutama jika melihat era revolusi industri 4.0?

Apapun itu, ketika kita menerima gagasan baru jangan hanya menjadi peraturan. Jadikanlah sebuah lompatan yang memberikan perubahan kualitatif pada pendidikan. Saya peneliti dan keluyuran sampai ke pelosok-pelosok. Saya melihat bahwa apapun intensitas dari objek modern yang hadir di tempat kita itu tetap. Misal, orang Jawa itu maunya “slamet”. Ketika saat ini orang-orang bicara *Big Data* dan *Artificial Intelligence* sebenarnya tidak ada problem, tetapi yang penting kita punya riset dasarnya. Dalam sejarahnya; Jepang, Korea Selatan, China itu mengambil, memodifikasi, dan mengembangkan teknologi, tetapi riset dasarnya terjadi di Eropa atau Amerika. Mengapa riset dasar itu mereka lakukan? Karena mereka yang mengawali modernitas dan industri. Mereka butuh itu. Mereka butuh mengetahui masyarakatnya. Dengan riset dasar, mereka tahu harus melakukan apa. Celaknya, kita—yang tidak terhubung dengan

“Apakah bisa orang-orang ini “dicubit” supaya mereka bukan sekadar mengajar dan memenuhi administrasi mata kuliah, melainkan membuat semua orang yang hidup dalam atmosfer pengetahuan itu memiliki kepekaan untuk bersoal tentang apa yang ada di sekitarnya”.

LIPUTAN KHUSUS**HIDUP SEHARI-HARI ADALAH LABORATORIUM YANG NYATA**

sejarah mereka—tiba-tiba merasa harus menjadi seperti mereka. Lantas kita mengadopsi hasil riset mereka dan mengaplikasikannya pada diri kita sendiri? Ya nggak cocok.

Saya melihat bagaimana kemajuan China yang kita tahu saat ini bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah sesuatu yang dipikirkan oleh negaranya dengan *roadmap* yang sangat sistematis, terstruktur, dan pengetahuannya terdistribusi dengan baik. Mereka tahu, “Kita harus membikin seperti ini. Lalu siapa yang bikin? belajarnya di mana? kalau bikin caranya bagaimana? siapa yang harus membiayai? dsb.” Bagaimanapun politik mencari “kebenaran” memang harus di-*share* menjadi sebuah program. Universitas lah yang seharusnya mencari kebenaran yang ditawarkan menjadi pikiran yang oleh penguasa akan diterjemahkan menjadi *policy*. Di Indonesia, Universitas tidak terhubung ke sana. Kalau pertanyaan tentang laboratorium, maka menurut saya, universitas di Indonesia saat ini wataknya atomik. Ia hidup untuk dirinya sendiri. Ia hanya peduli tentang akreditasi, jumlah mahasiswa yang diterima, serta Scopus; tetapi ia tidak hidup untuk masyarakat, apalagi untuk bangsanya. Universitas harus membuat pengetahuan yang nantinya berguna untuk masyarakat.

Selain itu, pengetahuan semestinya dapat diakses masyarakat. Ketika saya di Prancis dulu, itu uang kuliah S3 hanya sekitar IDR 1,2 juta. Terjadi kenaikan uang sekolah sebesar 200 Euro di zaman Presiden Sarkozy sehingga universitas-universitas di Prancis pada 2009 itu tutup karena protes besar. Saat itu, kelas-kelas dirantai dan digembok. Saat akhir semester di mana nilai harus masuk, universitas-universitas negeri meminjam stadion dan membuat ujian masal. Ujian masal itu gagal karena perusahaan listrik negara ternyata solider dengan masyarakat, jadi mereka matikan listriknya. Mereka menganggap kenaikan uang kuliah itu mengkhianati perjuangan rakyat. Bahwa rakyat harus memiliki akses sebesar-besarnya pada pengetahuan. Jadi kalau sekolah harus membayar

mahal, apa artinya yang namanya “Republik”?

Amerika Latin, semisal Argentina, negara yang kondisinya sama seperti kita yang punya problem kemiskinan, biaya pendidikan universitas negeri di sana adalah nol karena mereka ada untuk mengentaskan masyarakat dari kebodohan. Negara berpikir cerdas terhadap pendidikan. Ketika terjadi kudeta militer pada 1970-an di Argentina, mereka menyimpan para aktivis di kampus berbulan-bulan dan tidak ada intervensi militer di sana. Kampus menjadi kebanggaan walau fasilitas terbatas. Fasilitas tidak menjamin segalanya. Kuba adalah negara yang mengalami embargo, tetapi menjadi referensi utama kesehatan dan pendidikan di Amerika Latin. Kajian soal kanker dan literasi tertinggi di Amerika latin justru di Kuba, di tempat yang sangat terbatas fasilitasnya.

Pewawancara: Juneman Abraham
Editor: Rahkman Ardi

“Universitas di Indonesia saat ini wataknya atomik. Ia hidup untuk dirinya sendiri. Ia hanya peduli tentang akreditasi, jumlah mahasiswa yang diterima, serta Scopus; tetapi ia tidak hidup untuk masyarakat, apalagi untuk bangsanya”.

Manajemen Penyelesaian Masalah Etika dalam Psikologi

Augustinus Supratiknya
Fakultas Psikologi, Universitas Sanata Dharma

Kode Etik Psikologi Indonesia (2010), selanjutnya disingkat KEPI, mendefinisikan masalah etika dalam psikologi sebagai pelanggaran kode etik psikologi. Pelanggaran ini meliputi segala tindakan Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi yang menyimpang dari ketentuan dalam KEPI, termasuk pelanggaran terhadap janji/sumpah profesi oleh Psikolog, praktik psikologi oleh mereka yang bukan Psikolog, Psikolog yang tidak memiliki izin praktik, serta layanan yang menyimpang dari ketentuan dalam KEPI [Ps. 4, Ay. (3)]. Pelanggaran itu digolongkan menjadi tiga kategori: (1) *ringan*: tindakan Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi yang tidak sesuai standar prosedur *karena ketidak-tahuan*; (2) *sedang*: tindakan Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi yang tidak sesuai standar prosedur *karena kelalaian*; dan (3) *berat*: tindakan Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi yang *secara sengaja* memanipulasi tujuan, proses maupun hasil; yang semua itu mengakibatkan kerugian bagi ilmu psikologi, profesi psikologi, pengguna jasa layanan psikologi, individu yang menjalani pemeriksaan psikologi, dan pihak-pihak terkait dan masyarakat umum. Dalam Ay. (4) dinyatakan bahwa penjelasan tentang jenis pelanggaran dan sanksi akan diatur dalam aturan tersendiri. Namun, penjelasan yang dimaksud ternyata hingga kini belum ada (Seger Handoyo, komunikasi pribadi, 5 September 2020).

Code of Ethics and Conduct dari the British Psychological Society (2009) lebih eksplisit menyebutkan masalah etika yang mereka sebut *areas of concerns about ethical matters*, meliputi: (1) hubungan ganda, yaitu kondisi manakala psikolog memiliki afiliasi dengan sejumlah pemangku kepentingan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan; (2) hubungan pribadi, khususnya berupa pelanggaran atau bahkan pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh klien; (3) standar praktik yang tidak jelas atau tidak memadai, yaitu psikolog tidak memahami atau mengabaikan aneka sistem yang berlaku di kalangan sejawat ataupun profesional lain di bidang layanan sejenis; (4) pelanggaran konfidensialitas, yaitu psikolog melanggar atau tidak memberikan penjelasan tentang aneka ketentuan dan batasan (*constraints*) kepada para pemangku kepentingan sebelum mulai memberikan layanan yang diminta; (5) kompetensi, yaitu psikolog memberikan pengakuan yang berlebihan atau menyesatkan tentang kemampuan yang dikuasainya atau mengabaikan kewajiban melakukan tindakan yang mencerminkan kehati-hatian saat memasuki wilayah-wilayah pekerjaan atau layanan yang masih baru; (6) masalah-masalah dalam penelitian meliputi pemalsuan data, mengabaikan kewajiban meminta *consent* atau persetujuan khususnya dari responden, plagiarisme

ETIKA

MANAJEMEN PENYELESAIAN MASALAH ETIKA

atau gagal mengakui karya atau kontribusi orang lain; (7) masalah-masalah kesehatan yang mempengaruhi kinerja atau tingkah laku; dan (8) menimbulkan nama buruk bagi profesi atau organisasi profesi.

Terkait rumusan tentang jenis pelanggaran beserta sanksi yang belum kita miliki, sebuah sumber (Montgomery, Cupit, & Wimberley, 1999; "Top ethical", 2010) mengidentifikasi sejumlah masalah dan pelanggaran etika dalam praktik psikologi yang sering terjadi. Masalah etika digolongkan menjadi dua kategori, yaitu *complaints* atau pengaduan dan *malpractice* atau malapraktik. Jenis-jenis pengaduan yang sering dilayangkan oleh klien terhadap psikolog meliputi: perbuatan tidak senonoh secara seksual terhadap klien, ketidakadilan dalam pengambilan keputusan hak asuh anak, pelanggaran konfidensialitas, perbuatan tidak senonoh secara seksual terhadap mahasiswa, penggunaan teknik yang berbeda terhadap dua klien dengan kasus yang sama, penggunaan tes yang sudah ketinggalan zaman, tidak meminta *informed consent* atau sekadar *consent* dalam mengeluarkan informasi, tidak memberikan penjelasan yang memadai kepada klien tentang tujuan pemeriksaan serta isi atau maksud rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan itu, membuat pernyataan tentang klien yang tidak pernah diperiksa, mengeluarkan kata-kata yang oleh klien dipandang menyinggung perasaan atau kasar, pemeriksaan ulang oleh psikolog lain menunjukkan kekeliruan dan kekurangan dalam pemeriksaan sebelumnya akibat penggunaan tes yang tidak tepat, ketinggalan zaman, atau penafsiran hasil tes yang tidak tepat; mengancam klien akan menghentikan layanan, menolak memberikan layanan karena klien pernah lalai membayar tagihan biaya kendati saat itu klien sedang mengalami kesulitan

"Masalah etika digolongkan menjadi dua kategori, yaitu *complaints* atau pengaduan dan *malpractice* atau malapraktik".

"Pelanggaran itu digolongkan menjadi tiga kategori: (1) ringan: tindakan Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi yang tidak sesuai standar prosedur karena ketidak-tahuan; (2) sedang: tindakan Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi yang tidak sesuai standar prosedur karena kelalaian; dan (3) berat: tindakan Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi yang secara sengaja memanipulasi tujuan, proses maupun hasil".

keuangan, menghentikan layanan yang kendati bisa dibenarkan namun kurang bisa diterima oleh klien, menerapkan tehnik baru tanpa menjalani pelatihan atau konsultasi yang memadai sebelumnya sehingga menimbulkan pengaduan dugaan malapraktik, memberikan tagihan biaya secara tidak semestinya misal dengan berbohong tentang jumlah sesi layanan yang sudah diberikan atau memberikan tagihan yang lebih tinggi kepada lembaga asuransi yang menanggung biaya klien, relasi ganda dengan klien atau kolega yang berbau seksual, pelecehan seksual terhadap kolega atau bawahan, melakukan tindakan yang tidak profesional selama melakukan supervisi atau terapi misal dengan membiarkan pintu tetap terbuka sehingga bisa terdengar oleh orang lain saat sedang membicarakan hal yang bersifat konfidensial, melantarkan psikolog muda yang menjadi tanggungjawab supervisinya, melakukan pelecehan seksual terhadap psikolog muda yang menjadi tanggung jawab supervisinya, melanggar kerahasiaan, melebihi-lebihkan kemampuan/kewenangan. Sedangkan lima jenis malapraktik yang paling sering diajukan meliputi: perbuatan tidak senonoh secara seksual terhadap klien, kegagalan tidak memberikan informasi sebelumnya tentang risiko mengalami cedera, pengambilan keputusan yang bermasalah terkait hak asuh anak, klien bunuh diri (tanpa pernah diperiksa oleh dokter), dan klien bunuh diri (dalam keadaan sedang menjalani pengobatan psikotropika

ETIKA**MANAJEMEN PENYELESAIAN MASALAH ETIKA**

oleh dokter). Tidak ada batasan yang jelas terkait perbedaan antara keluhan dan malapraktik, tetapi kiranya itulah gambaran masalah etika yang mungkin juga terjadi dalam dunia praktik layanan profesi maupun keilmuan Psikologi kita di Tanah Air.

Bagaimana Masalah Etika dalam Psikologi Diselesaikan?

Pasal 5 Ayat (3) KEPI menyatakan bahwa pelanggaran terhadap etika profesi psikologi dapat dilakukan oleh Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi, perorangan, organisasi pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak lain. Pengaduan pelanggaran dibuat secara tertulis dan disertai bukti terkait ditujukan kepada HIMPSI untuk nantinya diserahkan kepada Majelis Psikologi Indonesia. Mekanisme pelaporan secara detail diatur dalam Keputusan Rapat Pleno Majelis Psikologi Indonesia Nomor 002/MPI-HIMPSI/SK/VI/17 tanggal 16 Juni 2017 tentang “prosedur standar pengaduan pelanggaran KEPI”.

Ayat (5) menyatakan bahwa apabila terjadi pelanggaran KEPI, Pengurus Pusat bekerjasama dengan Pengurus Wilayah terkait dapat memberi masukan kepada Majelis Psikologi Wilayah atau Pusat mengikuti prosedur yang intinya: membahas masalah, meminta klarifikasi kepada pihak yang melakukan pelanggaran, menentukan jenis pelanggaran. Ayat (6) menyatakan, selanjutnya Majelis Psikologi akan melakukan klarifikasi kepada pihak yang melakukan pelanggaran, lalu berdasarkan keterangan yang bersangkutan dan data lain yang berhasil dikumpulkan maka Majelis Psikologi akan mengambil keputusan tentang permasalahan pelanggaran tersebut.

“Tidak ada batasan yang jelas terkait perbedaan antara keluhan dan malapraktik, tetapi kiranya itulah gambaran masalah etika yang mungkin juga terjadi dalam dunia praktik layanan profesi maupun keilmuan Psikologi kita di Tanah Air”.

Menurut saya, rumusan Ayat (3) yang memasukkan pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi pengguna layanan psikologi dan pihak-pihak lain sebagai bagian dari masalah etika yang menjadi kewenangan organisasi profesi Psikologi agak problematis. Norma etika sebuah organisasi profesi berlaku dan bersifat mengikat hanya terhadap para anggotanya.

Masalah etika dalam Psikologi bisa muncul tidak semata-mata akibat kelalaian atau kesengajaan seorang psikolog, tetapi bisa muncul karena konflik antara kode etik dan peraturan perundangan negara maupun tuntutan organisasi tempat seorang psikolog bekerja. Jika terjadi hal yang demikian, maka psikolog wajib mengklarifikasi bentuk konflik yang dialaminya, tetap berpegang teguh pada kode etik profesinya, serta mengambil langkah-tindakan yang sesuai dengan kode etik profesinya. Jika langkah ini belum berhasil mengatasi konflik yang muncul, pada kasus konflik antara kode etik dan hukum maka seorang psikolog wajib tunduk pada ketentuan hukum (Ragusea, 2015). Sebaliknya,



ETIKA**MANAJEMEN PENYELESAIAN MASALAH ETIKA**

jika masalah etika muncul akibat konflik antara kode etik dan tuntutan organisasi, maka psikolog wajib berpegang teguh pada kode etik profesinya. Prinsip ini bisa saja berakibat bahwa seorang psikolog memilih menolak sebuah penugasan untuk memberikan layanan tertentu yang bisa memiliki konsekuensi lebih lanjut terhadap kariernya. Namun, standar yang membuka ruang bagi diskresi pribadi ini secara mutlak tidak pernah boleh dipakai oleh psikolog untuk membenarkan atau membela tindakan yang bersifat melanggar hak azasi manusia (bandingkan APA Ethical Principles, 2003). Lantas bagaimana jika pelanggaran etika tersebut bersumber dari kelalaian atau kesengajaan psikolog yang bersangkutan?

Di lingkungan APA, penyelesaian masalah etika bisa dilakukan secara informal maupun formal (APA, 2017). Penyelesaian informal dilakukan antar kolega. Standar 1.04 menyatakan bahwa manakala diduga terjadi pelanggaran etika oleh seorang psikolog maka para kolega bisa membantu menyelesaikannya dengan cara mengingatkan yang bersangkutan agar memberi perhatian pada pelanggaran itu, sepanjang tindakan ini tidak melanggar hak konfidensialitas dari psikolog yang bersangkutan. Sebaliknya, jika telah nyata terjadi pelanggaran etika dan secara nyata merugikan orang atau organisasi serta dipandang tidak cukup diselesaikan secara informal seperti diatur dalam Standar 1.04, maka Standar 1.05 menyatakan bahwa psikolog bisa melakukan tindakan lebih jauh berupa melakukan pengaduan kepada komisi etik di tingkat lokal atau nasional, lembaga sertifikasi di tingkat lokal, atau kepada pihak-pihak lain yang

berwenang. Lagi-lagi, standar ini tidak berlaku jika tindakan pelaporan-pengaduan semacam itu berdampak melanggar hak konfidensialitas atau pengadu sedang dalam status dibebaskan dari hak melakukan review terhadap psikolog lain yang nyata-nyata melakukan pelanggaran etika. Sebagai pihak yang mengadukan pelanggaran etika yang dilakukan oleh sesama psikolog, Standar 1.06 menyatakan bahwa psikolog pengadu wajib menunjukkan kerjasama dalam proses penyelidikan etika serta memenuhi berbagai persyaratan yang diminta oleh organisasi profesi atau organisasi/asosiasi psikologi lain yang berafiliasi dengan organisasi profesi tempat psikolog pengadu itu menjadi anggota. Ketidak-sediaan bekerjasama sendiri merupakan bentuk pelanggaran etika. Namun psikolog pengadu berhak mengajukan permohonan penangguhan kerja sama sampai ada hasil persidangan atas kasus pelanggaran etika yang dilaporkannya.

Peran Kolega dalam Penyelesaian Masalah Etika dalam Psikologi

Di negara lain, kolega di lapangan berperan penting dalam mendeteksi terjadinya pelanggaran etika dalam praktik profesi, maka juga berperan penting dalam menjaga berlangsungnya praktik profesi sesuai dengan standar dan kode etik yang berlaku. Bahkan di lingkungan APA, kewajiban pertama seorang anggota organisasi profesi yang mengetahui bahwa seorang kolega diduga melakukan pelanggaran etika adalah membicarakan dugaan pelanggaran itu dengan yang bersangkutan (Ragusea, n.d.). Sebuah asosiasi profesi di sebuah

“Masalah etika dalam Psikologi bisa muncul tidak semata-mata akibat kelalaian atau kesengajaan seorang psikolog, tetapi bisa muncul karena konflik antara kode etik dan peraturan perundangan negara maupun tuntutan organisasi tempat seorang psikolog bekerja”.

“Namun, standar yang membuka ruang bagi diskresi pribadi ini secara mutlak tidak pernah boleh dipakai oleh psikolog untuk membenarkan atau membela tindakan yang bersifat melanggar hak azasi manusia (bandingkan APA Ethical Principles, 2003)”.

ETIKA

MANAJEMEN PENYELESAIAN MASALAH ETIKA

negara bagian di AS memberikan pedoman tentang apa yang bisa dilakukan oleh seorang psikolog jika menduga bahwa ada kolega melakukan pelanggaran etika (Michigan Association of School Psychologist, 2015).

Pertama, mencoba memecahkan masalah langsung dengan kolega yang bersangkutan. Tindakan ini bisa dibenarkan karena bisa dikategorikan ke dalam pemecahan secara informal atas pelanggaran etika yang diatur dalam Kode Etik

“Bahkan di lingkungan APA, kewajiban pertama seorang anggota organisasi profesi yang mengetahui bahwa seorang kolega diduga melakukan pelanggaran etika adalah membicarakan dugaan pelanggaran itu dengan yang bersangkutan (Ragusea, n.d.)”.

APA sebagaimana sudah disinggung. Langkah ini bisa meliputi tindakan-tindakan sebagai berikut: (a) berkonsultasi dengan standar etika psikologi yang berlaku, berkonsultasi dengan kolega yang lebih berpengalaman dan berwawasan, dan meminta bimbingan dari organisasi profesi di tingkat wilayah atau nasional untuk menentukan tindakan yang sesuai; (b) mencatat atau mendokumentasikan semua peristiwa-kejadian dan jenis pelanggaran yang diduga dilakukan (tanggal, waktu, detail kejadian), serta mendokumentasikan tiap upaya penyelesaian masalah yang telah dilakukan secara informal; (c) menjaga konfidensialitas dan mematuhi semua prinsip etik selama proses pemecahan berlangsung.

“Di lingkungan APA, penyelesaian masalah etika bisa dilakukan secara informal maupun formal (APA, 2017)”.

Kedua, jika upaya informal gagal, maka perlu mengadakan dugaan pelanggaran tersebut secara resmi. Tindakan ini juga dijamin dalam kode etik APA, dan bisa berupa mengadukannya kepada komisi etik di tingkat wilayah atau nasional, kepada badan pemberi ijin praktik, atau kepada lembaga yang berwenang. Dalam membuat laporan dugaan pelanggaran etika, disarankan mengikuti langkah-langkah yang dikenal sebagai *eight-step problem solving model* yang dikemukakan oleh Koochner dan Keither-Spiegel (2008, seperti dikutip dalam MASP, 2015) sebagai berikut: (1) deskripsikan parameter situasinya; (2) rumuskan isu-isu etis-legal yang berpotensi terlibat; (3) pelajari pedoman etik dan legal serta kebijakan-kebijakan lain yang relevan untuk menyelesaikan tiap isu; perhatikan prinsip-prinsip umum maupun pasal-pasal khusus yang relevan; (4) pelajari hak, tanggung jawab, dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat; (5) rumuskan daftar kemungkinan keputusan yang bisa diambil untuk tiap isu; (6) identifikasikan aneka konsekuensi dari tiap keputusan; pertimbangkan aneka konsekuensi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dari tiap keputusan, dengan mempertimbangkan ongkos psikologis, sosial dan ekonomi yang harus ditanggung oleh pihak-pihak terkait; (7) perhatikan bukti-bukti konsekuensi atau manfaat yang muncul dari tiap keputusan yang akan terjadi secara nyata (analisis risiko-manfaat); dan (8) membuat keputusan; sesuai kode etik, pihak pengadu wajib menerima tanggung jawab atas keputusan yang dibuat serta memantau aneka konsekuensi dari rangkaian tindakan yang dipilih.

Ketiga, jika sebagai pihak pengadu kita tidak mampu memutuskan pilihan tindakan dalam rangka menyelesaikan sebuah pelanggaran etika yang diduga dilakukan oleh seorang kolega, maka sebaiknya: (1) melaporkan kasus pelanggaran tersebut kepada pimpinan organisasi profesi yang selanjutnya akan meneruskannya ke Komisi Standar Profesi (KSP), dalam hal ini Majelis Psikologi; (2) KSP akan menghubungi pengadu sesegera mungkin untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap

ETIKA

MANAJEMEN PENYELESAIAN MASALAH ETIKA

tentang kasusnya; (3) KSP akan mendiskusikan informasi yang berhasil dikumpulkan; dan (4) KSP akan membantu pengadu menafsirkan pasal-pasal Kode Etik yang relevan dan membantu pengadu menentukan pilihan tindakan dalam rangka melaksanakan upaya pengadu menyelesaikan pelanggaran etika yang dimaksud.

Karena berbagai alasan, bahkan di negara maju seorang psikolog seringkali segan melakukan penyelesaian pelanggaran etika yang diduga dilakukan oleh kolega psikolog baik secara informal maupun formal. Misal, takut menyinggung perasaan atau takut mengalami pembalasan oleh kolega terduga pelanggar etika. Apalagi dalam konteks negara dan budaya kita. Namun menurut Ragusea (n.d.), merupakan bagian dari kewajiban etika seorang psikolog untuk menyelesaikan soal-soal pelanggaran etika ini dengan cara yang profesional dan efektif. Pada akhirnya, semua itu demi kepentingan menjaga martabat profesi bahkan martabat kemanusiaan juga. Maka, kita harus berani bertindak mengatasi pelanggaran etika yang diduga dilakukan oleh kolega kita.

“Dalam membuat laporan dugaan pelanggaran etika, disarankan mengikuti langkah-langkah yang dikenal sebagai *eight-step problem solving model* yang dikemukakan oleh Koochner dan Keither-Spiegel (2008, seperti dikutip dalam MASP, 2015)”.

Bagaimana Pengaduan Pelanggaran Etika dalam Psikologi Diproses?

Di lingkungan organisasi profesi psikologi di sebuah negara yang berhasil kami pelajari, proses penyelesaian pengaduan tentang dugaan pelanggaran etika oleh seorang psikolog ditangani oleh apa yang disebut the *Professional Conduct*

Committee atau Komisi Kinerja Profesi, selanjutnya disingkat KKP (“Complaints & resolutions”, 2020). Tugas KKP adalah menerima, mempertimbangkan, dan menyelidiki (*investigate*) semua pengaduan tertulis yang masuk, dengan langkah-langkah: (1) Setelah menerima *Complaint Reporting Form* yang diisi, KKP mengirim surat penerimaan (*acknowledgment letter*) kepada Pengadu yang bisa juga mencakup permintaan klarifikasi tentang pengaduan yang dilaporkan, jika perlu; (2) Setelah semua dokumen yang diperlukan diperoleh dari Pengadu, KKP memberikan notifikasi kepada Teradu. Teradu akan menerima sebuah berkas berisi: salinan pengaduan, informasi tentang proses yang harus dijalani, izin dari pihak Pengadu untuk menggunakan informasi dalam berkas pengaduannya untuk merumuskan tanggapan, serta persetujuan Teradu tentang kemungkinan tanggapannya disampaikan kepada Pengadu; pada tahap ini Teradu boleh berkonsultasi dengan seorang pengacara; (3) Setelah menerima tanggapan dari Teradu terhadap pengaduan yang disampaikan, KKP melakukan penyelidikan meliputi mengumpulkan dokumentasi dan melakukan wawancara dengan saksi-saksi, tidak terbatas hanya Pengadu dan Teradu. Dalam kasus dimana pengaduan atau tuduhan yang disampaikan bersifat sangat serius dan berpotensi merugikan publik, organisasi profesi bisa memutuskan meminta perintah pengadilan. Jika dikabulkan,

“Merupakan bagian dari kewajiban etika seorang psikolog untuk menyelesaikan soal-soal pelanggaran etika ini dengan cara yang profesional dan efektif. Pada akhirnya, semua itu demi kepentingan menjaga martabat profesi bahkan martabat kemanusiaan juga. Maka, kita harus berani bertindak mengatasi pelanggaran etika yang diduga dilakukan oleh kolega kita”.

ETIKA

MANAJEMEN PENYELESAIAN MASALAH ETIKA

maka pihak Teradu dilarang melakukan praktik selama penyelidikan berlangsung.

Ada 4 jenis disposisi yang mungkin diambil oleh KKP terhadap sebuah pengaduan. *Pertama*, KKP merekomendasikan tidak perlu ada tindak lanjut dan pengaduan dinyatakan ditolak. Hal ini terjadi jika pengaduan dipandang tidak berdasar sebab tindakan anggota yang diadukan tidak termasuk pelanggaran profesi atau mencerminkan ketidakmampuan, atau pengaduan dilakukan secara serampangan dan/atau dibuat-buat, atau jika hal yang diadukan bukan berada dalam yurisdiksi KKP/ organisasi profesi. Laporan tertulis berisi keputusan akan disampaikan kepada Pengadu, Teradu, Komisi Disiplin dalam hal ini Majelis Psikologi dan Pimpinan Organisasi Profesi.

Kedua, KKP melakukan pertemuan untuk menyelesaikan sengketa (*dispute resolution*). Langkah ini bisa berupa penyelesaian informal atau formal. Penyelesaian formal lazim melibatkan mediasi oleh pihak ketiga. Disposisi ini tidak berlaku dalam kasus-kasus berupa inkompetensi yang serius (*gross incompetence*), kekerasan fisik dan/atau seksual, atau Teradu dinyatakan tidak mampu (*incapacity*) oleh pihak berwenang. Pertemuan dalam rangka penyelesaian sengketa ini hanya bisa dilaksanakan jika disetujui oleh kedua pihak yang bersengketa. Langkah ini disertai tindakan intervensi/remedial bagi Teradu meliputi namun tidak terbatas pada: (a) saran tentang cara menghindari tindakan sejenis yang berujung pengaduan dari klien; (b) peringatan tentang harapan KKP agar Teradu memenuhi standar praktik profesi; (c) pernyataan kesanggupan dan persetujuan Teradu untuk membatasi praktiknya atau menempuh pendidikan lanjutan dan/atau supervisi; (d) penangguhan ijin praktik dari pihak KKP sampai Teradu memenuhi berbagai persyaratan yang tertuang dalam dokumen pernyataan kesanggupan dan persetujuan. Laporan tertulis berisi keputusan akan disampaikan kepada Pengadu, Teradu, Komisi Disiplin dan Pimpinan Organisasi Profesi.

Ketiga, jika hasil penyelidikan menunjukkan bahwa

Teradu telah melanggar hukum pidana, KKP segera melaporkannya kepada Pimpinan Organisasi Profesi dan pihak penegak hukum terkait. Selanjutnya bisa ditetapkan tuduhan pidana secara resmi. Jika hal ini terjadi, KKP menghentikan penyelidikannya sampai tuduhan itu dibuktikan di pengadilan. Sesudah ada keputusan pengadilan, KKP melanjutkan proses penyelidikan.

Keempat, sebagai tindak lanjut dari penyelidikan, karena merupakan jenis pelanggaran berat sejumlah pengaduan langsung diteruskan ke Komisi Disiplin untuk disidangkan secara formal. Kadang-kadang, KKP merekomendasikan agar dilakukan sidang disiplin resmi manakala upaya resolusi sengketa yang telah dilakukan tidak membuahkan hasil, atau manakala Pengadu dan/atau Teradu menolak sebuah resolusi yang ditawarkan, atau manakala Teradu gagal memenuhi berbagai intervensi dan tindakan remedial yang direkomendasikan dan disetujuinya. Jika seorang Teradu dinyatakan bersalah melalui sidang disiplin, keputusan Komisi Disiplin disampaikan kepada Pengadu, Teradu, dan Pimpinan Organisasi Profesi. Keputusan itu juga bisa disebarluaskan kepada publik sebab sidang-sidang disiplin memang terbuka untuk umum. Teradu berhak naik banding atas keputusan yang diambil oleh Komisi Disiplin, baik kepada Pimpinan Organisasi Profesi atau kepada pengadilan.

Seperti apa prosedur standar pengaduan pelanggaran KEPI seperti diatur dalam Keputusan Rapat Pleno Majelis Psikologi Indonesia (2017)? Secara garis besar tidak berbeda dengan apa yang berlaku di negara lain dan yang sudah disajikan di atas. Yang agak spesifik, ditegaskan jenis pelanggaran yang bisa diadukan yaitu bisa berbentuk malapraktik atau non-malapraktik yang mencakup namun tidak terbatas pada: (1) pendidikan dan pelatihan; (2) penelitian, publikasi dan pemberian pernyataan di media massa; (3) layanan jasa psikologi kepada individu/keompok/komunitas meliputi: pemeriksaan/asesmen psikologi dan intervensi psikologi terdiri dari psikoedukasi; dan (d) catatan pemeriksaan psikologi/rekam data.

ETIKA

MANAJEMEN PENYELESAIAN MASALAH ETIKA

Proses penanganan pengaduan dilakukan oleh Pimpinan Organisasi Profesi di tingkat Pusat dan Wilayah serta Majelis Psikologi di tingkat Pusat dan Wilayah berdasarkan aduan resmi secara tertulis baik yang ditulis dalam surat asli atau dengan mengisi Lembar Aduan yang tersedia di Website organisasi profesi. Tahap penanganan, pembuatan keputusan, dan langkah penanganan secara garis besar tidak berbeda dengan yang terjadi di negara lain seperti sudah dipaparkan.

Penutup

Sebelum mengakhiri pembahasan ini, ada dua hal yang perlu dikemukakan. *Pertama*, HIMPSI sedang memroses Rancangan Undang-undang Praktik Psikologi yang saat ini sudah masuk dalam Prolegnas DPR-RI (“Dinamika RUU”, 2020). Dalam RUU dinyatakan bahwa HIMPSI berwenang menegakkan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tenaga psikologi sesuai KEPI. Sebagai organisasi profesi HIMPSI terdiri atas tiga organ: (1) Majelis Psikologi Indonesia (MPI) di tingkat nasional; (2) pengurus organisasi profesi di tingkat nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota; dan (3) Dewan Etik Psikologi (DEP) di tingkat nasional dan provinsi. MPI merupakan penyelenggara organisasi profesi yang menetapkan aturan serta memberikan pertimbangan etik dan kinerja organisasi profesi. DEP merupakan penyelenggara organisasi profesi yang menegakkan kode etik profesi atas dugaan pelanggaran KEPI yang dilakukan oleh tenaga psikologi. Seandainya rancangan undang-undang ini kelak benar-benar disahkan sebagai undang-undang, maka ke depan penanganan dan penyelesaian masalah etika dalam psikologi di lingkungan HIMPSI akan menjadi lebih jelas, yaitu menjadi kewenangan DEP di tingkat nasional dan provinsi.

Kedua, dengan terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mulai berlaku tanggal 19 Agustus 2019, akan bertambah ruang kemungkinan terjadinya masalah etika di bidang penelitian-pengembangan-pengkajian-penerapan

“Seandainya rancangan undang-undang ini kelak benar-benar disahkan sebagai undang-undang, maka ke depan penanganan dan penyelesaian masalah etika dalam psikologi di lingkungan HIMPSI akan menjadi lebih jelas, yaitu menjadi kewenangan DEP di tingkat nasional dan provinsi”.

IPTEK, khususnya terkait apa yang disebut *wajib serah* dan *wajib simpan* atas seluruh data primer dan keluaran hasil penelitian-pengembangan-pengkajian-penerapan IPTEK [Ps. 40, Ay. (1)]. Sebagaimana diketahui, wajib serah dan wajib simpan tersebut dikenakan terhadap penyandang dana, SDM IPTEK meliputi peneliti, perekayasa, dosen, dan SDM IPTEK lainnya, serta kelembagaan IPTEK yang meliputi antara lain perguruan tinggi. Data primer yang dimaksud meliputi data mentah autentik dalam berbagai bentuk yang diperoleh dari kegiatan penelitian-pengembangan-pengkajian-penerapan IPTEK [Ps. 40, Ay. (3)], dan wajib disimpan paling singkat selama 20 tahun [Ps. 40, Ay. (5)]. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama dua tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan (Ps. 99), berarti mulai berlaku pada tahun 2021.

“Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mulai berlaku tanggal 19 Agustus 2019, akan bertambah ruang kemungkinan terjadinya masalah etika di bidang penelitian-pengembangan-pengkajian-penerapan IPTEK, khususnya terkait apa yang disebut wajib serah dan wajib simpan atas seluruh data primer dan keluaran hasil penelitian-pengembangan-pengkajian-penerapan IPTEK”.

ETIKA**MANAJEMEN PENYELESAIAN MASALAH ETIKA**

Sebagai penutup, berikut disampaikan beberapa catatan dan saran terkait manajemen penerapan dan penyelesaian masalah etika dalam psikologi di lingkungan organisasi profesi di Tanah Air. *Pertama*, kendati tidak mudah namun kiranya penting segera bisa disusun peraturan tentang jenis pelanggaran beserta sanksinya. Dokumentasi yang baik terhadap berbagai pengaduan yang pernah diajukan ke HIMPSI baik di tingkat wilayah maupun nasional beserta penyelesaiannya bisa menjadi salah satu sumber yang baik untuk keperluan ini.

Kedua, mencontoh praktik baik di negara lain, kiranya perlu dikembangkan mekanisme penyelesaian informal atas masalah etika sekaligus penumbuhan kesadaran dalam diri tiap psikolog/ilmuwan psikologi di Tanah Air tentang tanggung jawabnya untuk ikut menegakkan praktik etis baik dalam kegiatan pelayanan maupun pengembangan ilmu. Sebagaimana diketahui, mekanisme informal ini mewajibkan setiap psikolog/ilmuwan psikologi anggota organisasi profesi berani membicarakan secara langsung kepada kolega yang diduga melakukan pelanggaran etika, sebelum meningkatkannya menjadi pengaduan formal jika langkah pertama tidak membawa hasil. Praktik semacam ini akan menjadi sejenis kontrol internal sekaligus bisa menghindarkan diri dari risiko terjadinya pengaduan dari pihak klien maupun pihak lain di luar organisasi profesi. Memang ada sejenis kontrol internal namun hal itu diwujudkan dalam bentuk kewajiban tiap psikolog/ilmuwan psikologi untuk memperbaiki atau mengurangi pelanggaran atau kesalahan yang dibuatnya dengan mengambil langkah-langkah yang masuk akal sesuai ketentuan yang berlaku [KEPI, Ps. 4, Ay. (2)]. Ketentuan semacam ini bisa tidak efektif baik karena ketidak-tahuan maupun karena alasan lain yang membuat seseorang gagal menyadari pelanggaran yang dibuatnya.

Ketiga, ketentuan tentang kode etik profesi Psikologi beserta aneka peraturan pelaksanaannya ke depan perlu mengakomodasi berbagai perkembangan baru antara lain sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019

tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Undang-undang tentang praktik psikologi manakala peraturan itu berhasil disahkan sebagai undang-undang kelak. Sambil menunggu perkembangan, tiap lembaga dan/atau organisasi yang berada di bawah payung maupun berafiliasi dengan organisasi profesi HIMPSI perlu berinisiatif membentuk lembaga beserta perangkat peraturan dan ketentuannya untuk menyelesaikan masalah etika terkait layanan maupun keilmuan Psikologi dengan mengacu peraturan-ketentuan resmi terkait yang berlaku. Ω

“Dokumentasi yang baik terhadap berbagai pengaduan yang pernah diajukan ke HIMPSI baik di tingkat wilayah maupun nasional beserta penyelesaiannya bisa menjadi salah satu sumber yang baik untuk keperluan ini.

Mencontoh praktik baik di negara lain, kiranya perlu dikembangkan mekanisme penyelesaian informal atas masalah etika sekaligus penumbuhan kesadaran dalam diri tiap psikolog/ilmuwan psikologi di Tanah Air”.

Daftar Acuan

- American Psychological Association. (2017). *Ethical principles of psychologists and code of conduct*. Diunduh dari <https://www.apa.org/ethics/code/ethics-code-2017.pdf>
- British Psychological Society. (2009). *Code of ethics and conduct. Guidance published by the Ethics Committee of the British Psychological Society*. Diunduh dari <https://www.bps.org.uk/files/code-ethics-and-conduct-2009pdf>
- Complaints & Resolutions. (2020). Diunduh dari http://www.skcp.ca/?page_id=41
- Dinamika RUU praktik psikologi. (2020). *Psikologi Indonesia*, 2(1), 58-65.
- Himpunan Psikologi Indonesia. (2010). *Kode etik psikologi Indonesia*. Diunduh dari <https://himpisi.or.id/organisasi/kode-etik-psikologi-indonesia>
- Keputusan Rapat Pleno Majelis Psikologi Indonesia Nomor 002/MPI-HIMPSI/SK/VI/17 tanggal 16 Juni 2017 tentang Prosedur Standar Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Psikologi Indonesia.
- Michigan Association of School Psychologist. (2015). Procedures for examining ethical violations. Diunduh dari http://www.nasponline.org/standards/EPPC_Procedures.pdf
- Montgomery, Cupit, and Wimberley. (1999). Complaints, malpractice, and risk management: Professional issues and personal experiences. Diunduh dari <http://www.psychpage.com/ethics/pfstand1.html>
- Raguesa, S.A. (2015). *Is it ethic or law?* Makalah, diunduh dari <https://nationalpsychologist.com/2015/05/is-it-ethics-or-law/102875.html>
- Raguesa, S.A. (n.d.). *When colleagues make mistakes*. Diunduh dari <https://www.ethicalpsychology.com/2011/06/when-colleagues-make-mistakes.html>
- "Top ethical complaints seen in Illinois". (2010). Diunduh dari <http://www.psychpage.com/ethics/pfstand1.html>
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
-
- Pernah disampaikan dalam "Acara Rabuan Dosen", Fakultas Psikologi, Unika Atma Jaya, Rabu, 9 September 2020, disajikan kembali dengan modifikasi minor.*

Menuju Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Kampus Psikologi Aspirasi Kolokium Khusus AP2TPI 2020

Nurul Hartini

Ketua Kolokium Khusus Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI) 2020

Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI) adalah wadah bersama pengelola pendidikan tinggi Psikologi Indonesia mulai dari Pendidikan Sarjana Psikologi, Magister Psikologi Profesi, Magister Psikologi (Sains), Magister Psikologi Terapan dan Doktor Psikologi. AP2TPI bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi psikologi di Indonesia (*Internal capacity building*), mengembangkan kerjasama dengan institusi yang relevan bagi pendidikan tinggi psikologi di Indonesia (*Network development and collaboration*), dan membangkitkan kesadaran atas kemajuan pendidikan tinggi psikologi di tingkat internasional (*International awareness*). Seiring dengan hadirnya kebijakan Mendikbudristekdikti, Nadiem Anwar Makarim tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka – MBKM di level Pendidikan Sarjana dan Sarjana Terapan, maka penyelenggaraan kolokium khusus AP2TPI pada tahun 2020 ditujukan untuk mempersiapkan pendidikan psikologi guna menjawab atau mengimplementasikan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di kampus Psikologi, khususnya tentang implementasi

kebijakan Kampus Merdeka yang keempat.

Kebijakan Kampus Merdeka terdiri dari empat kebijakan, yaitu:

1. Otonomi bagi Perguruan Tinggi untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi baru. Otonomi diberikan kepada Perguruan Tinggi dengan akreditasi A dan B, dan telah melakukan kerja sama dengan organisasi dan/atau universitas yang masuk dalam QS Top 100 *World Class Universities*.
2. Program re-akreditasi setiap lima tahun bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan program studi yang sudah siap naik peringkat
3. Kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH).
4. Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi. Pengecualian berlaku untuk program studi kesehatan.



Merdeka Belajar

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan - Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada pasal 18 dinyatakan tentang Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Dijelaskan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda;

dan/atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Hak mahasiswa belajar di luar program studi dan di luar kampus ini tidak berlaku untuk program studi kesehatan,

Kolokium khusus 2020 memfokuskan pada implementasi kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang keempat. Kebijakan tersebut bertujuan memberikan peluang kepada mahasiswa untuk memilih bidang yang diminati setelah memenuhi capaian pembelajaran lulusan sebagai Sarjana atau Sarjana Terapan sesuai program studi, termasuk Program Studi Psikologi. Mahasiswa diharapkan menambah kompetensi melalui pengalaman belajar yang lebih luas dengan kegiatan pembelajaran di luar program studi dan di luar kampus. Dengan skema tersebut, diharapkan pendidikan tinggi mampu menghasilkan lulusan yang siap memenangkan tantangan kehidupan yang semakin kompleks, menjadi generasi unggul tanpa tercerabut dari akar budaya bangsa.

ISU PSIKOLOGI TERKINI**MENUJU MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Prof. Ir. Nizam, MSc., D.I.C., Ph.D. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai narasumber dalam kolokium khusus yang diselenggarakan pada 7 Juli 2020 menyampaikan bahwa kampus merdeka bertujuan untuk menghasilkan insan merdeka. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak pada perkembangan di berbagai aspek kehidupan; terjadi perubahan ekonomi, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Perubahan secara makro menuntut dilakukannya transformasi pembelajaran untuk membekali dan menyiapkan lulusan pendidikan tinggi agar menjadi bagian dari sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi tantangan zaman.

Implementasi dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menuntut perguruan tinggi untuk mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaannya melalui pembuatan kebijakan/pedoman/panduan akademik. Selanjutnya, perguruan tinggi membuat dokumen kerjasama (MoU/SPK) dengan mitra untuk memfasilitasi kegiatan yang telah disusun. Pada implementasi inilah penyelenggara pendidikan tinggi psikologi di Indonesia bisa saling bekerjasama untuk membuat skema kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbasis pada kelebihan dan keunikan di masing-masing perguruan tinggi dan program studi psikologi.

“Prof. Ir. Nizam, MSc., D.I.C., Ph.D. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai narasumber dalam kolokium khusus yang diselenggarakan pada 7 Juli 2020 menyampaikan bahwa kampus merdeka bertujuan untuk menghasilkan insan merdeka”.

“Pada implementasi inilah penyelenggara pendidikan tinggi psikologi di Indonesia bisa saling bekerjasama untuk membuat skema kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbasis pada kelebihan dan keunikan di masing-masing perguruan tinggi dan program studi psikologi”.

Student-Centered Learning

Konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah implementasi dari konsep *Student-Centered Learning* – SCL. SCL menempatkan peserta didik sebagai subjek dalam pembelajaran. Peserta didiklah yang melakukan langkah-langkah aktif dalam pembelajaran. Cornelius dan Jeffry (2007) menyebutkan bahwa SCL sebagai cara untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran dan meningkatkan prestasi belajarnya. Lebih lanjut, Hoidn (2017) menjelaskan bahwa SCL sesuai dengan lingkungan belajar di perguruan tinggi. Pola pikir dan budaya belajar di perguruan tinggi sesuai dengan teori pembelajaran konstruktivisme. Teori pembelajaran konstruktivisme menempatkan peserta didik sebagai individu yang memiliki kepekaan, kemandirian, dan tanggung jawab terhadap risiko dalam pengambilan keputusan.

Menurut pandangan konstruktivisme, belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pembentukan ini harus dilakukan oleh individu yang sedang belajar, ia harus aktif melakukan kegiatan, aktif berfikir, menyusun konsep dan memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Konstruktivisme yakin bahwa pengetahuan bukanlah hal yang statis dan deterministik, tetapi

ISU PSIKOLOGI TERKINI**MENUJU MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

sesuatu proses. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pengetahuan akan menjadi sesuatu yang relatif permanen ketika mahasiswa diajak belajar dari sesuatu yang kecil, sederhana, dan mudah; untuk kemudian selama proses diajak untuk berfikir lebih luas, mendalam dan kompleks. Dalam paradigma pembelajaran konstruktivisme, dosen berperan sebagai motivator atau fasilitator.

Student-Centered Learning dicirikan oleh metode pembelajaran inovatif yang bertujuan untuk membangun peran aktif peserta didik sehingga proses belajar mampu mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, berfikir kritis, dan berfikir reflektif. Melalui aktivitas belajar di luar program studi di dalam perguruan tinggi yang sama dan aktivitas belajar di perguruan tinggi berbeda dalam program studi yang sama atau berbeda atau di luar perguruan tinggi, maka mahasiswa diharapkan dapat memiliki kapasitas kognitif, afektif dan psikomotor secara utuh dan komprehensif sehingga mempersiapkan mahasiswa beradaptasi dengan dinamika perubahan zaman yang penuh dengan ketidakpastian. Melalui implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mahasiswa didekatkan dengan realitas kehidupan masyarakat dan dunia pasar kerja.

Soft Skills

Pendidikan tinggi memiliki tujuan untuk dapat mencetak individu-individu yang tidak hanya mampu bersaing di pasar kerja, namun juga mampu mengaplikasikan setiap pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di berbagai ranah kehidupan. Dengan demikian, seringkali ilmu dan bekal teoretis yang diberikan di bangku kuliah belum cukup membuat mahasiswa benar-benar siap dan mampu terjun di masyarakat. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Mengacu pada isi dari Undang-Undang Pendidikan Tinggi no. 12 Tahun 2012 tersebut, pada hakikatnya mahasiswa adalah insan akademik yang sedang mengembangkan kepribadian (aspek kognitif, afektif, dan perilaku) melalui beragam kegiatan yang dapat diikutinya sebagai mahasiswa.

Soft-skills sendiri tidak lain meliputi keterampilan-keterampilan personal yang dapat mempermudah individu dalam melaksanakan berbagai proses sosial, seperti beradaptasi dan menyelesaikan beragam persoalan yang ditemui, serta memperlancar pelaksanaan berbagai tugas yang harus dilakukan. Tujuan dari implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah mempersiapkan sumber daya manusia unggul yang siap beradaptasi dengan dinamika perubahan dan ketidakpastian abad ke-21 dan revolusi industri 4.0. Tantangan zaman menuntut perilaku kreatif dan inovatif sebagai *soft skills* yang harus dimiliki calon lulusan. Dalam Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Direktorat Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah mempersiapkan pembelajaran abad 21 yang menekankan pada penguatan keterampilan *Higher Order Thinking Skills* (HOTS), yaitu *communication, collaboration, critical thinking, creative thinking, computational logic, dan compassion*. Pembelajaran di luar program studi di dalam perguruan tinggi yang sama dan di perguruan tinggi berbeda dalam program studi yang sama atau berbeda atau di luar perguruan tinggi, seperti mengajar di sekolah, magang/praktik industri, proyek di desa, pertukaran pelajar, penelitian/riset, wirausaha, studi/proyek independen, dan proyek kemanusiaan diharapkan dapat mengasah *Higher Order Thinking Skills* dan meningkatkan enam *soft-skills* calon lulusan perguruan tinggi, termasuk lulusan sarjana psikologi.

Terdapat enam *soft-skills* (*communication, collaboration, critical thinking, creative thinking, computational logic, dan compassion*) yang diharapkan terbentuk dari pembelajaran di luar program studi yang sangat dibutuhkan dalam daya

ISU PSIKOLOGI TERKINI

MENUJU MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

saing pasar kerja dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Pertama, komunikasi (*communication*) adalah salah satu *soft-skill* terpenting. Keterampilan komunikasi baik secara lisan maupun tertulis menjadi sebuah

tuntutan yang harus dimiliki lulusan. Individu dengan keterampilan berkomunikasi mampu menyesuaikan diri dengan setiap individu yang dihadapi; ia mampu memahami dan bertindak secara efektif dan efisien, menjelaskan masalah yang kompleks kepada orang lain dengan bahasa yang bisa dipahami pihak lain. Keterampilan berkomunikasi interpersonal baik verbal maupun non-verbal akan mendukung relasi kolaboratif dan saling menghormati. Kedua, bekerjasama (*collaboration*) mutlak harus dimiliki oleh setiap individu saat harus membangun relasi dengan orang lain. Individu dengan keterampilan bekerjasama akan mampu mengelola konflik dan berperilaku produktif. Ketiga, berpikir kritis (*critical thinking*) adalah *soft-skill* untuk mengumpulkan informasi/data, melakukan analisis untuk memecahkan



masalah dan menarik kesimpulan. Keterampilan berfikir kritis membantu individu bersikap terbuka terhadap pemikiran dan pendapat orang lain. Hal ini tentu akan membantu

individu saat dihadapkan pada beragam permasalahan yang harus diselesaikan. Keempat, berpikir kreatif (*creative thinking*). Individu dengan daya berfikir kreatif akan mampu mengembangkan strategi penyelesaian masalah yang baru dan tepat sasaran. Kelima, keterampilan berfikir logika matematika (*computational logic*), berpikir logis membantu individu mengembangkan tahapan pemikiran yang sistematis dan terstruktur sehingga orang lain bisa lebih mudah menerima ide dan gagasan yang disampaikan. Keenam adalah kasih sayang (*compassion*). Keterampilan kasih sayang terhadap sesama akan terasah ketika mahasiswa didekatkan dan diajak bersama-sama belajar dengan masyarakat desa, masyarakat yang membutuhkan bantuan, masyarakat yang menggugah rasa empati.

“Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah mempersiapkan pembelajaran abad 21 yang menekankan pada penguatan keterampilan *Higher Order Thinking Skills (HOTS)*, yaitu *communication, collaboration, critical thinking, creative thinking, computational logic, dan compassion*”.

“Berpikir logis membantu individu mengembangkan tahapan pemikiran yang sistematis dan terstruktur sehingga orang lain bisa lebih mudah menerima ide dan gagasan yang disampaikan. Keterampilan kasih sayang terhadap sesama akan terasah ketika mahasiswa didekatkan dan diajak bersama-sama belajar dengan masyarakat desa, masyarakat yang membutuhkan bantuan, masyarakat yang menggugah rasa empati”.

ISU PSIKOLOGI TERKINI**MENUJU MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA****Simpulan**

Implementasi kebijakan merdeka belajar kampus merdeka menjadi fokus dari seluruh perguruan tinggi, fakultas dan program studi, tanpa terkecuali psikologi. Memberikan hak mahasiswa belajar di luar program studi dan di luar kampus baik pada program studi yang sama atau program studi berbeda atau mengikuti aktivitas di luar perguruan tinggi menjadi tuntutan transformasi pembelajaran di level Sarjana dan Sarjana Terapan, termasuk psikologi. Implementasi merdeka belajar kampus merdeka akan memberikan *hard-skills* dan *soft-skills* yang mendorong berkembangnya *Higher Order Thinking Skills* guna menjawab dinamika perubahan yang berlangsung cepat sesuai tantangan zaman. Kerjasama antar program studi psikologi, Fakultas Psikologi dan Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan psikologi dalam tridharma pendidikan tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) menjadi kekuatan untuk mengimplementasikan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Daftar Acuan

- Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia. Visi Misi AP2TPI. www.ap2tpi.or.id
- Cornelius-White, Jeffrey (2007). Learner-centered teacher-student relationships are effective: A meta-analysis. *Review of Educational Research*, 77(1), 113-143. <https://doi.org/10.3102/003465430298563>.
- Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Diakses dari <http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Buku-Panduan-Merdeka-Belajar-Kampus-Merdeka-2020>.
- Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

Diakses dari <https://dikti.kemdikbud.go.id/pengumuman/buku-panduan-penyusunan-kurikulum-pendidikan-tinggi-di-era-industri-4-0-untuk-mendukung-merdeka-belajar-kampus-merdeka>

- Hoidn, S. (2017). *Student-Centered Learning Environments in Higher Education Classrooms*. New York: Palgrave Macmillan. ISBN: 9784-349-94941-0
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Empat kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Diakses dari <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/dev/news/mendikbud-luncurkan-empat-kebijakan-merdeka-belajar-kampus-merdeka>
- Nizam. (2020). *Kampus Merdeka: Menyiapkan Insan Merdeka*. Materi Kolokium AP2TPI, 7 Juli 2020. Tidak Dipublikasikan.
- Presiden Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Pendidikan Tinggi. https://lldikti8.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2019/02/Undang_Undang_Nomor_12_Tahun_2012_Pendidikan_Tinggi.pdf
- Zainudin, M., Hartini, N., Hendriani, W., Soeratri, W., Puspaningsih, T. N., Ramelan, E., Manuaba, I. B., Kuntaman, Mooduto, Santosa, H., Mashud, M., Rosjidi, S., Martiana, M., Darmanto, W., Sufyanti, Y., Alamsjah, A. (2017). *Melejitkan Soft skills mahasiswa*. Airlangga University Press, Surabaya. ISBN 978-979-1330-79-4

ADVERTORIAL

Berkolaborasi Menjadi Sarana Menuju Kampus Psikologi Merdeka:

Pengalaman Program Studi Psikologi, Universitas Binawan

Ayu Dwi Nindyati

Program Studi Psikologi, Universitas Binawan, Jakarta

Pendahuluan

Kehidupan di perguruan tinggi tidak terlepas dengan aktivitas berpikir (*thinking*) yang membantu mahasiswa untuk menjadi pemikir kritis. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat kampus dalam perjalanan kehidupannya sebagai masyarakat kampus akan mengembangkan keterampilan berpikir yang solid yang akan menjadi bekalnya dalam menghadapi kehidupan sepanjang hidupnya (Gardner & Barefoot, 2016). Memahami hal ini, seharusnya mahasiswa berkesempatan untuk mendapatkan pengalaman selama melaksanakan pendidikannya di perguruan tinggi untuk meningkatkan pengayaan diri. Tidak hanya terkait dengan pengetahuan, namun juga berhubungan dengan pengalaman yang akan memperkaya diri dalam mempersiapkan karier setelah menyelesaikan studinya.

Pendidikan tinggi hendaknya bukan hanya memperhatikan pembekalan kepada mahasiswa terkait dengan *hard skill* namun juga memperhatikan *soft skill*. Dalam diskusi terkait dengan *soft skill*, Jerald (2009)

menjelaskan *21st century skill* dalam tiga ranah, yaitu *learning skills*, *literacy skills*, dan *life skills*. Setiap ranah terdiri dari beberapa kemampuan, diantaranya:

1. *Learning skills*, yang terdiri dari *critical thinking*, *creativity*, *collaboration*, dan *communication* atau biasa disingkat *The Four C's*.
2. Kemampuan dalam *literacy skills*, biasa disingkat dengan IMT, yakni *information literacy*, *media literacy*, dan *technology literacy*.
3. Kategori *life skills*, yang terdiri dari lima kemampuan, yakni *flexibility*, *leadership*, *initiative*, *productivity*, dan *social skills*, atau yang disingkat FLIPS.

Upaya perbaikan kualitas SDM Indonesia dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan proses pembentukan kualitas melalui bangku pendidikan, salah satunya adalah pendidikan tinggi. Hal ini juga yang mendorong Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyesuaikan dengan kebutuhan di masyarakat. Salah satu tuntutan masyarakat saat ini berhubungan dengan perubahan teknologi yang sangat cepat di era Revolusi Industri

ADVERTORIAL

PENGALAMAN PROGRAM STUDI PSIKOLOGI

4.0, bahkan era Masyarakat 5.0. Terkait dengan tuntutan kompetensi para pekerja di Industri 4.0 ini, kompetensi mahasiswa harus diperkuat untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Diperlukan adanya *link and match* antara lulusan perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Dengan semangat ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberlakukan kebijakan “Merdeka Belajar – Kampus Merdeka” (MBKM) yang mulai diterapkan dalam berbagai program yang menyertakan perguruan tinggi (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020).

Konsep MBKM, seperti yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, menyampaikan pemahaman umum bahwa kemerdekaan belajar memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan kemerdekaan dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit. Mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Dengan memahami hal yang disampaikan Menteri, Universitas Binawan memahami perlunya adanya *improvement* dalam metode pembelajaran yang lebih mengedepankan pengalaman yang didapatkan oleh mahasiswa (*Student-Centered Learning*). Selain terkait dengan upaya perwujudan MBKM, hal ini merupakan upaya untuk memenuhi salah satu indikator kinerja utama (IKU) perguruan tinggi.

Sejak dikeluarkan kebijakannya, MBKM telah dilakukan dalam beberapa episode yaitu:

1. Episode pertama berkaitan dengan penghapusan ujian sekolah berstandar

nasional (USBN), asesmen kompetensi sebagai pengganti UN, penyederhanaan RPP Guru dan peraturan penerimaan peserta didik baru (PPDB).

2. Episode kedua merupakan wujud dari Kampus Merdeka yang terkait dengan isu pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, perguruan tinggi negeri badan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi.
3. Episode ketiga merupakan program penyaluran BOS (Bantuan Operasional Sekolah) langsung ke rekening sekolah. Penggunaan BOS lebih fleksibel untuk sekolah. Nilai satuan BOS meningkat dan pelaporan BOS lebih transparan dan akuntabel.
4. Episode keempat berkenaan dengan organisasi penggerak.
5. Episode kelima adalah guru penggerak.

Dalam sambutannya pada tanggal 3 November 2020, Mendikbudristekdikti meluncurkan episode keenam yaitu transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi. Fokus episode ini adalah menggerakkan perguruan tinggi lebih cepat sehingga dapat bersaing di tingkat dunia. Transformasi ini diharapkan berdampak pada peningkatan lulusan yang kompeten, sehingga perlu dikaji peran pemerintah dalam membantu upaya ini melalui stimulus pendanaan. Menteri menjelaskan bahwa pada 2021, Kemendikbudristekdikti meningkatkan total anggaran yang disalurkan kepada PTN dan PTS sebesar 70%.

Mahasiswa berkesempatan untuk mendapatkan pengalaman selama melaksanakan pendidikannya di perguruan tinggi untuk meningkatkan pengayaan diri.

Universitas Binawan memahami perlunya adanya *improvement* dalam metode pembelajaran yang lebih mengedepankan pengalaman yang didapatkan oleh mahasiswa (*Student-Centered Learning*).

ADVERTORIAL

PENGALAMAN PROGRAM STUDI PSIKOLOGI

Indikator keberhasilan program MBKM di perguruan tinggi yang dijadikan landasan transformasi pendidikan tinggi ini adalah delapan indikator utama (IKU), yaitu:

1. Lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak dengan upah minimal sebesar sebesar 1,2 kali dari UMR, menjadi wirausaha dengan penghasilan di atas UMR, atau melanjutkan studi.
2. Mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus baik melalui magang, proyek di desa, mengajar, riset, berwirausaha atau pertukaran pelajar.
3. Dosen berkegiatan di luar kampus, mencari pengalaman industri atau berkegiatan di kampus lain.
4. Praktisi mengajar di dalam kampus, merekrut dosen dengan pengalaman industri.
5. Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi internasional. Hasil riset dan pengabdian dimanfaatkan.
6. Program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia, dalam kurikulum, magang dan penyerapan lulusan.

7. Kelas yang kolaboratif dan partisipatif, evaluasi berbasis proyek kelompok atau studi kasus (*case study*)
8. Program studi berstandar internasional, memperoleh akreditasi tingkat internasional.

Berkaca dengan program MBKM dan delapan IKU perguruan tinggi, program studi sebagai salah satu unit dari perguruan tinggi berperan secara langsung dalam mewujudkan kinerja perguruan tingginya; tidak terkecuali Program Studi Psikologi/PSP Universitas Binawan.

Program Studi Psikologi (PSP) Universitas Binawan dan MBKM

Program Psikologi Universitas Binawan lahir bersamaan dengan perubahan bentuk STIKes Binawan pada 2018. Hingga saat ini, sudah ada tiga angkatan dengan jumlah mahasiswa sebanyak 63 orang. Semester tertua adalah semester keenam. Berkaitan dengan program kampus merdeka, PSP mengikuti kebijakan yang berlaku di Universitas Binawan yang telah membuat kebijakan untuk menjalankan MBKM.



Foto 1: Penandatanganan MoU (nota kesepahaman) antara Universitas Binawan dan Sekolah Tinggi Manajemen IMMI untuk Tridharma Perguruan Tinggi. Penandatanganan MoU ini beriringan dengan Pengabdian kepada Masyarakat dengan penanaman pohon di pinggir Kali Ciliwung (lingkar kampus Universitas Binawan)

ADVERTORIAL**PENGALAMAN PROGRAM STUDI PSIKOLOGI**

Sebagai langkah awal untuk implementasi program MBKM ini, pada 2020, PSP telah melakukan penyesuaian kurikulum dengan tuntutan untuk melaksanakan program MBKM. Dalam proses penyesuaian ini, PSP Universitas Binawan sebagai anggota AP2TPI (Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia) menggunakan panduan terkait dengan kurikulum inti PSP jenjang sarjana (SK No. 01/Kep/AP2TPI/2019) dan standar pembelajaran terkait hak belajar tiga semester di luar program studi dalam implementasi MBKM pada PSP Jenjang Sarjana (SK No. 02/Kep/AP2TPI/2020).

PSP Universitas Binawan masih tergolong baru, dengan jumlah mahasiswa yang masih kecil, sehingga terkait dengan penyelenggaraan program MBKM, PSP Universitas Binawan masih mengikuti program besar Universitas Binawan. Pada semester gasal 2020/2021, PSP Universitas Binawan bergabung ke dalam satu program PERMATA-SAKTI (Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara-Sistem Alih Kredit dengan Teknologi Informasi) yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam program ini, PSP mengirimkan 3 mahasiswa yang tertarik untuk mengikuti mata kuliah Kewirausahaan di Program Studi Akuntansi Universitas Ma Chung Malang. Kegiatan ini dilakukan dengan harapan mahasiswa Psikologi mendapatkan kompetensi terkait dengan kewirausahaan, mengingat di kurikulum pertama PSP belum ada mata kuliah kewirausahaan. Kegiatan tersebut akan dicatatkan dalam SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah). Dalam program PERMATA-SAKTI ini, selain mengirimkan mahasiswa, PSP juga menerima mahasiswa sejumlah 25 orang dari 6 Universitas yaitu IKIP PGRI Wates, STIKes Insan Cendekia Medika Jombang, Universitas An Nuur, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Ma Chung dan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Dengan pengalaman dalam program ini, PSP

Universitas Binawan telah menyiapkan program serupa terutama untuk saling mengirim dan menerima mahasiswa, antara PSP dengan Prodi Non-psikologi dari luar Universitas Binawan.

Dengan berangkat dari pengalaman dalam program PERMATA-SAKTI tersebut, PSP kemudian melakukan beberapa upaya perencanaan dalam implementasi program MBKM dalam kurikulum Psikologi. Beberapa yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi program MBKM kepada para dosen dan mahasiswa, khususnya yang berkaitan dengan peluang belajar pada PSP di PT lain atau pertukaran pelajar. Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar setiap dosen dan mahasiswa terpapar program ini, sehingga dapat mengetahui apa yang harus dilakukan. Beberapa informasi yang dipersiapkan Program Studi dan Mahasiswa adalah sebagai berikut.

Program Studi

- a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di PSP pada perguruan tinggi lain.

PSP mengirimkan 3 mahasiswa yang tertarik untuk mengikuti mata kuliah Kewirausahaan di Program Studi Akuntansi Universitas Ma Chung Malang. Kegiatan ini dilakukan dengan harapan mahasiswa Psikologi mendapatkan kompetensi terkait dengan kewirausahaan, mengingat di kurikulum pertama PSP belum ada mata kuliah kewirausahaan. Kegiatan tersebut akan dicatatkan dalam SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah).

ADVERTORIAL**PENGALAMAN PROGRAM STUDI PSIKOLOGI**

- b. Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain terkait dengan proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.

Mahasiswa

- a. Mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing akademik.
 - b. Mengikuti program kegiatan di PSP pada perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi.
 - c. Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di PSP pada perguruan tinggi lain.
2. Membangun atau melakukan inisiasi kerja sama dengan PSP universitas lainnya, baik yang di Jakarta maupun luar Jakarta. Tujuan dari upaya ini adalah untuk memberikan kepastian hukum atas kegiatan belajar yang dilakukan antar perguruan tinggi. Dalam kerja sama ini akan dibahas utamanya adalah berkaitan dengan kesepakatan tentang:
 - a. Penetapan nama dan jumlah mata kuliah (kuota mata kuliah) yang dapat diikuti dalam program MBKM, khususnya pertukaran pelajar dalam PSP pada perguruan tinggi yang berbeda.
 - b. Syarat jumlah SKS dari mata kuliah yang ditawarkan dalam program ini, dengan mengoptimalkan tercapainya CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan) PSP.
 - c. Mekanisme alih kredit mata kuliah yang diambil di perguruan tinggi mitra.
 - d. Proses pelaporan kegiatan pembelajaran ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
 - e. Pembiayaan dari setiap mahasiswa yang mengikuti program pembelajaran di PSP pada perguruan tinggi lain. Berkaitan

dengan pembiayaan ini, bagi mahasiswa dari luar Universitas Binawan, diberlakukan tarif yang sama dengan mahasiswa PSP di Universitas Binawan atau sesuai dengan kesepakatan dalam nota kesepahaman yang dibuat Perguruan Tinggi.

Saat ini, PSP Universitas Binawan masih memiliki akreditasi baik, sehingga apabila ada mahasiswa PSP dari perguruan tinggi lain yang akan ikut belajar di PSP Universitas Binawan, belum diberikan persyaratan akreditasi prodinya. Namun secara spesifik untuk pemilihan mata kuliah diatur sebagai berikut:

1. Sehubungan mata kuliah yang diambil di PSP Universitas Binawan, apabila memiliki mata kuliah prasyarat, maka mata kuliah prasyarat tersebut harus telah ditempuh di perguruan tinggi asal.
2. Jumlah SKS mata kuliah yang diambil di PSP Universitas Binawan sama dengan jumlah SKS mata kuliah yang sama di perguruan tinggi asal.
3. Mata kuliah yang ditawarkan di PSP Universitas Binawan untuk mahasiswa dari luar Universitas Binawan merupakan hasil kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra, sehingga hal ini memberikan peluang adanya perbedaan mata kuliah yang dapat diprogramkan oleh setiap perguruan tinggi mitra.

Dengan mengkaji kesiapan penyelenggaraan program MBKM khususnya program belajar pada PSP di perguruan tinggi lain, diharapkan proses ini dapat berjalan dengan lancar. AP2TPI telah memberikan sarana dengan terbitnya kebijakan yang melandasi pelaksanaan program ini. Mengingat hampir semua PSP di Indonesia menginduk pada AP2TPI, maka capaian pembelajaran lulusan (CPL) sudah selaras. Setiap mata kuliah yang diselenggarakan pastinya memiliki CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) yang menunjang dengan tercapainya CPL program studi.

ADVERTORIAL**PENGALAMAN PROGRAM STUDI PSIKOLOGI**

Keberadaan AP2TPI memudahkan PSP Universitas Binawan untuk menjalin kerjasama dengan PSP dari perguruan tinggi lainnya.

PSP Universitas Binawan menjajagi kerjasama dengan perguruan tinggi yang menyelenggarakan PSP yang di lingkungan Jakarta. Beberapa pertimbangannya adalah:

1. Untuk saat ini koordinasi penjajagan kerjasama dilakukan dengan dengan metode daring, namun tidak menutup kemungkinan apabila harus bertemu luring. Pertemuan dimaksud dapat dilakukan sejauh masih di dalam kota Jakarta.
2. Semua perguruan tinggi di Jakarta berada dalam satu kordinasi di LL DIKTI Wilayah III, sehingga memudahkan untuk koordinasi terkait dengan pengisian data di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
3. Apabila nanti sudah berkesempatan luring, mahasiswa yang merencanakan kuliah pada PSP di Perguruan Tinggi lain tidak perlu ada biaya tambahan untuk akomodasi.

Kesimpulan

Program MBKM yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 jelas memberikan tantangan bagi para pelaku di lingkup pendidikan tinggi. Episode keenam yang diluncurkan benar-benar menunjukkan fokusnya pada pengembangan MBKM untuk perguruan tinggi. Upaya menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja merupakan salah satu pemicu meluncurnya program MBKM. Salah satu program MBKM yang harus diimplementasikan adalah belajar dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda. Harapannya, selain mahasiswa memiliki kompetensi yang sesuai CPL, ada kompetensi tambahan yang sifatnya *soft competencies*, diantaranya adalah adaptasi dengan budaya yang berbeda, belajar menerima keragaman dan bekerja sama dengan individu yang memiliki latar belakang berbeda dan baru dikenal.



Foto 2-5: Tindak lanjut MoU pada masing-masing Prodi. Khusus untuk prodi Psikologi, diprogram pengembangan dukungan psikososial.

Foto-foto menampakkan mahasiswa sedang melakukan intake dalam rangka asesmen kebutuhan warga sekitar

ADVERTORIAL

PENGALAMAN PROGRAM STUDI PSIKOLOGI

Upaya yang dilakukan Program Studi Psikologi/PSP Universitas Binawan terkait dengan implementasi program MBKM dapat disimpulkan dalam beberapa hal penting yang harus dijalankan:

1. Kerjasama dengan perguruan tinggi mitra yang memiliki PSP terutama di lingkungan Jakarta terlebih dahulu.
2. Konsolidasi dengan perguruan tinggi mitra terkait dengan jumlah dan jenis mata kuliah, beban sks dan pembiayaan program pembelajaran.
3. Sosialisasi internal dan eksternal terkait dengan program belajar di PSP perguruan tinggi mitra.

Upaya ini diharapkan akan semakin memberikan bekal pengalaman langsung untuk para mahasiswa. Dengan demikian, selain memiliki keluasaan wawasan, tingkat *employability* mahasiswa juga meningkat.

Mata kuliah yang ditawarkan di PSP Universitas Binawan untuk mahasiswa dari luar Universitas Binawan merupakan hasil kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra, sehingga hal ini memberikan peluang adanya perbedaan mata kuliah yang dapat diprogramkan oleh setiap perguruan tinggi mitra.

Daftar Acuan

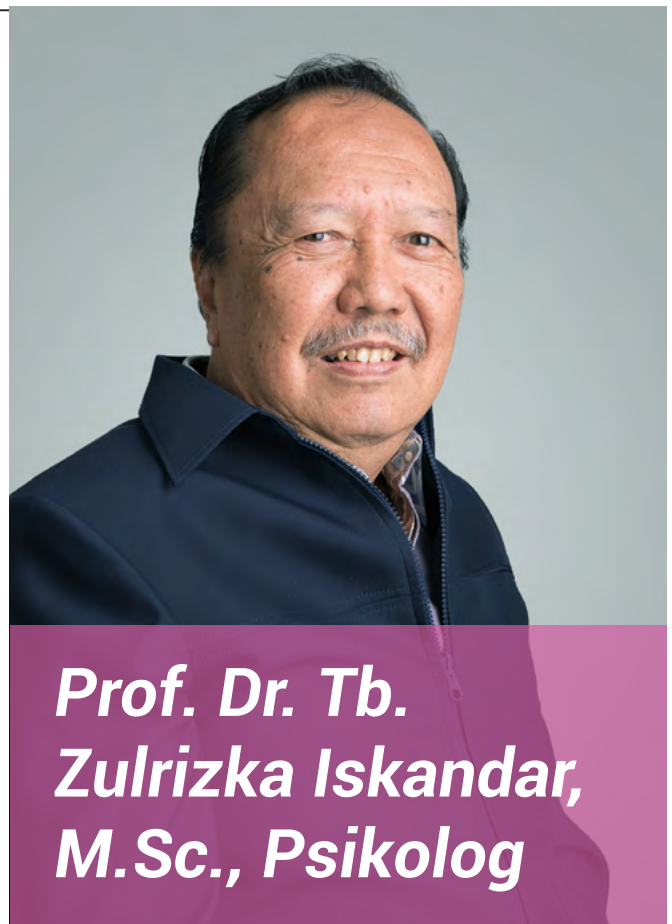
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2020). *Panduan Program Bantuan Program Studi Menerapkan Kerja Sama Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Gardner, J. N., & Barefoot, B. O. (2016). *Your College Experience, Strategies for Success*. Boston : Bedford/St. Martin's.
- Jerald, C. D. (2009). *Defining a 21 st century education*. The Center for Public Education.
- Keputusan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI) nomor: 01/Kep/AP2TPI/2019, Tentang Perubahan atas Surat Keputusan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI) nomor 01/Kep/AP2TPI/2015 tentang Kurikulum Inti Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana.
- Keputusan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI) nomor: 02/Kep/AP2TPI/2020, Tentang Standar Pembelajaran Terkait Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi dalam Rangka Implementasi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka pada Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana.

OBITUARI

Oleh: Retno Hanggarani Ninin

Saya terkejut ketika Dekan Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran (Fapsi Unpad) meminta saya untuk menyusun obituari Prof. Dr. Tb. Zulrizka Iskandar, M.Sc., Psikolog, atau Bang Zul, demikian kami biasa memanggil beliau. Keterkejutan tersebut bukan hanya karena saya belum pernah membuat obituari, melainkan karena saya menyadari, bahwa ketika saya mulai aktif di dunia psikologi sebagai dosen Fakultas Psikologi Unpad di tahun 1998, Bang Zul sudah mengabdikan di situ sejak tahun 1980. Selisih waktu delapan belas tahun (antara tahun 1980-1998) itulah yang tentunya perlu saya isi dengan cerita pengabdian beliau. Namun, ternyata hal itu sama sekali tidak sulit dengan banyaknya cerita yang secara sukarela dibagikan oleh kolega, murid, dan sahabat beliau di sejumlah komunikasi dan acara yang diadakan untuk mengenang beliau, pasca wafatnya beliau pada hari Sabtu, 30 Januari 2021, pukul 14.05 WIB, pada usia 69 tahun, di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Berdasarkan kisah para kolega, murid, dan sahabat beliau itulah, penggalan-penggalan cerita pengabdian beliau dikumpulkan dalam obituari ini.

Bang Zul lahir di Yogyakarta, 13 Oktober 1951. Beliau menjadi mahasiswa di Fakultas Psikologi Unpad sebagai angkatan 1971 dan aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan antara lain Majelis Permusyawaratan dan Perwakilan Mahasiswa, Senat Mahasiswa Fakultas Psikologi Unpad, dan Dewan Mahasiswa Universitas Padjadjaran. Pada organisasi kemahasiswaan tersebut, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Senat pada periode tahun 1976. Beliau lulus dari Pendidikan S1 psikologi dengan peminatan Psikologi Sosial, menempuh studi S2 di Asian Institute of Technology (Khlong Nueng, Thailand) di bidang *Human Settlements Development*, dan selanjutnya mendapatkan gelar Doktor Ilmu Psikologi dari Universitas Padjadjaran dengan disertasi bertema Psikologi Lingkungan.



**Prof. Dr. Tb.
Zulrizka Iskandar,
M.Sc., Psikolog**

Menempati rumah keilmuan di Departemen Psikologi Sosial Fapsi Unpad, bidang Psikologi Lingkungan ini pula yang selanjutnya ditekuni oleh beliau sebagai akademisi hingga menghasilkan dua buah buku ajar psikologi berjudul *Psikologi Lingkungan (Teori dan Konsep)* yang sudah diterbitkan sebagai cetakan ke-2 di tahun 2016 oleh penerbit Refika Aditama, dan *Psikologi Lingkungan (Metode dan Aplikasi)* oleh penerbit yang sama pada tahun 2013.

Sejak saya masih mahasiswa semester akhir di tahun 1996, Bang Zul sudah menjadi Pembantu Dekan I di Fapsi Unpad yang dijabat oleh beliau selama dua periode, yaitu 1996-1998 dan 1998-2000. Kemudian beliau menjabat sebagai Dekan Fapsi Unpad selama dua periode pula, yaitu tahun 2001-2005 dan 2006-2009. Sebelum masa jabatan beliau sebagai dekan periode kedua berakhir, di tahun 2008 beliau ditugaskan untuk menjadi Wakil Rektor IV di Unpad, yaitu Wakil Rektor

yang membawahi Bidang Sumber Daya dan Kerja Sama hingga berakhir di tahun 2012. Setelah itu, beliau memimpin Senat Akademik di Fapsi Unpad, menjadi anggota dari Senat Akademik Unpad, hingga menjadi anggota Majelis Wali Amanat Unpad yang baru dilantik pada tahun 2020. Beliau masih mengemban kedua amanah tersebut di akhir hayat beliau.

Atas pengabdian beliau kepada Universitas Padjadjaran, pada Dies Natalis Unpad ke-63, tahun 2020, Bang Zul menerima anugerah penghargaan Satya Karya Bhakti Maha Guru dari Unpad (Universitas Padjadjaran, 2020). Mengutip tulisan Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, D.E.A. (Rektor Unpad ke-9, yang mengemban amanah sebagai Rektor pada periode ketika Bang Zul menjadi Wakil Rektor IV), “Salah satu karya penting dari Pak Zulrizka Iskandar untuk Unpad adalah dirumuskannya budaya organisasi Unpad, yang disebut RESPECT (*Responsibility, Excellence, Scientific Rigor, Professionalism, Encouragement, Creativity dan Trust*)”, bersama dengan tim yang beranggotakan Prof. Dadi Suryadi, Prof. Suganda Priyatna, Prof. Ernie Tisnawati Sule (alm.), Prof. Eky S. Soeria Soemantri, Handarto, Ph.D., Prof. Ramdan Panigoro, dan Urip Purwono, Ph.D. Budaya RESPECT kemudian diperkenalkan sebagai budaya organisasi Unpad, oleh Rektor Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, D.E.A., dalam acara Dies Natalis Unpad ke-52 pada tahun 2009 (Maulana, 2021). Kurun waktu dua puluh tahun (2001-2021) mengemban amanah mulai dari tingkat fakultas dan universitas tersebut, barulah setengah dari perjalanan pengabdian beliau sebagai psikolog dan dosen, dan baru dalam lingkup internal di kampus Universitas Padjadjaran.

Kontribusi Bang Zul dalam keilmuan dan keprofesian psikologi Indonesia tampak dalam Naskah Akademik Program Magister Pendidikan Psikolog yang disusun oleh Pengurus Kolokium Psikologi Indonesia. Berdasarkan kronologis proses perubahan pendidikan psikolog dari “sarjana plus” menjadi jenjang S2, terlihat bahwa keterlibatan

Bang Zul sudah dimulai sejak inisiasi awal ketika kelompok inisiator tersebut masih merupakan Konsorsium Keilmuan Psikologi yang terdiri dari tiga fakultas psikologi dari tiga perguruan tinggi penyelenggara pendidikan psikologi di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Gadjah Mada, yang diwakili secara *ex-officio* oleh para pimpinan fakultasnya. Saat itu kelompok tersebut masih bernama Konsorsium Keilmuan Psikologi Indonesia (Pengurus Kolokium Psikologi Indonesia, 2008).

Konsorsium Keilmuan Psikologi Indonesia tersebut kemudian berganti nama menjadi Komisi Disiplin Ilmu Psikologi. Ketika komisi tersebut dibubarkan dan diganti menjadi gabungan empat perguruan tinggi negeri dengan penambahan Universitas Airlangga, Bang Zul masih berperan aktif. Wadah komunikasi antar penyelenggara program studi psikologi tersebut kemudian disebut sebagai Kolokium Psikologi Indonesia. Di dalam wadah tersebut, intensitas pertemuannya memuncak di tahun 2000, yang melahirkan format baru pendidikan psikologi di Indonesia. Format baru tersebut disepakati dalam forum Kolokium Psikologi Indonesia dan dipertegas dalam Kongres HIMPSI VIII di tahun yang sama di Bandung. Format baru pendidikan psikologi tersebut adalah bahwa profesi psikolog di Indonesia harus dicapai melalui jenjang pendidikan S2, yaitu Magister Profesi Psikologi, dengan gelar M.Psi.

“Mengutip tulisan Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, D.E.A. (Rektor Unpad ke-9, yang mengemban amanah sebagai Rektor pada periode ketika Bang Zul menjadi Wakil Rektor IV), “Salah satu karya penting dari Pak Zulrizka Iskandar untuk Unpad adalah dirumuskannya budaya organisasi Unpad, yang disebut RESPECT (*Responsibility, Excellence, Scientific Rigor, Professionalism, Encouragement, Creativity dan Trust*)”

“Bang Zul, yang terlibat aktif dalam sebagian besar proses perubahan tersebut, dalam kesempatan bersama di kampus pernah menyampaikan kepada saya bahwa, harapannya, dengan menjadikan profesi psikolog diperoleh melalui jenjang magister adalah agar psikolog Indonesia berada pada posisi yang setara dengan kolega psikolog di lingkungan internasional”.

Terlihat dari dokumen naskah akademik tersebut bahwa para inisiator yang membahas perubahan format pendidikan psikolog tersebut memiliki visi untuk menyetarakan pendidikan psikolog di Indonesia dengan pendidikan serupa di negara lain di Eropa dan Amerika (Pengurus Kolokium Psikologi Indonesia, 2008). Bang Zul, yang terlibat aktif dalam sebagian besar proses perubahan tersebut, dalam kesempatan bersama di kampus pernah menyampaikan kepada saya bahwa, harapannya, dengan menjadikan profesi psikolog diperoleh melalui jenjang magister adalah agar psikolog Indonesia berada pada posisi yang setara dengan kolega psikolog di lingkungan internasional. Tidak hanya Bang Zul terlibat aktif, melainkan dapat dilihat pada naskah akademik tersebut, bahwa beberapa pertimbangan fundamental yang mendasari perubahan format pendidikan psikologi Indonesia merujuk pada makalah yang berisi pemikiran-pemikiran beliau tentang pendidikan psikologi, bersama dengan makalah dari tokoh psikologi Indonesia lainnya, antara lain Prof. Dr. M. Enoch Markum dan Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono.

Komitmen beliau untuk kemajuan psikologi Indonesia tidak berhenti hanya sampai ketika pendidikan psikologi Indonesia sudah berada pada bentuknya saat ini. Sejak beberapa tahun yang lalu, beliau sudah tidak aktif di dalam wadah komunikasi antar penyelenggara pendidikan psikologi Indonesia yang saat ini bernama AP2TPI (Asosiasi Penyelenggara Pendidikan

Tinggi Psikologi Indonesia). Namun beliau tidak berhenti melakukan sesuatu untuk keilmuan psikologi. Beliau aktif mengajak alumni psikologi, khususnya lulusan Unpad, yang sudah terjun ke dunia profesi dan aplikasi selama belasan bahkan puluhan tahun, untuk kembali terhubung dengan kampus dan terlibat dalam pengembangan ilmu psikologi. Bahkan meskipun beliau didiagnosis *Cancer Nasopharinc* dan harus menjalani beberapa kali kemoterapi di sekitar tahun 2018, beliau tetap melakukan pekerjaan akademis, meneliti, dan berkegiatan bersama alumni hingga ke Jakarta (domisili beliau di kota Bandung), selama kondisi kesehatannya memungkinkan.

Salah satu hal yang dijaga oleh Bang Zul sebagai dosen adalah secara konsisten berusaha menjaga keterhubungan para alumni dengan almamaternya. Kang Buntje Harbunangin, alumnus Psikologi Unpad Angkatan 1976, penulis beberapa buku dan salah satu bukunya berjudul “*Art and Jung: Seni Dalam Sorotan Psikologi Analitis Jung*”, dalam catatan mengenang bang Zul yang diedarkan di jejaring sosial alumni Fapsi Unpad, menyebutkan sejumlah kata yang dianggap menggambarkan

“Beliau aktif mengajak alumni psikologi, khususnya lulusan Unpad, yang sudah terjun ke dunia profesi dan aplikasi selama belasan bahkan puluhan tahun, untuk kembali terhubung dengan kampus dan terlibat dalam pengembangan ilmu psikologi. Bahkan meskipun beliau didiagnosis *Cancer Nasopharinc* dan harus menjalani beberapa kali kemoterapi di sekitar tahun 2018, beliau tetap melakukan pekerjaan akademis, meneliti, dan berkegiatan bersama alumni hingga ke Jakarta (domisili beliau di kota Bandung), selama kondisi kesehatannya memungkinkan”.

OBITUARI

ZULRIZKA ISKANDAR

sosok Bang Zul, yaitu BAIK HATI, RENDAH HATI, dan CITA-CITA BESAR, yaitu cita-cita untuk menyatukan dua kekuatan: fakultas dan alumni. Fakta menunjukkan bahwa ketika Bang Zul menjabat sebagai Wakil Rektor IV, beliau “berhasil” mengajak alumni yang saat itu menjadi duta besar Indonesia untuk Uni Eropa, Belgia dan Luxembourg (nama lengkapnya adalah Nadjib Riphath Kesoema, namun di kalangan alumni Fapsi Unpad biasa dipanggil Bang Nadjib), untuk menjadi dosen tamu di Fakultas Psikologi Unpad dan menjadi moderator dalam kegiatan diskusi internasional dengan pembicara asing yang diselenggarakan oleh Unpad. Setelah Bang Zul tidak menjabat sebagai Wakil Rektor, kegiatan “menghubungkan alumni dengan kampus almamater” juga masih berlanjut, dengan mengorganisasikan sejumlah alumni untuk melakukan penelitian bersama, dan kembali “berhasil” mengajak bang

Nadjib untuk menjadi kandidat Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Padjadjaran mewakili unsur masyarakat hingga terpilih untuk menjadi anggota MWA Unpad periode 2020-2025. Ketika itu Bang Nadjib sudah memasuki masa purna bakti setelah menyelesaikan tugas sebagai duta besar Indonesia untuk Australia di tahun 2018. Dalam catatan kenangan yang disampaikan di jejaring sosial alumni Fapsi Unpad, Bang Nadjib menceritakan kisah penyebab keberhasilan Bang Zul mengembalikan beliau ke dalam kehidupan

kampus, yaitu “Saya selalu mengalami kesulitan untuk menolak ajakan Zul, karena semua yang ditawarkannya pasti menarik dan memiliki nilai positif bagi perkembangan diri dan intelektualitas saya...”.

Bang Zul pergi dengan diiringi banyak catatan kenangan dari para kolega, sahabat, dan murid beliau. Beliau pergi sembilan bulan menjelang masa purna baktinya, pada saat masih mengemban amanah sebagai Ketua Senat Fakultas Psikologi Unpad dan anggota Majelis Wali Amanat Unpad. Beliau pergi sebelum mengetahui bahwa buku yang beliau sunting berjudul “Psikologi Lingkungan dalam Terapan” yang ditulis oleh Intan Rahmawati, dkk. dari Universitas Brawijaya, terbit pada bulan yang sama dengan perginya beliau di Januari 2021

(Rahmawati, 2021). Tidak ada fase kehidupan Bang Zul yang vakum dari panggilan tugas hingga di akhir hayat beliau. Hari Jumat tanggal 8 Januari 2021, beliau masih memimpin rapat senat di Fapsi Unpad dan berkomunikasi dengan Ketua Majelis Wali Amanat Unpad untuk koordinasi kerja tentang percepatan pengurusan kenaikan jabatan guru besar di Unpad. Tanggal 19 Januari beliau terdiagnosis positif Covid dan selanjutnya menjalani perawatan di rumah sakit. Tidak ada panggilan tugas yang beliau penuhi setelah itu. Ibu Dra.



Wiwik Indaryati, Psikolog, istri beliau, mengatakan bahwa ketika di ICU dokter merekomendasikan untuk Bang Zul agar menggunakan ventilator karena kondisinya, tetapi Bang Zul tidak bersedia. Bang Zul memiliki dua alasan untuk penolakan tersebut, yaitu pertama, beliau ingin masih bisa melakukan gerakan sholat dengan leluasa. Yang kedua, Bang Zul menyampaikan, “Kalau memang sudah waktunya, biarkan terjadi secara natural”. Bang Zul tidak merespon panggilan tugas, bukan karena beliau tidak amanah. Bang Zul tidak lagi merespon panggilan tugas karena beliau bersiap diri untuk memenuhi panggilan terakhirnya yang juga merupakan panggilan terakhir bagi semua orang, yaitu panggilan Penciptanya. Beliau dimakamkan di pemakaman khusus pasien Covid di Cikadut Bandung, dengan prosesi pemakaman mengikuti standar penanganan jenazah pasien Covid. Begitu mudah, begitu cepat, begitu sederhana. Selamat menempuh perjalanan menemui Sang Pencipta, bang Zul. Doa kami menyertai.

Daftar Acuan

- Maulana, A. (2021, 01 30). *Beranda: Universitas Padjadjaran*. Diakses dari Universitas Padjadjaran: <https://www.unpad.ac.id/2021/01/prof-dr-tb-zulrizka-iskandar-tutup-usia/>
- Pengurus Kolokium Psikologi Indonesia. (2008). *Naskah Akademik Program Magister Pendidikan Psikolog*. Indonesia: Dokumen yang tidak dipublikasikan.
- Rahmawati, I. (2021). *Psikologi Lingkungan dalam Terapan*. Malang: Edulitera.
- Universitas Padjadjaran. (2020, 09 12). *Humas: Universitas Padjadjaran*. Diakses dari Universitas Padjadjaran Web-Site: <https://www.unpad.ac.id/2020/09/unpad-berikan-sejumlah-penghargaan-pada-dies-natalis-ke-63/>

“Bang Nadjib menceritakan kisah penyebab keberhasilan Bang Zul mengembalikan beliau ke dalam kehidupan kampus, yaitu “Saya selalu mengalami kesulitan untuk menolak ajakan Zul, karena semua yang ditawarkannya pasti menarik dan memiliki nilai positif bagi perkembangan diri dan intelektualitas saya...””.

OBITUARI

Jo Rumeser

Sang Pengarah yang Menginspirasi

Esther Widhi Andangsari

Jurusan Psikologi, Fakultas Humaniora, Universitas Bina Nusantara

Jo Rumeser Pendiri Jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Bina Nusantara

Kepergian Jo Rumeser yang dianggap begitu mendadak memberikan rasa duka yang sangat mendalam bagi kami, segenap sivitas akademika Universitas Bina Nusantara. Sosok Jo Rumeser bagi sivitas akademika Jurusan Psikologi dan Fakultas Humaniora, Universitas Bina Nusantara merupakan seorang guru dan juga seorang bapak. Kami kerap memanggilnya hanya dengan sebutan *Bapak* tanpa perlu ada embel-embel nama beliau, semua orang pasti langsung tahu siapa yang dimaksud dengan *Bapak* tersebut. Sapaan akrab lainnya yang juga dikenakan padanya yaitu *Pak Jo* (dibaca Yo).

Johannes Adriaan Arnoldus Rumeser atau Jo Rumeser merupakan salah satu pendiri Jurusan Psikologi, Universitas Bina Nusantara yang pada awal berdirinya tahun 2007 berada di bawah naungan Fakultas Psikologi, Universitas Bina Nusantara. Beliau sekaligus menjadi dekan pertama Fakultas Psikologi, Universitas Bina Nusantara. Sejalan dengan berkembangnya universitas ini,

menjelang akhir tahun 2011 Fakultas Psikologi bergabung dengan Fakultas Sastra menjadi Fakultas Humaniora, Universitas Bina Nusantara dengan dekan pertamanya tetap Jo Rumeser. Dengan demikian Jurusan Psikologi beralih di bawah naungan Fakultas Humaniora. Jo Rumeser memimpin segenap sivitas akademika Fakultas Humaniora sejak tahun 2011 hingga 2018. Posisi beliau setelah itu hingga akhir hayatnya yaitu Senior Advisor, BINUS Higher Education. Universitas Bina Nusantara juga dikenal dengan sebutan BINUS University.

Penulis pertama kali mengenal beliau pada tahun 2006, kala itu Jurusan Psikologi, Universitas Bina Nusantara masih dalam proses pendirian. Jo Rumeser justru yang mendatangi penulis, menyapa dan mengajak untuk nantinya terlibat sebagai seorang pengajar di Jurusan Psikologi yang akan segera berdiri. Perkenalan pertama ini ternyata memberikan arah kehidupan baru bagi penulis hingga saat ini. Tentunya kesan mendalam terhadap beliau memiliki bentuk, warna, dan rasa yang beragam bagi setiap orang yang mengenalnya. Betapa tidak demikian, sebagai seorang pendiri Jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi, dan juga dekan pertama Fakultas Humaniora, BINUS University, beliau kerap *masuk* pada siapa pun yang bersama-sama dengan beliau untuk memajukan fakultas dan universitas ini.

Beberapa orang diantara kami hingga saat ini masih sulit melepas kepergian beliau. Jo Rumeser sudah terlanjur menjadi bagian yang ikonik bagi Fakultas Humaniora, Universitas Bina Nusantara. Dalam kesedihan akan kepergian beliau, perlu dituliskan kenangan tentang Jo Rumeser. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan makna nostalgia mengenai karakteristik kepribadian Jo Rumeser. Makna nostalgia yang diharapkan yaitu inspirasi yang dapat menggerakkan setiap orang baik yang mengenal maupun yang tidak sempat mengenal Jo Rumeser, untuk bergerak maju dan memberi dampak bagi sekitarnya.

Pentingnya Nostalgia

Nostalgia sebenarnya sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu dalam mitologi Yunani. Nostalgia dianggap sebagai salah satu bentuk emosi, bahkan masuk dalam golongan emosi positif (Sedikides & Wildschut, 2020; Wildschut, Sedikides, & Cordaro, 2011). Menurut Sedikides dan Wildschut (2020), nostalgia merupakan kumpulan pengalaman seseorang pada masa lalu, yang membuat seseorang menghargai masa lalu karena terkait dengan relasi antar individu, terkait dengan dirinya sendiri, peristiwa yang berkesan, dan sebagainya. Rasa dari nostalgia pada umumnya ialah kehangatan, kebahagiaan, atau sukacita. Tetapi nostalgia juga bisa diwarnai dengan rasa kehilangan, kesedihan, atau kerinduan pada masa-masa yang telah lewat (Sedikides & Wildschut, 2020). Menurut hasil penelitian eksperimen, meskipun nostalgia itu berasal dari pengalaman atau peristiwa yang tidak menyenangkan, namun dapat dimaknai oleh kognisi manusia menjadi suatu makna yang positif (Routledge, Arndt, Wildschut, Sedikides, Hart, Juhl, Vingerhoets, & Schlotz, 2011). Pada tulisan Sedikides dan Wildschut (2020), dipaparkan dampak nostalgia bagi manusia, diantaranya membangkitkan optimisme, harapan, memberikan motivasi intrinsik, dan sebagainya.

Mencermati dampak positif dari nostalgia ini, maka perlu membagikan nostalgia mengenai Jo

Rumeser kepada siapa pun. Banyak pengalaman yang berkesan yang dirasakan oleh setiap orang yang pernah berinteraksi dengan beliau. Perspektif mengenai beliau tentunya sangat beragam. Keragaman ini tidak dapat disatukan. Penulis menganggap keragaman kenangan tersebut justru memperkaya kita semua terhadap pengenalan Jo Rumeser. Tulisan ini, tanpa bermaksud tidak menghargai keragaman yang ada tadi, lebih banyak didasarkan pada nostalgia penulis dan beberapa pengajar dari Jurusan Psikologi, Fakultas Humaniora, Universitas Bina Nusantara.

Davis (1979) menyatakan bahwa fokus dari nostalgia sebenarnya bukanlah pada masa lalu. Fokus nostalgia justru pada masa depan. Bagi Davis, nostalgia dianggap seperti vitamin yang diperlukan bagi manusia untuk menjalankan kehidupan termasuk menyongsong kehidupan pada masa depan. Tidak heran para pakar nostalgia memandang nostalgia sebagai unsur pembangun masa depan melalui masa lalu.

Jo Rumeser sudah mendahului kita semua menyelesaikan pertandingan kehidupannya di dunia. Meskipun beliau sudah tiada, namun beliau tetap *hidup* dalam nostalgia, sehingga orang yang masih hidup mendapatkan motivasi atau 'vitamin' untuk mencapai tujuan hidupnya. Nostalgia tentang Jo Rumeser didasarkan pada karakteristik kepribadian beliau menurut konsep *Lumina Spark* (<https://luminalearning.com/products/lumina-spark>).

Sekilas Lumina Spark

Bulan Desember tahun 2013 merupakan pengalaman pertama kami berkenalan dengan *Lumina Spark*. Kala itu, penulis bersama Pak Jo, dan dua rekan lainnya (Raymond Godwin sebagai Ketua Jurusan Psikologi dan Pingkan Rumondor sebagai Koordinator Riset Jurusan Psikologi) mendapatkan paparan mengenai alat ukur kepribadian generasi baru bernama *Lumina Spark*. Ibu Ayleen Wisudha sebagai Perwakilan

Lumina Learning, London sekaligus Deputy Head of Business Psychology, Westminster University, UK memberikan penjelasan yang menarik mengenai ini. Pak Jo yang membawa Ibu Ayleen bertemu dengan kami mengingat Ibu Ayleen adalah kawan lama beliau dan juga adik kelas Pak Jo semasa berkuliah di Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia. Buntut dari pertemuan itu pada Mei 2014, kami berempat akhirnya menjalankan proses sertifikasi sebagai seorang praktisi *Lumina Spark*. Sepanjang kami menjalani proses sertifikasi, salah satu hal yang menarik ialah cerita mengenai nostalgia Pak Jo dan Ibu Ayleen mengenai masa-masa perkuliahan di Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia. Bagi penulis bersama Raymond Godwin dan Pingkan Rumondor, hal tersebut bukan menjadi hal yang aneh mengingat penulis dan dua rekan tersebut juga merupakan alumni dari kampus yang sama dengan mereka berdua.

Lumina Spark disusun oleh Stewart Desson pada tahun 2009 dengan berbasis pada teori kepribadian Jung dan memodifikasinya dengan *Big Five* (Benton, 2017). Kuesioner *Lumina Spark* terdiri dari 144 butir pernyataan dan tidak memaksakan orang untuk harus memilih salah satu pernyataan (*forced choice*). Sehingga luaran dari kuesioner ini akan diperoleh gambaran kepribadian yang bisa saja nilainya memiliki skor yang sama tinggi untuk dua kutub yang berlawanan (Benton, 2017). Hal ini sengaja dirancang sedemikian rupa karena instrumen ini memang ditujukan untuk mengakomodasikan adanya kontradiksi dalam kepribadian seseorang. Semisal seorang ekstrovert dalam kepribadiannya juga terlihat aspek introvert. Hal ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar mengingat kepribadian manusia adalah sesuatu yang unik dan dinamis. Dalam tulisan ini, penulis turut mengenang kontradiksi dalam kepribadian Jo Rumeser. *Lumina* menggunakan istilah *embracing paradox* (Lumina Learning, 2013).

Kontradiksi kepribadian Jo Rumeser terlihat dari dua kutub aspek yang berlawanan yaitu *Outcome Focused* dan *People Focused* (Desson & Benton,

in press). Pak Jo memiliki nuansa yang kuat pada pencapaian target, prestasi, dan senang tantangan. Ini merupakan karakteristik dari *Outcome Focused*. Di sisi lain, beliau juga tidak menginginkan adanya konflik dengan orang lain ketika penetapan target diserahkan pada jajaran di bawahnya untuk dikerjakan. Pertemuan yang singkat dan padat, kerap dibawakan dalam nuansa yang humanis. Sisi *People Focused* pada diri Jo Rumeser yaitu mengakomodasikan kebutuhan orang lain dan pendapat orang lain, serta mengedepankan pencapaian target dalam nuansa kolaboratif. Beliau tidak senang bila kami mengejar target seorang diri. Kami harus berkolaborasi. Perkataan beliau yang selalu terkenang hingga saat ini, “*Kalau maju jangan sendirian dong, tapi rame-rame. Tim yang baik itu kalau setiap orang saling back-up!*”

Pada tulisan ini penulis memaparkan karakteristik kepribadian Jo Rumeser yang paling berkesan dan dijelaskan melalui aspek tertentu dari *Lumina Spark*. Kuesioner ini disokong oleh 8 aspek yaitu *Inspirational Driven*, *Big Picture Thinking*, *Extraverted*, *Outcome Focused*, *Discipline Driven*, *Down to Earth*, *Introverted*, dan *People Focused* (Benton, 2017). Tidak semuanya akan ditunjukkan contoh perilaku Jo Rumeser yang menggambarkan setiap aspek tersebut dalam dirinya. Setidaknya penulis memaparkannya berdasarkan aspek yang terlihat dominan dan *dirasakan* oleh penulis dan

“Pak Jo memiliki nuansa yang kuat pada pencapaian target, prestasi, dan senang tantangan. Ini merupakan karakteristik dari *Outcome Focused*.

Di sisi lain, beliau juga tidak menginginkan adanya konflik dengan orang lain ketika penetapan target diserahkan pada jajaran di bawahnya untuk dikerjakan”.

rekan selama berinteraksi dengan beliau. Pada dasarnya setiap orang memiliki kedelapan aspek tersebut dalam dirinya. Kedelapan aspek tersebut menunjukkan dinamika dalam kepribadian seseorang dan turut menjadi salah satu pembeda antar pribadi.

Jo Rumeser yang *Outcome Focused* dan *Inspirational Driven*

Merenungkan mengenai beliau, penulis sempat merasa ‘tersesat’ bahwa nuansa dominan dari kepribadian beliau ialah *Inspirational Driven*. Kaum *inspirational driven* memiliki indikator perilaku adaptif, fleksibel, dan spontan (Lumina Learning, 2013). Ciri khas dari *Inspirational Driven* yaitu merasa nyaman untuk bekerja dengan gaya yang informal. Spontanitas Pak Jo kerap muncul saat waktu bebas. Ajakan makan di luar yang kerap mendadak menambah suasana cair dalam kepenatan rutinitas pekerjaan. Beliau pun juga sering tidak menolak spontanitas ajakan dari tim, termasuk sambutan beliau terhadap ide yang kadang juga muncul secara spontan. Kenangan penulis dan rekan mengenai ciri *inspirational driven* ini tidaklah salah. Tetapi setelah direnungkan kembali, bukan ini yang dominan. Karakteristik beliau yang dominan yaitu *outcome focused*.

Orang dengan ciri *outcome focused* yaitu orang yang kompetitif, logis, dan tahan banting (*tough*) (Lumina Learning, 2013). Pak Jo sebagai seorang pendiri dari Jurusan Psikologi, BINUS University serta dekan pertama dari Fakultas Humaniora, BINUS University, terlihat sekali tetap menginginkan kedua unit dalam universitas ini senantiasa berjalan pada rel yang telah beliau pasang. Penulis menyadari perilaku khas beliau untuk memastikan bahwa kami tetap *on the track* dengan konfrontatif walau secara halus saat kami memilih cara atau pilihan yang berbeda dengan beliau. Nuansa fleksibel dan adaptif dari gayanya yang *inspirational driven* tetap terasa saat berinteraksi dengan kami. Sesungguhnya beliau menginginkan kami untuk melakukan sesuatu,

atau menetapkan kebijakan tertentu, namun beliau tidak ingin terkesan memaksakan pendapatnya. Pak Jo menantang tindakan kami dengan pernyataan-pernyataannya bahkan memberikan artikel, buku yang mendukung pemikiran beliau. Ada kalanya beliau tegas dan tidak mau diubah pendiriannya. Dalam hal ini penulis cukup terkejut dengan caranya yang tegas itu, boleh dikatakan sangat *to the point* dan terkesan berlawanan dengan fleksibilitasnya. Semakin kami dekat dengan beliau seiring dengan berjalannya waktu, semakin beliau lebih berani untuk membuka dirinya termasuk ketidaksetujuannya terhadap keputusan dan perilaku kami.

Cara bicara beliau menunjukkan gaya yang *outcome focused* tersebut. Pak Jo bukanlah orang yang banyak bicara. Sedikit bicara, langsung pada inti persoalan, dan tegas. Bahkan saat memberikan kata sambutan pun, beliau sering benar-benar hanya mengatakan sepatah-dua patah kata secara harfiah. Ya benar-benar singkat, semisal, “*Saya buka acara ini ya. Selamat buat kita semua!*” hanya itu tanpa gaya seorang pejabat pada umumnya. Atau semisal, “*Selamat pagi! Tetap semangat dan terima kasih!*”. Termasuk ketika orang lain meminta untuk bertemu dan berbicara padanya, sesungguhnya beliau lebih senang bila disampaikan secara ringkas saja, tanpa berbelit-belit. Namun dalam kontradiksi kepribadiannya terhadap *people focused*, beliau juga tidak mau memaksakan orang lain itu langsung pada pokok masalahnya bila memang orang tersebut merasa tidak nyaman. Pak Jo memiliki kepekaan terhadap orang lain. Kualitas perilaku dari *people focused*, yaitu empatik, terlihat disitu.

Pernah suatu kali beliau menetapkan satu proyek bagi Jurusan Psikologi yang terkesan *impossible* kala itu. Penetapan yang sangat menantang sehingga membuat penulis dan rekan menjadi merasa sangat terbebani bahkan hampir merasa frustrasi. Kami diminta untuk mempersiapkan acara besar dengan mengundang seorang professor dari Kanada ahli bidang Psikologi Industri dan Organisasi. Waktu persiapan yang singkat serta nuansa politik

di Indonesia kala itu turut menambah tekanan dari kemustahilan. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan dan nominal yang harus diperoleh dari acara tersebut. Nuansa *outcome focused*, yaitu kompetitif, begitu terasa. Dalam kondisi yang nyaris frustrasi, Pak Jo menghampiri penulis secara personal dan menyampaikan bahwa beliau akan membantu penulis dan rekan mengerjakan proyek ini. Nampaknya beliau sudah mengamati dinamika upaya keras tim Jurusan Psikologi dan perasaan kami. Bala bantuan pun diberikan bukan dalam bentuk 'ikan' tetapi dalam wujud 'kail'. Beliau menghubungkan penulis dan tim dengan pihak tertentu seperti Iradat dan rekan dosen dari Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia. Hampir setiap hari beliau dan penulis berinteraksi untuk membagikan laporan kemajuan. Bahkan pernah saat masih subuh, beliau menghubungi penulis untuk menyampaikan informasi tertentu yang penting. Pada *momen* inilah penulis semakin merasakan nuansa *outcome focused* dalam diri beliau. Mengarahkan seseorang, menantang seseorang, tetapi memberikan bantuan yang tepat agar orang tersebut bertumbuh.

Kenangan penulis mengenai gaya yang *outcome focused* ini ternyata juga dirasakan sangat kuat oleh putri tunggal beliau. Saat peringatan 7 hari meninggalnya Pak Jo, putri beliau menceritakan betapa kuatnya beliau menetapkan target dan 'memaksa' putrinya untuk terus berjuang agar berhasil. Nampaknya karakteristik ini yang membuat beliau menjadi seorang atlet, pelatih, serta konsultan olahraga yang berhasil. Pak Jo menunjukkan perilaku yang ingin

mengarahkan orang lain, tetapi bukan dengan cara yang memaksa sehingga orang menjadi tidak termotivasi. Beliau menggiring orang lain dengan idenya dan terstruktur dalam pemikirannya, baik secara tersamar maupun terang benderang, sehingga kami tetap pada jalur yang sebenarnya yang telah dirancang oleh beliau.

Bila kembali pada karakteristik *inspirational driven* yang turut nyata dalam diri Jo Rumeser, maka tepat jika beliau memang merupakan pribadi yang didorong oleh inspirasi dan menjadi inspirasi. Nuansa *inspirational driven* ini dikombinasikan dengan *big picture thinking*, yaitu aspek yang memiliki indikator perilaku konseptual, imajinatif, dan radikal (Lumina Learning, 2013). Bergabung dengan *inspirational driven* yang adaptif, fleksibel, serta spontanitas menjadikan sosok Jo Rumeser adalah orang yang tepat untuk bertukar pandangan dan ide. Bahkan ide yang liar sekalipun. Sejak awal berdirinya Jurusan Psikologi, BINUS University, Pak Jo menginginkan keilmuan dari jurusan ini memiliki nuansa akan Psikologi Industri dan Organisasi yang aplikatif. Beliau menetapkan mata kuliah *Assessment Center Method, Knowledge*

Management, Human Performance, dan *Organizational Behavior and Leadership* untuk mahasiswa tingkat sarjana. Bagi beberapa orang yang mengetahui, hal ini dianggap sebagai sesuatu yang 'besar' dan dianggap 'berat' untuk seorang mahasiswa Psikologi tingkat sarjana. Tetapi tidak bagi Jo Rumeser. Secara perlahan beliau mendorong kami untuk menangkap ide besar ini, dan tentunya harus terwujud. Penulis pernah menantang kembali beliau untuk



OBITUARI

JO RUMESER

mempersiapkan tim kecil agar tim ini dapat meneruskan nuansa aplikatif dari keilmuan PIO ini. Beliau menyambut dengan senang dan terlihat sangat bekerja keras untuk mewujudkan itu hingga akhirnya pada 7 Desember 2020 beliau tidak lagi bersama kami. Pertemuan dengan tim kecil setiap mata kuliah tersebut berakhir pada penghujung tahun 2020 dan kami harus mandiri untuk melanjutkannya.

“Pak Jo menunjukkan perilaku yang ingin mengarahkan orang lain, tetapi bukan dengan cara yang memaksa sehingga orang menjadi tidak termotivasi. Beliau menggiring orang lain dengan idenya dan terstruktur dalam pemikirannya, baik secara tersamar maupun terang benderang”.

Bukan hanya terkait keilmuan saja, beliau juga turut menyumbangkan ide besar bagi BINUS University dengan nuansa humanisnya. BINUS University yang dikenal dengan teknologi informasi yang canggih dengan nuansa terstrukturnya, keterlibatan Jo Rumeser sebagai Dekan Humaniora dan kemudian menjadi Senior Advisor, turut memberikan nuansa yang bersifat lentur. Salah satu hal yang berubah yaitu rapat besar dosen se-BINUS yang biasanya diisi dengan paparan informasi saja dan sangat terstruktur, berubah dengan tambahan nuansa humanis. Biasanya rapat dibuka dengan sambutan dan presentasi, tetapi sejak beberapa tahun belakangan, dibuka dengan musik, lagu, selingan parodi, humor, dan sebagainya. Pak Jo pernah menyampaikan bahwa itu terjadi ketika beliau diminta saran oleh Rektor BINUS University untuk memberikan suasana humanis dalam BINUS, dan diberikan saran oleh Pak Jo untuk merubah suasana rapat. Kesan fleksibel, guyub, dan humanis itu setidaknya turut dirasakan oleh penulis dan mendatangkan kesenangan. Nuansa itu juga

diusulkan oleh Pak Jo bagi Fakultas Humaniora. Tradisi angkringan sejak awal berdirinya Fakultas Humaniora memberikan ciri khas sebagai fakultas yang berbeda, unik, spontan, fleksibel, di universitas yang sangat ber-teknologi ini.

Inspirational driven yang berbalut *people focused* terlihat saat beliau ingin memberikan umpan balik terhadap cara kerja, perilaku tim Psikologi, BINUS University. Jo Rumeser tidak memberikan dengan mengumpulkan kami lalu memberikan semacam wejangan, arahan, dan perintah, yang kadang itu pernah dilakukannya tapi justru sangat jarang terjadi. Bukan begitu cara beliau mengarahkan tim Psikologi, BINUS University. Nuansa *intimacy* sebagai salah satu ciri dari *people focused* dilakukan oleh Jo Rumeser melalui pemberian buku dan barang kenangan yang selalu diselipkan tulisan singkat. Isi tulisan biasanya kesimpulan beliau tentang perilaku kami dan saran singkat bagaimana sebaiknya kami berkembang. Cara itu setidaknya membuat penulis tidak merasa digurui,

“Salah satu hal yang berubah yaitu rapat besar dosen se-BINUS yang biasanya diisi dengan paparan informasi saja dan sangat terstruktur, berubah dengan tambahan nuansa humanis. Biasanya rapat dibuka dengan sambutan dan presentasi, tetapi sejak beberapa tahun belakangan, dibuka dengan musik, lagu, selingan parodi, humor, dan sebagainya. Pak Jo pernah menyampaikan bahwa itu terjadi ketika beliau diminta saran oleh Rektor BINUS University untuk memberikan suasana humanis dalam BINUS”.

OBITUARI

JO RUMESER

diperintah, tetapi dihargai dan didewasakan. Penulis membayangkan betapa beliau harus meluangkan waktu untuk duduk dan merefleksikan pengamatan beliau terhadap kami, dan menuliskannya dengan tepat serta memilih buku atau barang-barang tertentu dengan tepat untuk diberikan pada kami satu persatu. Tanpa sadar itu menjadi inspirasi dan contoh yang akhirnya diikuti. Pak Jo juga kerap menemui 1-2 orang dari tim untuk berdiskusi,

mendengarkan usulan, memberikan usulan, ide, dan pastinya ketika beliau melakukan itu, tidak pernah ada janji pertemuan. Selalu spontan, mengintip ke dalam ruangan kami, serta masuk menghampiri dengan gayanya yang fleksibel. Pendekatan beliau tidak formal, tetapi informal. Hal ini yang membuat penulis dan rekan tidak merasa berjarak dengan beliau. Mungkin itu sebabnya beliau memang layak disebut dengan *Bapak*.

Penutup

Nostalgia tentang Jo Rumeser memang tidak cukup dituliskan dalam lembar-lembar tulisan ini. Masih cukup banyak nostalgia tentang beliau yang tersimpan dalam hati dan pikiran penulis serta tim dari Jurusan Psikologi dan tim Fakultas Humaniora, BINUS University. Kenangan beliau kiranya dapat menghidupkan kembali beliau yang telah tiada, menjadi inspirasi bagi yang masih hidup untuk dapat menjalankan masa depan yang lebih baik. Selamat jalan Bapak. Kiranya semangat dan ide Bapak dapat kami teruskan untuk membangun Jurusan Psikologi, Fakultas Humaniora, Universitas Bina Nusantara.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Raymond Godwin, Ketua Jurusan Psikologi, Universitas Bina Nusantara atas bantuannya dalam memberikan kontribusi ide untuk tulisan ini.

“Nuansa intimacy sebagai salah satu ciri dari *people focused* dilakukan oleh Jo Rumeser melalui pemberian buku dan barang kenangan yang selalu diselipkan tulisan singkat. Isi tulisan biasanya kesimpulan beliau tentang perilaku kami dan saran singkat bagaimana sebaiknya kami berkembang. Cara itu setidaknya membuat penulis tidak merasa digurui, diperintah, tetapi dihargai dan didewasakan”.

Daftar Acuan

- Benton, S. (2017). Psychometrics: The Evaluation and Development of Team Performance. In B. Cripps (Ed.), *Psychometric Testing: Critical Perspectives, First Edition* (pp. 129-144). John Wiley & Sons, Ltd. doi:DOI:10.1002/9781119183020
- Davis, F. (1979). *Yearning for yesterday: A sociology of nostalgia*. New York: The Free Press.
- Desson, S., & Benton, S. (in press). Measuring Both Ends of the Big 5 Personality Scales Independently. In J. Abraham (Ed.), *Psikoteknologi Kontekstual Dalam Revolusi Industri 4.0*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lumina Learning. (2013). *Lumina Spark Qualification Manual*. Camberley, UK: Lumina Learning.
- Routledge, C., Arndt, J., Wildschut, T., Sedikides, C., Hart, C. M., Juhl, J., . . . Schlotz, W. (2011). The Past Makes the Present Meaningful: Nostalgia as an Existential Resource. *Journal of Personality and Social Psychology*, 101(3), 638–652. doi:https://doi.org/10.1037/a0024292
- Sedikides, C., & Wildschut, T. (2020). Chapter Three - The motivational potency of nostalgia: The future is called yesterday. In A. J. Elliot (Ed.), *Advances in Motivation Science* (Vol. 7, pp. 75-111). Elsevier. doi:https://doi.org/10.1016/bs.adms.2019.05.001.
- Wildschut, T., Sedikides, C., & Cordaro, F. (2011). Self-Regulatory Interplay Between Negative and Positive Emotions: The Case of Loneliness and Nostalgia. In I. Nyklíček, A. Vingerhoets, & M. Zeelenberg (Eds.), *Emotion Regulation and Well-Being* (pp. 67-83). New York: Springer. doi:https://doi.org/10.1007/978-1-4419-6953-8_5

RESENSI

MENGAJAR DIFABEL
DI KAMPUS INKLUSIF

Pengalaman UIN Sunan Kalijaga



ARIF MAFTUHIN, SRI ROHYANTI ZULAIKHA, NURUS SAADAH
NURUL HAK, MUQOWIM, ACHMAD ZAINAL ARIFIN
MUHAMMAD IZZUL HAQ, BAYU MITRA A. KUSUMA, HAMDAN DAULAY
ANDAYANI, MARWIYAH, RISWANTI BUDI SEKARINGSIH
NIKEN PUSPITASARI, ASTRI HANJARWATI, LATHIFUL KHULUQ
RO'FAH, ANDI PRASTOWO, LABIBAH ZAIN, SITI AMINAH

EDITOR: ARIF MAFTUHIN

- **Judul Buku:**
Mengajar Difabel di Kampus Inklusif: Pengalaman UIN Sunan Kalijaga
- **Editor:**
Arif Maftuhin
- **Penulis:**
Arif Maftuhin, Ro'fah, Muqowim, Sri Rohyanti Zulaikha, Nurus Saadah, Nurul Hak, Achmad Zainal Arifin, Bono Setyo, Muhammad Izzul Haq, Bayu Mitra A. Kusuma, Hamdan Daulay, Andayani, Marwiyah, Riswanti Budi Sekaringsih, Niken Puspitasari, Astri Hanjarwati, Lathiful Khuluq, Andi Prastowo, Labibah Zain, Siti Aminah
- **Penerbit:**
PLD Press
- **Cetakan:**
Agustus 2020
- **Tebal:**
xxii + 162 hlm

Oleh: Frieda Maryam Mangunsong Siahaan

Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia

Lahirnya buku berjudul *Mengajar Difabel di Kampus Inklusif: Pengalaman UIN Sunan Kalijaga* ini merupakan salah satu wujud semakin baiknya perhatian yang diberikan pada pelaksanaan pendidikan bagi individu berkebutuhan khusus. Mengapa saya berkata demikian? Apabila kita tinjau pandangan masyarakat terhadap individu berkebutuhan khusus, kita akan mendapati bahwa awalnya individu berkebutuhan khusus hanya dianggap sebagai orang yang memiliki keterbatasan, permasalahan kesehatan sehingga perlu disembuhkan secara medis, dilihat kekurangannya untuk dapat ditingkatkan. Pandangan dengan label negatif, buruk, terasing, terabaikan ini, kemudian berubah menjadi model sosial yaitu memandang

individu berkebutuhan khusus sebagai bagian dari masyarakat sosial. Mereka pun dilihat memiliki hak dan keberhargaan yang sama dengan individu lainnya. Adanya perubahan pandangan mengenai individu berkebutuhan khusus ini memberikan dampak yang positif, salah satunya adalah semakin banyaknya perhatian dan upaya untuk memenuhi hak mereka, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan (Mangunsong, 2014).

Di Indonesia, upaya untuk memberikan hak pendidikan pada individu berkebutuhan khusus telah dimulai sejak tahun 1900-an, ditandai dengan pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB). Pendirian SLB ini pun dilakukan secara bertahap, dimulai dari

RESENSI

MENGAJAR DIFABEL DI KAMPUS INKLUSIF

pendirian SLB untuk tunanetra pada tahun 1901, SLB untuk tunagrahita pada tahun 1927, dan SLB untuk tunarungu pada tahun 1930 (Krisnan, 2020). Seiring dengan bertumbuhnya sekolah khusus ini, konsep pendidikan untuk individu berkebutuhan khusus juga terus mengalami perkembangan dari yang awalnya menggunakan konsep segregasi, menjadi integrasi, hingga yang terkini adalah inklusif. Pada konsep segregasi, pendidikan bagi individu berkebutuhan khusus dilaksanakan secara terpisah dari siswa-siswa normal. Inilah konsep yang digunakan dengan adanya sekolah umum dan sekolah khusus (SLB). Konsep ini kemudian berkembang menjadi konsep integrasi yaitu individu berkebutuhan khusus dapat menempuh pendidikan di sekolah umum, hanya saja mereka dididik di ruang terpisah. Pada konsep ini, individu berkebutuhan khusus dituntut untuk dapat menyesuaikan diri di lingkungan pendidikan umum yang ia tempati. Konsep terkini dalam pelaksanaan pendidikan bagi individu berkebutuhan khusus adalah inklusif yaitu individu berkebutuhan khusus dapat menempuh pendidikan bersama dengan individu-individu tipikal di ruang kelas yang sama. Dalam konsep ini, institusi pendidikan dan seluruh elemennya diharapkan dapat memfasilitasi individu berkebutuhan khusus agar dapat mengakses layanan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu perlu ada fasilitas fisik seperti jalan landai bagi individu yang menggunakan kursi roda, ada media pembelajaran yang dapat diakses oleh individu berkebutuhan khusus seperti materi pembelajaran tertulis bagi individu tunarungu, ada modifikasi metode pembelajaran sebagai upaya mengakomodasi kebutuhan belajar individu berkebutuhan khusus di kelas, dan berbagai upaya lain untuk melayani individu berkebutuhan khusus. Adanya konsep pendidikan inklusif ini bukan serta merta menghapuskan konsep segregasi yang sudah berjalan selama satu abad terakhir (Sunardi & Sunaryo, 2011).

Selama ini perhatian pada pengembangan dan kesiapan pendidikan inklusif banyak diarahkan pada tingkat Sekolah Dasar, bertahap perhatian pada pelaksanaan pendidikan bagi individu

berkebutuhan khusus di tingkat pendidikan menengah. Sementara itu di tingkat perguruan tinggi bisa dikatakan masih 'kalah pamor', karena masih sangat jarang individu berkebutuhan khusus bisa meneruskan pendidikan sampai ke tingkat universitas. Hal ini berdampak pada minimnya literatur yang dapat memberikan gambaran mengenai pemberian layanan pendidikan bagi individu berkebutuhan khusus di perguruan tinggi, apalagi di Indonesia. Di sinilah buku *Mengajar Difabel di Kampus Inklusif: Pengalaman UIN Sunan Kalijaga* ini seolah menjadi oase di tengah padang pasir. Buku ini menjadi buku pertama dalam literatur Indonesia yang mendokumentasikan proses belajar mengajar di perguruan tinggi inklusi.

Buku yang ditulis oleh sekumpulan pendidik di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, ini terdiri dari pengantar dan tulisan dua puluh bab yang setiap babnya ditulis oleh pendidik yang berbeda. Sebagai pengantar, editor yang merupakan ketua Pusat Layanan Difabel (PLD) Kampus UIN Sunan Kalijaga menceritakan mengenai sejarah layanan pendidikan bagi individu berkebutuhan khusus di Indonesia hingga berdirinya PLD sebagai upaya pendidik di UIN Sunan Kalijaga untuk memberikan layanan pendidikan secara maksimal pada mahasiswanya yang berkebutuhan khusus. Secara rendah hati editor menuliskan bahwa PLD bukan didirikan oleh orang-orang yang ahli dalam bidang pendidikan luar biasa, namun didirikan oleh orang-orang yang ingin memberikan layanan pendidikan terbaik bagi mahasiswa berkebutuhan khusus di UIN Sunan Kalijaga. Selain itu editor juga menjelaskan mengapa UIN Sunan Kalijaga hingga saat ini masih lebih suka menggunakan istilah difabel ketimbang disabel, yakni karena mereka yakin bahwa mahasiswa-mahasiswanya yang berkebutuhan khusus ini benar-benar memiliki kemampuan yang berbeda (*different ability*) jika dibandingkan dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya.

Pada dua puluh bab isi buku, para pendidik yang berkontribusi menulis buku ini membagikan pandangan mereka mengenai pendidikan

RESENSI

MENGAJAR DIFABEL DI KAMPUS INKLUSIF

inklusif dengan gaya bebas seperti menuliskan cerita karena memang yang dituliskan adalah pengalaman langsung mereka ketika berinteraksi dan mendidik mahasiswa-mahasiswinya yang difabel. Di akhir tulisannya, beberapa kontributor juga tidak segan menuliskan pelajaran-pelajaran yang dapat mereka ambil dari pengalamannya sendiri ataupun menyarikan tips penting yang akan berguna bagi para pembaca yang akan melaksanakan pendidikan bagi difabel di perguruan tinggi. Banyak pelajaran yang dapat diambil dari dua puluh bab isi buku ini, mulai dari paradigma dalam memandang mahasiswa berkebutuhan khusus, cara merancang kelas inklusif, cara mengajar ketika ada mahasiswa difabel di kelas, cara melibatkan difabel dalam tugas-tugas kelompok, sampai dengan bagaimana membuat difabel merasa nyaman dan menjadi bagian dari kelas. Selain menceritakan bagaimana mereka berinteraksi dengan difabel di dalam kelas, beberapa penulis juga menceritakan bagaimana mereka melakukan interaksi akademik di luar kelas, seperti bagaimana mereka menyediakan kebutuhan akses perpustakaan yang ramah difabel, melibatkan difabel dalam kegiatan Praktik Kuliah Lapangan (PKL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN), hingga bimbingan dan ujian tugas akhir (skripsi/tesis) mahasiswa difabel.

Isi buku ini menggambarkan upaya UIN Sunan Kalijaga untuk memenuhi amanat kebijakan pendidikan di Indonesia. Diantaranya adalah Undang Undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Mendikbud RI No. 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus (Mangunsong, 2014); yang kemudian dilanjutkan dengan bagaimana implementasi dari peraturan Pendidikan Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus Pada Pendidikan Tinggi, Peraturan Mendikbud RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, dan yang terakhir adalah Peraturan Menristekdikti RI No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi. Sejak peraturan ini dicanangkan pada tahun 2017,

maka saya maupun tim penyusun peraturan ini dengan Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran Kemenristek Dikti yang mana saya sendiri juga turut berkontribusi dalam perencanaannya, melakukan sosialisasi, *training of trainers* ke berbagai perguruan tinggi di Indonesia, khususnya PTN.

Kenyataan dan lanjutannya, banyak perguruan tinggi yang ingin “belajar” mengetahui, memahami dan mencontoh bagaimana sebenarnya strategi pelaksanaan pendidikan inklusif ini dipraktikkan di lapangan. Memang belum banyak, atau bahkan masih langka perguruan tinggi yang sudah menerima mahasiswa berkebutuhan khusus, meskipun sudah ada kebijakan-kebijakan Pendidikan Inklusif. Amanat dari kebijakan-kebijakan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi pada institusi pendidikan adalah: memberikan hak pendidikan bagi individu berkebutuhan khusus dengan cara menyelenggarakan pendidikan khusus termasuk di tingkat perguruan tinggi, menyediakan sarana prasarana yang memadai, memfasilitasi proses pembelajaran dan penilaian untuk individu berkebutuhan khusus, hingga membentuk unit layanan disabilitas yang salah satunya berfungsi untuk melakukan peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan pendidikan khusus.

Salah satu perguruan tinggi yang menjadi rujukan model penyelenggaraan pendidikan inklusif yang

“Editor juga menjelaskan mengapa UIN Sunan Kalijaga hingga saat ini masih lebih suka menggunakan istilah difabel ketimbang disabel, yakni karena mereka yakin bahwa mahasiswa-mahasiswinya yang berkebutuhan khusus ini benar-benar memiliki kemampuan yang berbeda (*different ability*) jika dibandingkan dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya”.

RESENSI

MENGAJAR DIFABEL DI KAMPUS INKLUSIF

paling awal dan sudah lama adalah UIN Sunan Kalijaga yang juga pertama kali ini menuliskan pengalamannya secara lengkap dan mendalam. Hal menarik yang diceritakan salah satu kontributor di dalam buku ini adalah meskipun UIN Sunan Kalijaga belum dapat menyediakan *lift* bagi mahasiswa yang menggunakan kursi roda, pihak kampus mengatur agar perkuliahan yang diikuti mahasiswa tersebut selalu dilaksanakan di ruang lantai satu gedung kampus. Hal ini menunjukkan bahwa UIN Sunan Kalijaga tidak menjadikan keterbatasan (untuk menyediakan sarana) sebagai alasan untuk tidak memenuhi kebutuhan pendidikan mahasiswanya yang berkebutuhan khusus.

Jika upaya-upaya yang diceritakan oleh para pendidik kampus UIN Sunan Kalijaga ini turut dilakukan oleh para pendidik di kampus lainnya, saya yakin hal ini akan membantu mereka untuk siap menghadapi kebijakan baru Mas Menteri Pendidikan Nadiem Makarim yang disebut dengan Kampus Merdeka. Kebijakan ini dilaksanakan guna menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat (Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Salah satu program utama dari kebijakan ini adalah mahasiswa diberikan kebebasan mengambil Satuan Kredit Semester (SKS) di luar program studi, tiga semester yang dimaksud berupa satu semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan dua semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Meskipun mungkin sedikit was-was (awalnya) jika harus ‘melepaskan’ mahasiswa difabel untuk mengikuti pembelajaran selama dua semester di luar kampus, upaya membangun komunikasi dan keterbukaan pihak kampus untuk membantu mahasiswa difabel seperti yang dilakukan oleh para pendidik di UIN Sunan Kalijaga akan menjadi dasar ikatan yang baik dengan mahasiswa-mahasiswi difabel tersebut. Dengan demikian, diharapkan mereka berani untuk membangun komunikasi dengan orang lain seperti yang mereka lakukan dengan warga kampus, tetap menjaga nilai

yang diajarkan di kampus, dan menyampaikan secara asertif ketika mereka menemui kendala atau memerlukan bantuan terkait studi di luar kampusnya. Di samping itu, upaya PLD yang biasa memberikan surat edaran setiap awal semester pada seluruh pendidik agar mengetahui mana mahasiswa difabel yang akan diampunya dan apa saja yang penting untuk dilakukan pendidik sedari awal semester untuk menemu-kenali dan menyikapi mahasiswa difabel tersebut juga dapat diduplikasi untuk pihak luar yang akan menjadi tempat belajar sementara mahasiswa difabel tersebut. Hal ini penting untuk dilakukan agar pihak luar tersebut juga mengetahui apa hal umum yang penting untuk diperhatikan selama mahasiswa tersebut belajar di tempatnya, juga upaya antisipasi agar pihak luar dapat mengondisikan warganya agar tidak memberikan perlakuan negatif pada mahasiswa-mahasiswi difabel tersebut.

Kelebihan yang paling jelas dari buku ini adalah penyajiannya yang ringan dengan tutur bahasa yang luwes, tidak terkesan teoretis, serta tidak terkesan menggurui. Setiap kontributor diberikan ruang untuk berbagi pemikiran, pengalaman, perasaan, bahkan melakukan perenungan pribadi. Mereka diperkenankan mengekspresikan semua itu senyaman mungkin dalam tulisannya. Dengan demikian, setiap bab buku ini terasa hidup dan membuat kita menyadari betapa para pendidik ini betul-betul berusaha menjadikan UIN Sunan Kalijaga sebagai kampus yang inklusif dan

“Pihak kampus mengatur agar perkuliahan yang diikuti mahasiswa tersebut selalu dilaksanakan di ruang lantai satu gedung kampus. Hal ini menunjukkan bahwa UIN Sunan Kalijaga tidak menjadikan keterbatasan (untuk menyediakan sarana) sebagai alasan untuk tidak memenuhi kebutuhan pendidikan mahasiswanya yang berkebutuhan khusus”.

RESENSI

MENGAJAR DIFABEL DI KAMPUS INKLUSIF

memerdekakan semangat belajar mahasiswa difabel. Kampus ini tidak terkungkung dengan pandangan-pandangan konvensional dalam pendidikan yang terkadang justru melahirkan berbagai batasan dalam pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Sebagai contoh, seorang pendidik yang bertugas di PLD mendobrak pemikiran bahwa mahasiswa Fakultas Psikologi haruslah mampu melihat agar dapat menangkap sinyal non-verbal dari klien. Beliau menceritakan bahwa nyatanya di luar negeri ada individu-individu tunanetra yang berhasil menjadi psikolog. Hal tersebut terkadang justru menjadi daya tarik bagi klien sebab melakukan konseling dengan psikolog tunanetra membuat klien merasa tidak sedang diawasi atau dinilai dari penampilannya. Selain menunjukkan bahwa para pendidik di UIN Sunan Kalijaga berusaha mendobrak ortodoksi pendidikan, isi buku ini juga menunjukkan bahwa mereka betul-betul berusaha memandang setiap mahasiswa, termasuk mahasiswa difabel, sebagai sosok yang unik dan berhak memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Sebuah pandangan yang membuat para pendidik tersebut berupaya semaksimal mungkin memfasilitasi mahasiswa difabel agar dapat berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Prinsip utama yang ditekankan di dalam buku ini berkaitan dengan bagaimana strategi pendekatan belajar yang perlu terus menerus diakomodasi dan dimodifikasi supaya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan dari mahasiswa difabel.

Kekurangan dari buku ini adalah dalam menceritakan pembekalan seperti apa yang diberikan oleh PLD kepada para pendidik agar dapat mengelola kelas seinklusif mungkin. Cerita-cerita yang disuguhkan dalam buku ini seolah menggambarkan bahwa pendidik mengembangkan sendiri metode yang dirasa pas untuk dilaksanakan di kelas dalam rangka mengakomodasi kebutuhan seluruh mahasiswa, termasuk mahasiswa difabel yang ada di kelas tersebut. Memang benar bahwa metode yang diterapkan untuk mahasiswa berkebutuhan khusus hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhannya, sehingga perlu metode yang *tailor made*, sebagai program

pengajaran yang individual sifatnya bagi setiap mahasiswa difabel. Hanya saja, ada dasar-dasar informasi atau mungkin referensi yang bisa membantu pendidik dalam memilih alternatif dan menentukan metode yang lebih tepat untuk digunakan di kelas yang diikuti oleh mahasiswa difabel di perguruan tinggi. Adanya cerita mengenai bentuk pembekalan dari PLD atau referensi-referensi yang diacu oleh para pendidik di UIN Sunan Kalijaga dalam menentukan metode pengajaran di kelas barangkali dapat membantu pembaca yang terlanjur melabel dirinya kurang kreatif agar tetap bersemangat mengelola kelas dengan mahasiswa difabel. Sehingga tidak berkecil hati terlebih dulu apabila dihadapkan pada keharusan untuk menjadi kreatif demi bisa mengelola kelas yang mempunyai mahasiswa atau mahasiswi difabel. Kekurangan lainnya barangkali hanyalah hal-hal teknis seperti penulisan yang keliru (*typo*) dan halaman-halaman kosong yang tampak tidak sengaja terselip di akhir bab.

Dengan segenap kelebihan dan kekurangannya, buku ini layak untuk direkomendasikan pada para pendidik, tidak hanya pendidik di tingkat perguruan tinggi, tapi juga pendidik pada jenjang pendidikan lainnya— yang ingin mencari tahu bagaimana melaksanakan pendidikan yang inklusif. Penting untuk dicatat bahwa buku ini hanyalah sedikit gambaran dari proses belajar mengajar dengan individu berkebutuhan khusus. Sementara

“Meskipun mungkin sedikit was-was (awalnya) jika harus ‘melepaskan’ mahasiswa difabel untuk mengikuti pembelajaran selama dua semester di luar kampus, upaya membangun komunikasi dan keterbukaan pihak kampus untuk membantu mahasiswa difabel seperti yang dilakukan oleh para pendidik di UIN Sunan Kalijaga akan menjadi dasar ikatan yang baik dengan mahasiswa-mahasiswi difabel tersebut”.

RESENSI

MENGAJAR DIFABEL DI KAMPUS INKLUSIF

itu, untuk dapat melaksanakan pembelajaran dengan semaksimal mungkin -pembaca tetap perlu membekali diri dengan informasi dan pengetahuan yang lebih kaya mengenai ragam kebutuhan khusus seperti ciri-ciri kekhususan, karakter umum individu dengan kekhususan tertentu, serta akomodasi yang mereka perlukan dalam proses belajar mengajar.



“Memang benar bahwa metode yang diterapkan untuk mahasiswa berkebutuhan khusus hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhannya, sehingga perlu metode yang *tailor made*, sebagai program pengajaran yang individual sifatnya bagi setiap mahasiswa difabel”.

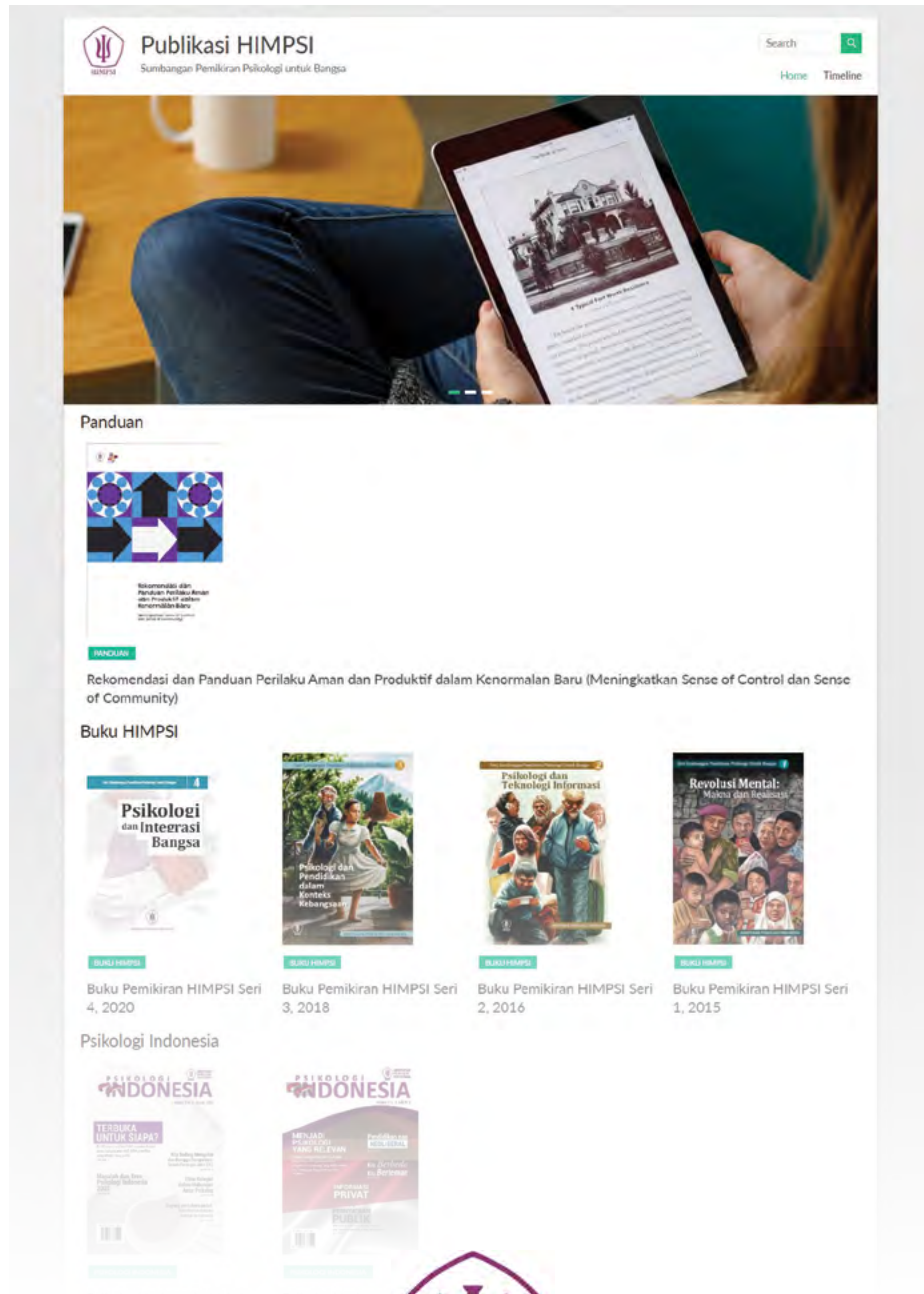


Daftar Acuan

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka*. Diunduh dari: <http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Buku-Panduan-Merdeka-Belajar-Kampus-Merdeka-2020> pada 18 Desember 2020.
- Krisnan. (2020). *Sejarah Pendidikan Luar Biasa (PLB) di dunia dan Indonesia*. Diakses dari: <https://meenta.net/sejarah-plb/#:-:text=Sejarah%20Pendidikan%20Luar%20Biasa%20di%20Indonesia&text=Pertama%20kali%20sekilah%20luar%20biasa,sekolah%20tersebut%20didirikan%20di%20Bandung> pada 17 Desember 2020.
- Maftuhin, A., dkk. (2020). *Mengajar difabel di kampus inklusif: Pengalaman UIN Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: PLD Press.
- Mangunsong, F. (2014). *Psikologi dan pendidikan anak berkebutuhan khusus*. Jilid Kesatu. Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3), Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. ISBN: 978-602-8137-03-4.
- Sunardi, & Sunaryo. (2011). Manajemen Pendidikan Inklusif. *JASSI Anakku*, 10 (2): 184-200.

Kunjungi Website Publikasi HIMPSI di:

<https://publikasi.himpsi.or.id/>



Publikasi HIMPSI

Sumbangan Pemikiran Psikologi untuk Bangsa